



LKIP KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. PANGANDARAN



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu: **“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

Pangandaran, Maret 2018
 BUPATI PANGANDARAN

 H. JEJE WIRADINATA



Laporan Kinerja Kabupaten Pangandaran merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kabupaten Pangandaran dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja pada tahun 2017 dilakukan terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan menggunakan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja utama. Dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama (68,29%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian:
 - a. Sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (53,66%) capaiannya melebihi target.
 - b. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja utama (14,63%) capaiannya sesuai target
2. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama (19,51%) tidak mencapai target.
3. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama (7,32%) target capaiannya 0 (nol), dikarenakan pada tahun anggaran berkenaan tidak dianggarkan program yang menunjang terhadap ketercapaian indikator tersebut.
4. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja utama (4,88%) tidak tersedia data.

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Plafond anggaran diprioritaskan untuk mendorong capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
2. Membangun *database* untuk mendukung gambaran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama secara utuh.

Dalam Tahun Anggaran 2017, untuk pencapaian kinerja terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan menggunakan 41 (empat puluh satu) indikator

kinerja utama. Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1,367,742,917,673.50,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1,307,759,932,586.36,- atau 95,62%.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum dapat menghitung dukungan anggaran untuk pencapaian setiap indikator kinerja utama maupun sasarannya, karena belum linearnya antara indikator kinerja utama ataupun sasaran dengan programnya (masih ada satu program untuk mendukung lebih satu sasaran atau indikator kinerja utama). Hal ini menjadi catatan penting untuk menjadi bahan perbaikan ke depan berupa pemetaan dan sinkronisasi antara sasaran atau indikator kinerja utama dengan program dan kegiatan sebagai pendukung capaian indikator kinerja utama dan sasaran. Namun demikian dalam LKIP tahun ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah menampilkan dukungan anggaran terkait pencapaian misi RPJMD.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun kedua yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2017 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lagi pada tahun-tahun mendatang.



KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIFii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah 2

1.2.1 Karakteristik Wilayah 2

1.2.2 Kondisi Sosial Budaya..... 11

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah 30

1.3.1 Potensi unggulan Daerah 30

1.3.2 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan 31

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 60

2.1 Rencana Strategis..... 60

2.1.1 Visi dan Misi 60

2.1.2 Tujuan serta Sasaran 67

2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2017 70

2.3 Kebijakan Pembangunan Tahun 2017..... 70

2.4 Indikator Kinerja Utama 71

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017..... 75

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2017 78

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 81

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 81

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis..... 87

3.3 Akuntabilitas Keuangan 95

3.4 Prestasi dan Penghargaan 96

3.5 Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran..... 96

BAB IV PENUTUP 167



Tabel

1.1	Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran	2
1.2	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran	3
1.3	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran	5
1.4	Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran.....	7
1.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran	8
1.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	10
1.7	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2013-2017.....	15
1.8	Perkembangan Indek Kesehatan (IK) Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017	16
1.9	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017.....	17
1.10	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017	18
1.11	Perkembangan Indeks Pendidikan(IP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017.....	19
1.12	Perkembangan Indeks Pengeluaran dan Indeks Daya Beli (IDB) Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017.....	20
1.13	Laju PertumbuhanIndeks Pembangunan Manusia Tahun 2013– 2017	21
1.14	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	23
1.15	Prosentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	24
1.16	Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.....	25
1.17	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	26
1.18	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	26
1.19	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	27
1.20	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 – 2017.....	28

1.21	Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Umur di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	29
1.22	Potensi Bidang Peternakan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 -2017 ...	35
1.23	Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Pangandaran	36
1.24	Data Komoditas Ekspor Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	38
1.25	Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2017.....	41
1.26	Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 – 2017	43
1.27	Kondisi Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Pangandaran.....	44
1.28	Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya Tarik Wisata Kabupaten Pangandaran	48
1.29	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(Juta Rupiah)	53
1.30	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(Juta Rupiah).....	54
1.31	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Paritas Daya Beli (PPP) serta Inflasi di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017	55
1.32	Data Investasi di Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2017.....	57
1.33	Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017.....	58
2.1	Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran	62
2.2	Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	64
2.3	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran 2016-2021.....	67
2.4	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran	71
2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	75
2.6	Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran.....	78
3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	80
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	81
3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	82
3.4	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	89
3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	91
3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	91
3.7	Pencapaian target Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	93

3.8	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI).....	95
3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Per Misi Tahun 2017.....	96
3.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2017.....	97
3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Tahun 2017	101
3.12	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun 2017	103
3.13	Program Pendukung Misi ke-1.....	104
3.14	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten.....	105
3.15	Capaian Kinerja Sasaran Terpetakannya Rencana Pengembangan Wilayah yang Baik	107
3.16	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	108
3.17	Lokasi atau Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan	108
3.18	Hasil Pemantaun Kualitas Air Sungai di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.....	109
3.19	Hasil Pemantaun Kualitas Air Laut di Kab. Pangandaran Tahun 2017	110
3.20	Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau	111
3.21	Data Capaian Penanganan Sampah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 ...	112
3.22	Daftar Penanganan Sampah Kab. Pangandaran	112
3.23	Program Pendukung Misi ke-2.....	116
3.24	Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Jalan yang Menghubungkan Antar Obyek Wisata Tahun 2017.....	117
3.25	Jalan dan Jembatan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata	117
3.26	Capaian Indikator Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi	120
3.27	Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman.....	122
3.28	Realisasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik Tahun 2017	123
3.29	Capaian Kinerja Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing	126
3.30	Data Obyek Wisata yang Dikembangkan pada Tahun 2017.....	126
3.31	Capaian Kinerja Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas	127
3.32	Data SKPD Yang Membangun Infrastruktur TIK.....	128
3.33	Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Tahun 2017	129

3.34	Tabel Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan	130
3.35	Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya Gedung Rumah Sakit	131
3.36	Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu	132
3.37	Data Pembangunan Fisik Puskesmas	133
3.38	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata Tahun 2017	135
3.39	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah untuk Masyarakat.....	135
3.40	Program Pendukung Misi ke-3.....	136
3.41	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya/serta Kuatnya Nilai Budaya yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017P	137
3.42	Jumlah Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran	138
3.43	Program Pendukung Misi ke-4.....	139
3.44	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akses pendidikan	140
3.45	Jumlah Siswa Jenjang SD, SMP, MI, MTs Kab. Pangandaran.....	141
3.46	Jumlah Penduduk Usia 7 Sampai 15 Tahun Kab. Pangandaran.....	141
3.47	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	142
3.48	Jumlah Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan/Sekolah.....	143
3.49	Nilai Rata-Rata UKG Kab.Pangandaran 2017	144
3.50	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Tahun 2017	144
3.51	Jumlah Kematian Ibu dan Penyebabnya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	145
3.52	Jumlah Kematian Bayi Neonatal dan Post Neonatal Tahun 2017.....	147
3.53	Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2017.....	148
3.54	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Sehat Tahun 2017 2013 - 2017	149
3.55	Rekapitulasi Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar	150
3.56	Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2017...151	
3.57	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017.....	151
3.58	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017.....	152
3.59	Program Pendukung Misi ke-5.....	152
3.60	Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan serta Sistem Informasi Tahun 2017	154
3.61	Berkembangnya Sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2017	155
3.62	Daftar UMKM Binaan Kabupaten Pangandaran.....	156

3.63	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata yang Berdaya Saing Tahun 2017	157
3.64	Laporan Perbandingan Kunjungan Wisatawan 2013-2016	158
3.65	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Tahun 2017.....	160
3.66	Data Rata-rata Pendapatan/Penghasilan Pembudidaya Ikan per Bulan Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 dan 2016.....	161
3.67	Data Pendapatan/ Penghasilan Nelayan per bulan Tahun 2016.....	161
3.68	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2017.....	162
3.69	Rata-rata Produksi Pembudidaya Ikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.....	164
3.70	Data Produksi per TPI Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	165
3.71	Program Pendukung Misi ke-6.....	165



Gambar

- 1.1 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran 3
- 1.2 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran 4
- 1.3 Peta Kelas Lerang Kabupaten Pangandaran..... 6
- 1.4 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran 8
- 1.5 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran..... 9
- 1.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran 10
- 1.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pangandaran..... 11
- 1.8 Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Pangandaran 47
- 3.1 Alun-alun Parigi114
- 3.2 Lapang Merdeka114
- 3.3 Piamari.....114
- 3.4 Kios Eks Hotel Star Meridian115
- 3.5 Kios Eks Hotel Pananjungsari.....115
- 3.6 Ruang Terbuka Hijau dan Taman Rekreasi.....115
- 3.7 Jalan dan Jembatan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata120
- 3.8 Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten Kab.Pangandaran121
- 3.9 Kondisi jalan Nasional, Prinsi dan Kabupaten Pangandaran.....121
- 3.10 Jalan di Kabupaten Pangandaran.....122
- 3.11 Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik Tahun 2017125
- 3.12 Penataan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Orasarana Situ Cisamping127
- 3.13 Pembangunan Gedung Setda Dan Skretariat DPRD131
- 3.14 Rencana Pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran Sesuai DED132
- 3.15 Contoh Pembangunan Fisik Puskesmas Cikembulan dan Puskesmas Parigi134
- 3.16 Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Pangandaran136
- 3.17 Piagam Penghargaan Kesenian Se-Provinsi Jawa Barat139



1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, perencanaan kerja pembangunan tahunan dan perencanaan pembangunan jangka menengah. Pencapaian sasaran dimaksud disajikan berupa informasi mengenai pencapaian indikator utama sasaran strategis dalam RPJMD disertai dengan penjelasan yang memadai atas keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis.

Dengan demikian, LKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden. LKIP disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang

dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017 yaitu tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.2 Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah

1.2.1 Karakteristik Wilayah

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.011,04 Km² dengan distribusi luasan untuk masing-masing Kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	98,04	10	54	122	400
2	Cijulang	93,16	7	38	90	251
3	Cimerak	118,18	11	51	98	354
4	Cigugur	97,29	7	39	64	200
5	Langkaplancar	177,19	15	65	117	506
6	Mangunjaya	32,78	5	28	47	233
7	Padaherang	118,87	14	60	142	433
8	Kalipucang	136,78	9	29	80	287
9	Pangandaran	60,77	8	31	89	341
10	Sidamulih	77,98	7	32	65	255
	Jumlah	1.011,04	93	427	913	3.260

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Pangandaran, 2017

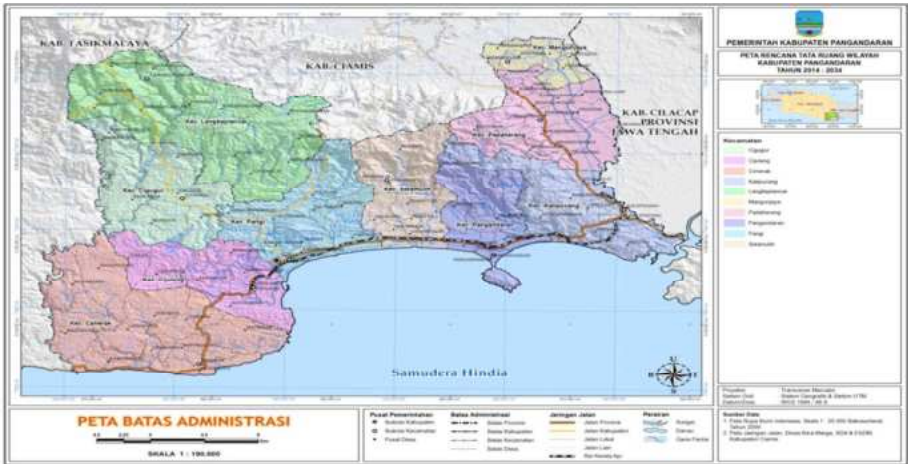
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas Kabupaten dan batas Kecamatan.

Gambar 1.1
Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

b) Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m diatas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst.Kondisi masing-masing Kecamatan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

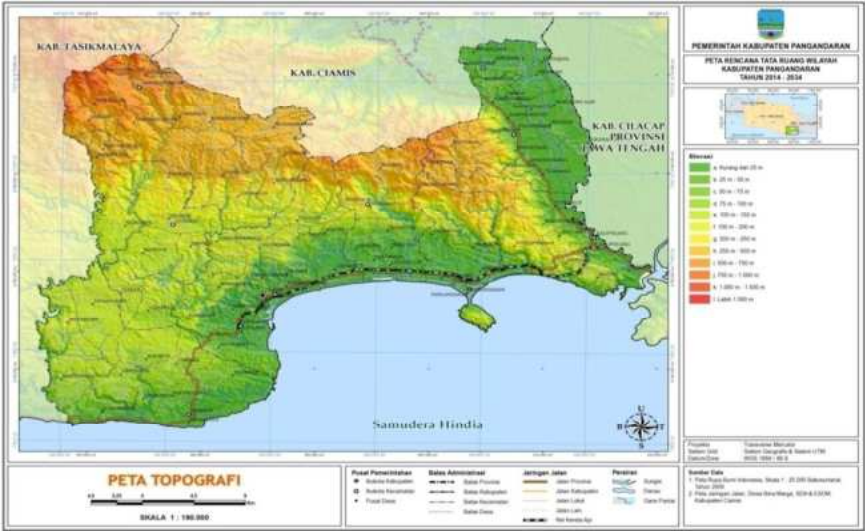
No	Kecamatan	Kondisi Tofografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	- Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. - Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	- Merupakan Kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. - Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	- Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	- Wilayah ini merupakan datarantertinggi di Kabupaten Pangandaran. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	- Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl - Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan

No	Kecamatan	Kondisi Tofografi Kabupaten Pangandaran
		Ciliang.
6	Sidamulih	a. Merupakan Kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. b. Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni Desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	• Merupakan daerah pesisir pantai,merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. • Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan Desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). • Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	• Wilayah ini bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. • Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). • Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

Sebagai gambaran topografi wilayah Kabupaten Pangandaran seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Peta Topografi Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

Jika dilihat dari kondisi atau tingkat kemiringan kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%.Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	Kemiringan lereng merata pada hampir semua Desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %.
2	Cijulang	- Kemiringan lereng merata pada hampir semua Desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %. - Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15 % - 25 %.
3	Cigugur	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5 % - lebih dari 40 %. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggan.
9	Padeherang	- Kemiringan lereng bervariasi antara 0 % - 40 %. - Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0 % - 8 %. - Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8 % - lebih dari 40 %.
10	Mangunjaya	Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh Desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0 % - 5 %.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu pertahankan tanaman tegakannya, karena jika ditebang akan berpotensi menimbulkan bencana longsor apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

[illegible]

debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.

- Longsor mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang-Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

3) Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping):

Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cujulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.

Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

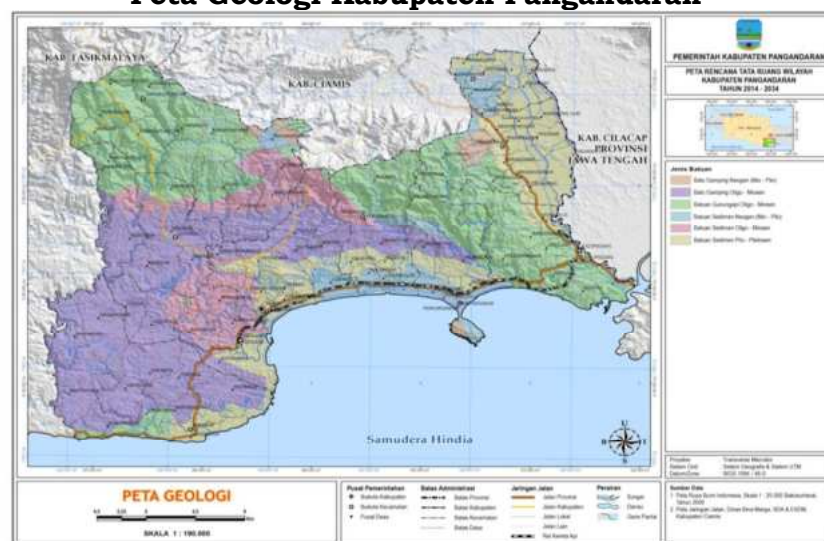
Tabel 1.4
Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.591,68
2	Batu Gamping Oligo - Miosen	35.752,65
3	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	37.048,80
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.520,38
5	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	12.021,43
6	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	19.888,43
	Grand Total	112.823,37

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4
Peta Geologi Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

d) Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy diantaranya adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Daerah Aliran Sungai Cijulang, Daerah Aliran Sungai Cimedang, dan Daerah Aliran Sungai Citanduy. Luasan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran

No	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
1	DAS Cijulang	56.006,35
2	DAS Cimedang	34.929,51
3	DAS Citanduy	21.887,50
	Grand Total	112.823,37

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 (dua) estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.

2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10/V100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

Peta sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.5
Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran



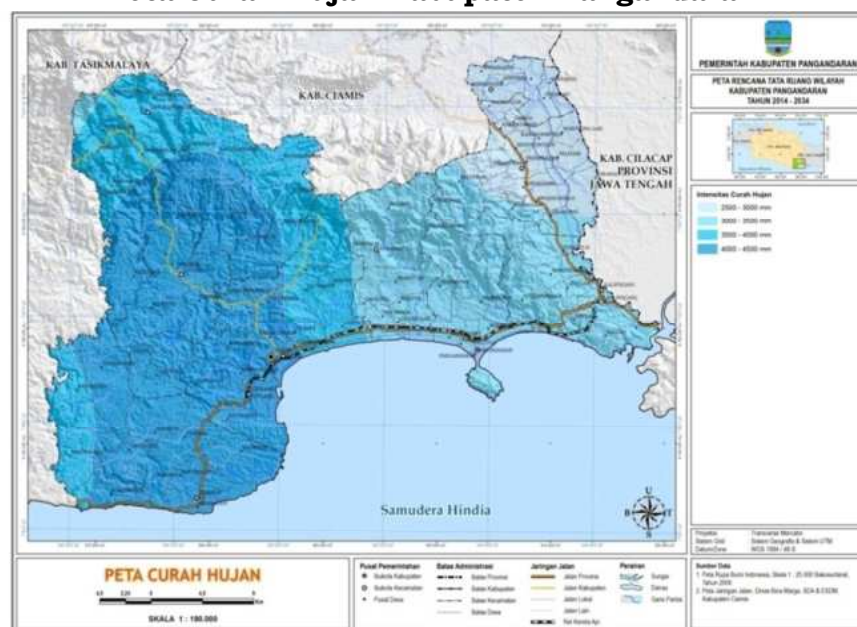
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

e) Kondisi Klimatologi/Iklim

Kabupaten Pangandaran beriklim tropis basah (*humid tropical climate*), dimana menurut hasil studi data sekunder, iklim dan cuaca itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu :

1. Pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattem*),
 2. Topografi regional yang datar sampai bergunung di bagian selatan Jawa Barat, dan
 3. Elevasi topografi dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan suhu rata-rata 25 – 30° C, dimana suhu tertinggi terletak pada daerah yang mendekati pantai wilayah timur serlatan Kabupaten Pangandaran.
- Adapun Gambaran sebaran curah hujan dapat dilihat pada peta dibawah ini.

Gambar 1.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran

f) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk lahan kebun yaitu seluas kurang lebih 24.704 ha atau sekitar 28,51% yang dilanjutkan dengan penggunaan sawah irigasi seluas 16.426 ha atau sekitar 18,95%. Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	4.855,00
2	Irigasi setengah teknis	1.172,20
3	Irigasi sederhana PU	1.063,00
4	Irigasi sederhana Non PU	2.095,00
5	Tadah hujan	6.615,90
6	Pasang surut	18,00
7	Lebak	606,90
8	Rawa	-

penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini, yaitu pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Pada metode baru, terdapat indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita. Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*) yang cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Dampak secara langsung yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM yaitu perubahan level IPM yang secara umum dengan metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama dan perubahan peringkat IPM. Sebagai catatan bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Pada indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru, akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan, namun cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP, berbeda dengan cakupan penghitungan dengan metode lama yang menggunakan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya, namun terapat perubahan pada jumlah komoditas penghitungan paritas daya beli yang digunakan, pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan, lebih banyak dibanding metode lama sebanyak 27 komoditas. Dari sisi penghitungan agregasi indeks komposit IPM, terjadi perubahan dari sebelumnya pada metode lama menggunakan rata-rata aritmatik, namun pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik.

Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki tingkat daya beli yang tinggi, yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) menekankan perlunya Indonesia memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya

pembangunan manusia dan bagaimana pembiayaannya. Laporan tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan hak asasi manusia yang sangat penting untuk meletakkan dasar kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang.

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan *Human Development index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa 3 unsur ini.

Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup dan kehidupan masyarakat dari kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup dan kehidupan tersebut, berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi.

Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya. IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan.

Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai

keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Di bidang kesehatan upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan dengan upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap, penanganan status gizi pada balita, yang akan berdampak positif terhadap angka harapan hidup penduduk, tentunya dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.

Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan *drop out* murid sekolah tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai daya beli masyarakat, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengendalikan inflasi dan pengangguran (stabilisasi), melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi pendapatan melalui upaya pengembangan usaha skala mikro untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.

IPM merupakan salah satu indikator yang menjadi Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 69,35 poin. Pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang didukung oleh seluruh anggota DPRD, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan IPM pada tahun 2016 sebesar 0,27%. IPM Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat mencapai 65,79 poin, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,18 poin atau sebesar 0,27% dari tahun 2015 yaitu sebesar 65,62 poin. Hal inilah yang patut dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten Pangandaran mampu sejajar dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan pengolahan data *benchmark* IPM sebelumnya, maka pada tahun 2017 IPM Kabupaten Pangandaran diproyeksikan mencapai 66,14 poin, atau mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin atau setara dengan 0,53%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran diperoleh dari hasil penghitungan masing-masing komponen IPM, yaitu Indeks Harapan Hidup (Angka Harapan Hidup/ e_0), Indeks Pendidikan/IP (Harapan Lama

Sekolah/HLS dan Rata-rata Lama Sekolah/RLS) dan Indeks Pengeluaran/IP(Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan).

Capaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2016 sebesar 65,79. Angka ini telah mencapai kategori sedang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2017 ini diproyeksikan mengalami peningkatan dari 65,79 pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 66,14 poin pada Tahun 2017. Meskipun angkanya bergerak perlahan, kondisi ini menjadi indikasi adanya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh pembangunan tiga sektor utama yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan ekonomi, maka Kabupaten Kabupaten Pangandaran menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Sedang, yaitu capaian IPM antara 60 – 70.

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu gambaran komprehensif untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia.

b) Indek Kesehatan (IK)

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH ini derajat kesehatan suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Tabel 1.7
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,79	69,84	70,24	70,40	70,53

*Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017 *) Angka sementara*

Tabel diatas memperlihatkan berbagai komponen *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* Kabupaten Pangandaran periode Tahun 2013 – 2017 terlihat kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran mengalami perbaikan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 meningkat 0,05 poin tahun yaitu dari 69,79

pada Tahun 2013 meningkat menjadi 69,84 tahun pada Tahun 2014, dan pada Tahun 2015 meningkat 0,04 poin yaitu dari 69,84 tahun pada tahun 2014 meningkat menjadi 70,24 tahun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat 0,16 poin yaitu dari 70,24 tahun pada tahun 2015 menjadi 70,40 pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 diproyeksikan meningkat sebesar 0,13 poin, yaitu dari 70,40 tahun pada tahun 2016 menjadi 70,53 tahun pada tahun 2017 (Angka sementara) atau mencapai 82,68prosen dari angka maksimal (standard UNDP/*United Nation Development Programme* tahun). Hal ini bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat, walaupun pertumbuhannya masih relative kecil.Hal tersebut sangatlah wajar karena Kabupaten Pangandaran masih belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), baru sebatas Puskesmas yang ada di tiap Kecamatan.

Berdasarkan angka harapan hidup tersebut dapat dihitung indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran dimana pada tahun 2017, indeks kesehatan Kabupaten Pangandaran diproyeksikan mencapai angka 77,73 tahun (Angka sementara).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat seperti tertuang dalam Prioritas Pembangunan diatas pada prinsipnya adalah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi fisik dan intelegensinya. Parameter yang sering digunakan dari kedua aspek tersebut adalah derajat kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat yang merupakan komponen pembentuk indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.8
Perkembangan Indeks Kesehatan (IK)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Indek Kesehatan (IK)	76,60	76,68	77,29	77,54	77,73

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017 *) Angka sementara

Pada Tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran, salah satu jenis pelayanan kesehatan yang sangat berpengaruh pada angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah pada pelayanan proses persalinan. Dimana proses persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Dari hasil Survei Indikator Pembangunan pada Tahun 2017 terlihat bahwa pemanfaatan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga peramedis lainnya) dalam pertolongan kelahiran sudah didominasi oleh tenaga kesehatan sebesar 88,27 prosen dan hanya 11,73 prosen yang pertolongan kelahiran dilakukan oleh non tenaga medis/kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam penggunaan tenaga medis/kesehatan secara optimal dalam proses persalinan walaupun masih sebatas di Puskesmas dan Bidan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Dan diharapkan kedepannya angka kematian bayi dan ibu melahirkan dapat ditekan semaksimal mungkin, karena angka tersebut sangat berpengaruh terhadap Indeks Kesehatan masyarakat.

c) Indeks Pendidikan (IP)

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka harapan lama sekolah, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya proses pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat jalani oleh setiap anak dalam menempuh pendidikannya.

Tabel 1.9
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	11,48	11,89	11,99	12,02	12,22

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017 *) Angka sementara

Selanjutnya pada Indikator Pendidikan yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami kenaikan setiap tahunnya, Pada tahun 2017, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pangandaran mencapai 12,22 tahun (Angka sementara). Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,22 tahun (setingkat lulus SLTA) mulai masuk Perguruan Tinggi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2016 yang hanya mencapai 12,02 tahun. untuk Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) pada Tahun 2017 meningkat 0,20 poin, yaitu dari 12,02 tahun pada Tahun 2016 meningkat menjadi 12,22 tahun pada Tahun 2017 atau sudah mencapai 67,88 persen dari angka maksimal (standard UNDP/*United Nation Development Programme* 18 tahun).

Kondisi ini merupakan tuntutan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan atau kesadaran orang tua untuk

menyekolahkan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pangandaran harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Nilai Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 1.10
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.01	7.05	7.06	7.07	7,10

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017 *) Angka sementara

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kabupaten Pangandaran tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7,10 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk Kabupaten Pangandaran yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan atau *telah menempuh pendidikan selama 7,10 tahun atau baru menduduki bangku kelas 2 (satu) atau sedang berada di kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)*.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan atau kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pangandaran terus mengalami perbaikan setiap tahunnya walaupun pertumbuhannya masih sedikit sekali.

Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2017 diproyeksikan meningkat sekitar 0,03 poin yaitu dari 7,07 tahun pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,10 tahun pada Tahun 2017(angka sementara) atau baru mencapai 47,33 prosen dari angka maksimal (standard UNDP/*United Nation Development Programme* 15 tahun).

Sama kondisinya dengan capaian angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Pangandaran masih perlu terus untuk ditingkatkan dalam upaya peningkatan IPM di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan dua indikator pendidikan utama tersebut, dapat dihitung indeks pendidikan setiap tahunnya berdasarkan rumus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah tabel indeks pendidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan

perkembangan indeks pendidikan tahun 2013- 2017 di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.11
Perkembangan Indeks Pendidikan(IP)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Indeks Pendidikan (IP)	55,26	56,53	56,84	56,96	57,59

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017) Angka sementara*

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Pangandaran sudah mengalami peningkatan, namun masih agak lambat, dan masih di bawah rata-rata Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam kaitannya dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun masih perlu mendapat perhatian utama dengan meminimalisir angka *drop out* sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan meningkatkan angka kelulusan siswa di setiap jenjang jika dihubungkan dengan pencapaian komponen pendidikan yang membentuk *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, juga perlu usaha merubah persepsi masyarakat tentang sekolah, dimana banyak masyarakat yang beranggapan buat apa sekolah tinggi kalau nantinya tetap menjadi “kuli” atau menjadi “ibu rumah tangga saja” bagi seorang wanita.

Pandangan seperti ini akan membatasi kemauan masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya. Perlu juga disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini, melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan pendidikan yang lebih intensif seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

d) Indek Pengeluaran/Indek Daya Beli (IDB)

Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun bersumber dari BPS, kemudian data ini akan dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2010=100. Paritas daya beli atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan yang diterima/dimiliki.

Tabel 1.12
Perkembangan Indeks Pengeluaran dan Indeks Daya Beli (IDB)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Pengeluaran Perkapita (Rp)	8.200.000	8.232.000	8.265.000	8.312.000	8.346.723
Indeks Daya Beli (%)	64,07	64,19	64,31	64,49	64,61

*Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017 *) Angka sementara*

Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil penduduk/masyarakat Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2016 yaitu sekitar Rp. 8.312.000,-. Angka ini lebih tinggi dari keadaan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 8.265.000,- di Tahun 2015 atau meningkat sebesar Rp. 47.000,-. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran kedepannya perlu lebih memfokuskan terutama peningkatan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhan maupun pemerataan hasilnya, dan peningkatan pembangunan manusia.

Di antara tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah komponen peningkatan daya beli masyarakat yang paling berat. Indikator ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro yang fluktuatif apalagi jika ada kebijakan kenaikan BBM dan kenaikan TDL yang akan menekan daya beli masyarakat/penduduk. Indikator ini diproyeksikan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 34.723,- setara dengan 0,42% yaitu dari Rp.8.312.000,- pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 8.346.723,- pada Tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan.

Berdasarkan indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tadi terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan sesuai dengan pengembangan strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusianya. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini selaras dengan strategi pembangunan nasional.

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Pada tahun 2017 pertumbuhan IPM Kabupaten Pangandaran adalah 0,53 prosen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2016 yang hanya mencapai sebesar 0,27 prosen, hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diperlihatkan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan indeks komponennya dengan menggunakan Laju Pertumbuhan. Dengan melihat tabel dibawah tampak bahwa kinerja perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada periode Tahun 2013 – 2017 rata-rata sebesar 0,53 prosen, yang ditunjang oleh kinerja pada Indeks Pendidikan (IP) sebesar 1,09 prosen yang mempunyai laju pertumbuhan diatas Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia serta ditunjang juga oleh kinerja pada Indeks Kesehatan sebesar 0,24prosen dan ditunjang pula oleh kinerja pada Indeks Daya Beli sebesar 0,18prosen.

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pangandaran dan Komponennya
Tahun 2013– 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017*
IPM	64,73	65,29	65,62	65,79	66,14
Indeks Pendidikan(IP)	55,26	56,53	56,84	56,96	57,59
Indeks Kesehatan(IK)	76,60	76,68	77,29	77,54	77,73
Indeks Daya Beli(IDB)	64,07	64,19	64,31	64,49	64,61
Pertumbuhan IPM		0,86	0,51	0,27	0,53
Pertumbuhan IP		2,30	0,55	1,21	1,09
Pertumbuhan IK		0,10	0,80	0,32	0,24
Pertumbuhan IDB		0,19	0,19	0,28	0,18

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2017) Angka sementara*

Angka Laju Pertumbuhan inilah yang dapat dipergunakan sebagai indikator perkembangan pembangunan manusia disuatu daerah. Dengan demikian, tantangan bagi masing-masing daerah adalah bagaimana cara memaksimalkan nilai Laju Pertumbuhan (mendekatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh sedekat-dekatnya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia/IPM ideal).

Dengan melihat kinerja perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran tersebut, masih ada yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka Laju Pertumbuhan agar bisa tercapai angka yang ideal, diantaranya dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan sarana

penunjang akses ke unit kesehatan dan ditunjang dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga medis/non medis terlatih, terutama bagi wanita hamil dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan ketika proses persalinan, penyuluhan tentang kesehatan balita, peningkatan gizi yang harus terpenuhi untuk bumil dan balita serta keluarga, penyuluhan akan arti pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta memudahkan akses pelayanan kesehatan utamanya bagi penduduk yang kurang mampu.

Program-program yang berhubungan dengan bidang pendidikan juga perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun keatas baik usia dewasa maupun usia lanjut, meminimalisir angka drop out sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan meningkatkan angka kelulusan siswa di setiap jenjang sehingga nantinya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komponen daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan. Permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pangandaran. Tentunya hal itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan lapangan pekerjaan, atau memberikan kemudahan dalam hal akses ke pusat-pusat ekonomi, peningkatan kapasitas agar kemampuan ekonomi mereka meningkat juga pengendalian inflasi daerah agar harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari ketiga komponen pembangunan manusia memang komponen daya beli yang paling berat. Pemerintah Daerah harus tepat dalam memberikan intervensi program kepada masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak meninabobokan masyarakat tapi membangun kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka sendiri.

Kabupaten Pangandaran dengan predikat sebagai DOB Kabupaten yang baru seyogianya dapat membuat program kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/ kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

e) Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM, mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, serta pengarahannya mobilitasnya, mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 yaitu sebanyak 409.016 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 205.032 orang dan perempuan sebanyak 203.984 orang dengan sex ratio 100,51 prosen.

Tabel 1.14
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Parigi	21.396	22.052	43.448
2	Cijulang	13.291	13.705	26.996
3	Cimerak	23.538	23.311	46.849
4	Cigugur	11.063	10.749	21.812
5	Langkaplancar	25.626	24.868	50.494
6	Mangunjaya	16.420	16.212	32.632
7	Padaherang	33.728	33.536	67.264
8	Kalipucang	18.796	18.622	37.418
9	Pangandaran	27.395	27.034	54.429
10	Sidamulih	13.779	13.895	27.674
Jumlah		205.032	203.984	409.016

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

f) Kepadatan Penduduk

Pada Tahun 2017, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan dari yang terendah sebesar 21.812 jiwa atau 5,33 prosen dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yaitu di Kecamatan Cigugur yang luasnya 97,29 Km persegi dan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 67.624 jiwa atau sebesar 16,53 prosen dari total penduduk Kabupaten Pangandaran yaitu di Kecamatan Padaherang yang menguasai 8,83 prosen luas wilayah dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadikan Kecamatan Padaherang sebagai Kecamatan terpadat di Kabupaten Pangandaran. Kecamatan Pangandaran merupakan Kecamatan kedua terbesar distribusi penduduknya dengan populasi 54.429 orang (13,31 prosen). Dengan luas wilayah 60,77 kilometer persegi atau hanya 6,01 prosen dari total luas wilayah

Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Pangandaran ini memiliki kepadatan 884,3 jiwa per kilometer persegi, dan diikuti oleh Kecamatan Langkaplancar di posisi ketiga. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

Tabel 1.15
Prosentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan Di Kabupaten
Pangandaran Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1	Parigi	98,04	43.448	443
2	Cijulang	93,16	26.996	290
3	Cimerak	118,18	46.849	396
4	Cigugur	97,29	21.812	224
5	Langkaplancar	177,19	50.494	285
6	Mangunjaya	63,03	32.632	518
7	Padaherang	89.27	67.264	753
8	Kalipucang	136,78	37.418	274
9	Pangandaran	60,77	54.429	896
10	Sidamulih	77,98	27.674	355
Jumlah		1.011,69	409.016	404

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

Tingkat kepadatan ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Sehingga didapatkan angka rata-rata kepadatan penduduk. Kecamatan Pangandaran merupakan Kecamatan terpadat di Kabupaten Pangandaran, 6 (enam) Kecamatan memiliki kepadatan paling rendah, dimana tingkat kepadatannya lebih rendah dari pada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Pangandaran. Hal ini disebabkan oleh luasan wilayahnya cukup luas sedangkan jumlah penduduknya relative sedikit yaitu terdapat di Kecamatan Cijulang, Cimerak, Cigugur, Langkaplancar, Kalipucang dan Sidamulih, sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, terdapat di Kecamatan Pangandaran, Padaherang, Mangunjaya dan Parigi.

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 prosen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran yaitu dari 375 orang/km² pada tahun 2010 menjadi 404 orang/km² pada tahun 2017.

g) Komposisi Penduduk

Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0 - 14 tahun sampai dengan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini bias menggambarkan angga beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal tersebut dapat menggambarkan makin banyak jumlah penduduk yang produktif makin

rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2016 seperti pada tabel berikut;

Tabel 1.16
Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	00 – 04	9.510	8.936	18.446
2	05 – 09	15.914	14.800	30.714
3	10 – 14	16.297	15.199	31.496
4	15 – 19	17.302	16.603	33.905
5	20 – 24	17.109	16.118	33.227
6	25 – 29	15.267	14.593	29.860
7	30 – 34	14.155	14.090	28.245
8	35 – 39	14.414	14.794	29.208
9	40 – 44	14.036	15.355	29.391
10	45 – 49	15.414	16.462	31.876
11	50 – 54	13.912	15.144	29.056
12	55 – 59	12.961	13.404	26.365
13	60 – 64	10.280	9.840	20.120
14	65- 69	7.781	7.308	15.089
15	70 – 74	4.535	4.745	9.280
16	>75	6.145	6.593	12.738
Jumlah		205.032	203.984	409.016

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di antaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang.

Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk. Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Pangandaran 291.253 orang setara 71,20 prosen, sedangkan usia tidak produktif 117.763 orang (40,43prosen).

Dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pangandaran setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 40 penduduk bukan usia produktif atau dapat dikatakan bahwa setiap 4 orang penduduk usia produktif menanggung 1 orang penduduk usia tidak produktif. Angka ini relatif hampir sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, maka angka ketergantungan penduduk perempuan relatif lebih rendah dibanding penduduk laki-laki.

Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

Tabel 1.17
Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif (15 – 64)	Usia Tidak Produktif		Dependency Ratio
			0 - 14	65 +	
1	Laki-laki	144.850	41.721	18.461	41,55%
2	Perempuan	146.403	38.935	18.646	39,33%
Laki-laki + Perempuan		291.253	80.656	37.107	40,43%

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut didefinisikan sebagai rasio jenis kelamin atau sex ratio. Untuk lebih jelasnya nilai perbandingan sex ratio penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 seperti pada tabel dibawah.

Tabel 1.18
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis
1	Parigi	21.396	22.052	97,03
2	Cijulang	13.291	13.705	96,98
3	Cimerak	23.583	23.311	100,97
4	Cigugur	11.063	10.749	102,92
5	Langkaplancar	25.626	24.868	103,05
6	Mangunjaya	16.420	16.212	101,28
7	Padaherang	33.728	33.536	100,57
8	Kalipucang	18.796	18.622	100,93
9	Pangandaran	27.395	27.034	101,34
10	Sidamulih	13.779	13.895	99,17
Jumlah		205.032	203.984	99,48

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kondisi dari sosial dan ekonomi rumah tangga serta keberlangsungan reproduksi. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 adalah 100 prosen. Artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pangandaran lebih banyak dari penduduk perempuan walaupun perbedaannya sangat sedikit sekali yaitu sekitar 1.048 orang, dengan kata lain untuk setiap 100 laki-laki terdapat 99 perempuan.

Jika dilihat dari sebarannya per Kecamatan, Kecamatan Cijulang (96,98), Kecamatan Parigi (97), dan Kecamatan Sidamulih (99) yang rasio jenis kelaminnya berada pada angka di bawah 100. Sementara yang lainnya

mempunyai angka rasio jenis kelamin sama atau di atas rata-rata kabupaten yaitu 100.

Apabila ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan, maka konsentrasi penduduk paling banyak terpusat di Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran dan Padaherang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Dari indikator kepadatan penduduk tersebut dapat menunjukkan bentuk penyebaran penduduk, apakah tersebar merata atau tidak, yang dapat dijadikan sebagai gambaran kemampuan daerah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk diantaranya :

- a. Faktor fisiografis, bahwa penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.
- b. Faktor biologi, karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.
- c. Faktor kebudayaan dan teknologi, bahwa daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Permasalahan lain terkait dengan kependudukan yaitu, masalah urbanisasi yang menyebabkan penduduk perkotaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Intensitas mobilitas penduduk yang semakin tinggi tentu saja akan menuntut jaringan prasarana yang semakin baik dan luas yang dapat berdampak secara jangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perDesaan untuk mengantisipasi meningkatnya urbanisasi diantaranya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur perDesaan.

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan.

h) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai IPM suatu daerah. Untuk lebih

jelasan dapat dilihat pada tabel dibawah struktur pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017.

Tabel 1.19
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	SD/ Sedera jat	SLTP/ Sedera Jat	SLTA/ Sedera jat	Diploma 1,2,3	Strata 1	Strata 2 &3	Jumlah
1	Parigi	10.450	17.955	7.067	5.791	700	1.366	119	43.448
2	Cijulang	7.395	10.817	4.138	3.417	402	760	67	26.996
3	Cimerak	13.015	23.053	6.761	3.150	270	571	29	46.849
4	Cigugur	6.248	10.523	3.007	1.535	166	322	11	21.012
5	Langkaplancar	13.458	24.008	9.093	3.014	297	588	36	50.494
6	Mangunjaya	8.501	14.570	5.635	3.119	287	490	30	32.623
7	Padaherang	20.537	28.411	10.853	5.811	556	1.030	66	67.264
8	Kalipucang	10.734	16.669	5.730	3.464	260	525	36	37.418
9	Pangandaran	15.735	19.032	9.201		692		100	54.429
10	Sidamulih	7.856	12.718	3.588	2.722	284	470	26	27.674
Total		113.929	177.756	65.073	40.480	3.914	7.334	530	409.016

Sumber; DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran, 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan strata 1, 2 dan 3 sebanyak 7.864 orang atau setara dengan 1,92% dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran, tingkat Diploma sebesar 0,95%, SLTA/Sederajat sebesar 9,90% dan SLTP/Sederajat sebesar 15,90% dan SD/Sederajat sebesar 28,80%. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 113.929 orang atau 27,85%.

i) Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan Penduduk Miskin sejak tahun 2014 - 2017, proporsinya memiliki angka yang pluktuatif. Penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran terlihat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu terjadi penurunan sebanyak 1.134 jiwa atau sebesar 3,72 prosen dari jumlah penduduk miskin akhir tahun 2017 sebanyak 30.418 jiwa.

Tabel 1.20
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2014	400.817	30.418	7,58
2	2015	402.413	32.686	8,12
3	2016	405.683	31.552	7,77
4	2017	409.016	30.418	7,43

*Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran dan BPS Kabupaten Ciamis, 2017 * (Angka sementara)*

j) **Jumlah Penduduk yang Bekerja**

Dalam bidang Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Sehingga angka pengangguran dapat dikurangi dengan semakin banyaknya angka pengangguran yang tersalurkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tabel 1.21
Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Umur
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

Kelompok Umur	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan &Hotel	Jasa-jasa	Lainnya	Total
10-14	575	677	-	534	-	0	1.786
15-19	704	1.498	540	1.321		670	5.509
20-24	1.450	4.460	1.695	4.027	3.018	530	15.180
25-29	3.037	4.944	1.166	4.232	4.020	1.396	18.795
30-34	5.594	6.306	1.358	3.765	3.040	1.517	21.580
35-39	3.103	3.819	622	5.791	5.349	1.987	20.671
40-44	4.090	6.488	3.332	5.251	4.519	2.889	26.569
45-49	10.142	3.604	2.538	5.215	4.375	455	26.329
50-54	8.864	2.870	2.559	3.103	3.317	2.017	22.730
55-59	9.306	3.965	1.425	3.477	1.428	79	19.680
60-64	11.980	1.305	713	1.717	940	941	17.596
65 +	3.593	710	220	219	382	719	5.843

Kelompok Umur	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan &Hotel	Jasa- jasa	Lainnya	Total
Total	68.274	41.318	16.294	40.190	31.820	13.539	211.433

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Survei indikator Pembangunan Kab. Pangandaran Tahun 2016 (angka diolah)

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Pangandaran masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di Desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

1.3.1 Potensi Unggulan Daerah

1) Potensi Sumber Daya Air

Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air (mata air) yang merupakan milik Pememerintah Daerah yaitu :

1. Mata air Kalisodong yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit airdengan debit air rata-rata 105.0 C/detik.
2. Mata air Guha hawu yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit air rata-rata 7,5 C/detik.
3. Mata air Madasari yang bertempat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak dengan debit air rata-rat 7,5 C/detik.
4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih dengan debit air rata-rata 32,5 C/detik.

Pemanfaatan potensi air baku tersebut pada saat ini masih terbatas hanya untuk air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti, air irigasi dan pariwisata.

2) Potensi Pertanian

Kabupaten Pangandaran masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap

perekonomian, yaitu masih sebagai penyumbang tertinggi. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan sebesar 38,38% lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya.

Pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan), beberapa komoditas dapat dikategorikan sebagai komoditi unggulan dan prospektif. Saat ini pengembangan agribisnis komoditas unggulan muncul menjadi salah satu alternatif peluang investasi dalam pembangunan sektor pertanian. Mengemukanya fenomena tersebut dalam konteks perencanaan wilayah dan otonomi daerah, terjadi karena pendekatan tersebut diyakini dan telah teruji sebagai model yang layak dikembangkan menuju pertanian yang tangguh, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani, serta pendapatan asli daerah.

Sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan program revitalisasi pertanian, meliputi kegiatan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah adanya usaha di sektor hulu usaha tani (*on farm*), hilir (*off farm*) dan usaha penunjang lainnya, peningkatan pertumbuhan PDRB kategori pertanian, peningkatan ekspor produk pertanian segar maupun olahan, peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani, penguatan kelembagaan petani, peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif, dan peningkatan pendapatan petani.

1.3.2 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan

1. Agribisnis Padi Sawah

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan beras di Kabupaten Pangandaran diproyeksikan masih terus akan meningkat, sedangkan produksi padi pada tahun 2017 hanya mencapai 192.953,95 ton atau mengalami penurunan sekitar 17.957,01 ton atau setara dengan 8,51 prosen apabila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2016 yaitu sebesar 210.910,96ton, seiring dengan terjadinya penurunan realisasi tanam pada tahun 2017 yang mencapai 290 Ha atau 14,20 % apabila dibandingkan dengan realisasi tanam tahun 2016 yang mencapai 42.050,00 ha sedangkan tahun 2017 hanya seluas 32.035,00 ha. Hal ini terjadi karena: (1)

adanya intensitasi hujan yang cukup tinggi sehingga mengalami berpengaruh terhadap jadwal tanam. (2) adanya penurunan pada indeks pertanaman (keragaman lahan untuk ditanami).

Pemerintah berkeinginan mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah dan akan menghasilkan varietas unggul padi hibrida dan padi tipe baru. Varietas-varietas unggul yang berdaya hasil tinggi ini diharapkan dapat diaktualisasikan potensi genetiknya melalui pengembangan teknologi budi daya dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

Dalam penggunaan varietas unggul, varietas Ciherang, Infari 30, Mekongga dan IR 64 merupakan varietas unggul nasional. Penggunaan varietas ini tidak kurang dari 80% dari total luas pertanaman. Secara umum, varietas tersebut dikembangkan di Kecamatan Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan Sidamulih.

Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan produksi padi adalah: (1) mendorong sinergi antar subsistem agribisnis; (2) meningkatkan akses petani terhadap sumber daya, modal, teknologi, dan pasar; (3) mendorong peningkatan

produktivitas melalui inovasi baru; (4) memberikan insentif berusaha; (5) mendorong diversifikasi produksi; (6) mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder; (7) pemberdayaan petani dan masyarakat; (8) pengembangan kelembagaan (kelembagaan produksi dan penanganan pascapanen, irigasi, koperasi, lumbung pangan Desa, keuangan dan penyuluhan).

Kebijakan pengembangan padi diarahkan pada: (1) pembangunan dan pengembangan kawasan agribisnis padi yang modern, tangguh, dan pemberian jaminan kehidupan yang lebih baik bagi petani; (2) peningkatan efisiensi usaha tani melalui inovasi unggul dan berdaya saing; (3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, efisien dan produktif serta berkelanjutan yang dapat mendukung ketahanan ekonomi dan pelestarian lingkungan; (4) pemberdayaan petani dan masyarakat perDesaan; dan (5) pengembangan kelembagaan dan kemitraan yang modern, tangguh, efisien, dan produktif.

Program yang dicanangkan meliputi : (1) pengembangan sarana dan prasarana, (2) pengembangan sistem perbenihan, (3) akselerasi peningkatan produktivitas (intensifikasi), (4) perluasan areal tanam (ekstensifikasi), (5) pengembangan sistem perlindungan, (6) pengolahan dan pemasaran hasil, (7) pengembangan kelembagaan, dan (8) pemantapan manajemen pembangunan pertanian.

2. Agribisnis Jagung

Dewasa ini jagung tidak hanya digunakan untuk bahan pangan tetapi juga untuk pakan ternak. Dalam beberapa tahun terakhir proporsi penggunaan

jagung oleh industri pakan ternak. Realisasi produksi jagung Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 mencapai 4.739,59 ton pipilan kering menurun sebesar 23,15% atau 1.427,48 ton dari produksi tahun 2016 sebesar 6.167,07 ton pipilan kering. Hal ini sejalan dengan penurunan luas panen pada tahun 2017 seluas 243,20 Ha (25,28%) apabila dibandingkan dengan luas panen tahun 2016 sebesar 962,00 Ha. Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi jagung di Kabupaten Pangandaran adalah Kecamatan Kalipucang, Cigugur dan Langkaplancar.

Ditinjau dari sumber daya lahan dan ketersediaan teknologi, Kabupaten Pangandaran sebenarnya masih berpeluang untuk meningkatkan produksi jagung karena pada saat ini produksi jagung Kabupaten Pangandaran masih belum mampu memenuhi kebutuhan jagung di Jawa Barat.

Upaya peningkatan produksi jagung ditempuh melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Perluasan areal tanam diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk peningkatan produktivitas ditempuh dengan perbaikan teknis budidaya. Teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan jagung antara lain adalah penggunaan varietas hibrida yang lebih unggul, teknologi budidaya yang efisien dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), teknologi pasca panen untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui Sekolah Lapang (SL).

Kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan agribisnis jagung adalah kebijakan pengembangan insentif investasi, kelembagaan keuangan dan permodalan, peningkatan dukungan teknologi yang siap diterapkan di lapangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan agribisnis, dukungan pemasaran, serta dukungan peraturan dan perundang-undangan.

3. Agribisnis Kedelai

Pertumbuhan permintaan kedelai selama 15 tahun terakhir cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Harga kedelai impor yang murah dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri.

Prospek pengembangan kedelai di dalam negeri umumnya dan di Kabupaten Pangandaran khususnya untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang tersedia, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dalam usaha tani. Disamping itu, pasar komoditi kedelai masih terbuka lebar.

Realisasi produksi kedelai Tahun 2017 mencapai 541,20 ton biji kering, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 483,44 ton, terjadi

peningkatan sebesar 10,67% (57,67 ton). Beberapa Kecamatan yang potensial sebagai sentra produksi kedelai di Kabupaten Pangandaran adalah Kecamatan Langkaplancar, Kalipucang, Padaherang dan Mangunjaya.

Strategi untuk peningkatan produksi kedelai melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi sarana produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, pengaturan tata niaga dan insentif usaha, serta mendorong/membina pengembangan usaha kecil/rumah tangga dalam subsistem hilir untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu tinggi sesuai dengan tuntutan konsumen.

4. Komoditas Sayuran

Komoditas sayuran yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Pangandaran adalah sayuran dataran rendah yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Beberapa sayuran yang teridentifikasi sebagai komoditas unggulan pertama adalah cabe merah, cabe rawit dan tomat. Sedangkan komoditas sayuran lainnya masuk kedalam kelompok unggulan prioritas kedua, namun sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Beberapa daerah sentra produksi utama tanaman sayuran adalah Kecamatan Langkaplancar, Parigi, Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya dan Cimerak.

Realisasi produksi sayuran tahun 2017 terutama cabe merah, cabe rawit dan tomat mencapai 272,60 ton, apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 mencapai 234,00 ton, terjadi peningkatan sebesar 14,16 % (38,60 ton). Sehingga komoditas ini patut dikembangkan secara lebih luas lagi.

5. Komoditas Buah-Buahan

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi keragaman agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai jenis komoditas hortikultura, terutama komoditas buah-buahan, salah satu diantaranya adalah komoditas durian dan manggis. Kedua komoditas tersebut menjadi komoditas yang diunggulkan di Kabupaten Pangandaran karena dari sisi agroklimat Kabupaten Pangandaran sangat cocok untuk pengembangan komoditas tersebut, bahkan komoditas ini bisa dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Walaupun produksi komoditas durian dan manggis pada Tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 akan tetapi komoditas tersebut secara terus menerus dikembangkan baik dari sisi teknologi budidayanya maupun penambahan luas arealnya.

6. Komoditas Peternakan

Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pengembangan komoditas peternakan, yaitu di antaranya : Sapi, Kerbau, Kuda, Domba, kambing serta

Unggas berupa Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik. Salah satu ternak unggulan di Kabupaten Pangandaran yang paling berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah Domba, Kambing, Sapi, Ayam Buras, Ayam Pedaging dan ayam petelur. Berikut diuraikan data jumlah ternak berdasarkan kelas jenis ternak.

Tabel. 1.22
Potensi Bidang Peternakan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2013 -2017

No	Populasi (Ekor)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	20.058	25.490	26.763	15.376	16.587
3	Kuda	91	106	101	151	164
5	Kerbau	1.763	1.259	1.288	1.018	1.009
6	Domba	61.802	80.970	83.804	35.585	36.535
7	Kambing	37.809	10.029	10.269	16.507	16.530
9	Ayam Buras	1.449.741	1.153.223	1.176.298	751.974	534.542
10	Ayam petelur	79.350	70.594	73.276	137.521	145.885
11	Ayam Pedaging	96.462	56.088	59.060	239.419	243.876
12	Itik	52.282	15.324	16.121	52.745	53.464
No	Produksi Daging (Kg)	2013	2014	2015	2016	2017
1	Daging Sapi Lokal	825.652	560.682	531.074	516.052	600.478
2	Daging Kerbau	25.475	21.618	22.450	2.116	2.494
3	Daging Domba	208.532	172.825	119.641	118.855	86.607
4	Daging Kambing	140.266	9.472	6.525	14.152	14.940
5	Daging Ayam Buras	1.614.937	2.067.536	1.088.887	772.230	824.40
6	Daging Ayam petelur	7.421	37.788	673.524	128.068	78.089
7	Daging Ayam Pedaging	511.126	270.227	284.551	1.883.270	1.174.495
8	Daging Itik	88.186	9.598	10.097	41.183	39.650
No	Produksi Telur (Kg)	2013	2014	2015	2016	2017
1	Telur ayam Buras	3.379.492	707.259	721.405	461.174	571.000
2	Telur Ayam Petelur	2.227.033	648.882	673.524	1.264.039	1.340.918
3	Telur itik	2.380.081	100.192	105.403	344.861	352.460

Sumber :Dinas Pertanian Kab. Pangandaran Tahun 2017

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa potensi peternakan di Kabupaten Pangandaran yang patut untuk dikembangkan adalah ternak Sapi, Domba, Kambing dan ayam pedaging karena populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun walaupun untu jenis ternak ayam baik ayam buras maupun ayam pedaging dalam pengembangannya sangat riskan terhadap serangan penyakit ND atau tetelo.

7. Komoditas Perkebunan

- Perkebunan Besar Negara/Swasta tercatat seluas 4.324,35 ha, yang pengelolaannya oleh PTPN Batulawang.
- Perkebunan Rakyat, merupakan lahan masyarakat yang ditanami atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan. Komoditi yang dikembangkan didominasi oleh komoditi kelapa seluas 27.561,36 ha dengan produksi sebanyak 125.610.299 ton, Cengkeh seluas 2.079,02 ha dengan produksi sebanyak 81,80 ton, kakao seluas 1.068,80 ha dengan

produksi sebanyak 209,01 ton, Karet seluas 777,90 ha dengan jumlah produksi sebanyak 333,30 ton, pala seluas 1.103,27 ha dengan produksi 10,03 ton dan kopi seluas 599,33 dengan total produyksi sebanyak 303,02 ton. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pangandaran sangat potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan terutama komoditas-komoditas unggulan daerah.

8. Perikanan dan Kelautan

Walaupun Kabupaten Pangandaran mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 91 km, lahan laut yang cukup luas dan kekayaan ikan laut yang berlimpah tetapi masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak tergantung kepada alam, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak melupakan potensi budidaya perikanan. Masyarakat Pangandaran menggali potensi air payau dengan membangun tambak-tambak ikan. Potensi perikanan air tawar tetap dilakukan dengan mengusahakan budidaya ikan air tawar yang bahkan memiliki luas sangat besar jika dibandingkan dengan usaha perikanan tambak.

Produksi ikan tangkapan hasil nelayan di laut sangat tergantung kepada kondisi alam dan cuaca sehingga produksi ikan mengalami siklus musiman bukan hanya disebabkan kemampuan nelayan untuk melaut faktor gangguan cuaca seperti badai dan gelombang pasang yang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan para nelayan untuk beraktivitas ke laut dan akan berdampak pada hasil tangkapan ikan (produksi). Berdasarkan data pada tabel dibawah, produksi ikan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Tabel 1.23
Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 – 2017

No	Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton)	
		2016	2017
1	Ikan Budidaya	438,92	233,10
	- Budidaya Air Tawar	438,92	110,79
	- Budidaya Air Payau		120,18
	- Budidaya Air Laut		2,13
2	Ikan Tangkap	1.049,50	2.830,53
	Jumlah	1.488,42	3.063,63

Sumber Dinas KPKP Kabupaten Pangandaran, 2017

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa produksi ikan budidaya produksinya mengalami penurunan sedangkan produksi ikan tangngkap mengalami peningkatan dua kali lipat dari produksi tahun sebelumnya.

Penyediaansarana dan prasarana perikananbudidaya baru memiliki Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kecamatan Cimerak sedangkan sarana perikanan tangkap hasil laut yang berada di Kabupaten Pangandaran meliputi :

- a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi.

- b. TPI Pangandaran berada di Kecamatan Pangandaran
- c. TPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang
- d. TPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak
- e. TPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak
- f. TPI Bagolo berada di Kecamatan Kalipucang
- g. TPI Ciawitali berada di Kecamatan Kalipucang
- h. TPI Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang
- i. TPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang
- j. TPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak
- k. Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) milik masyarakat.
- l. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang
- m. PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi.

a) Potensi Kehutanan

Walaupun dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab atau kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat, namun Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi lahan kawasan hutan yang cukup luas, dari luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pangandaran seluas 51.619,39 Ha yang terdiri dari :

- Luas kawasan Hutan Negara meliputi areal seluas 17.019,59 Ha terdiri dari Hutan Produksi Terbatas 7.997,46 Ha, Hutan produksi 8.527,43 Ha yang dikelola Perum Perhutani KPH Ciamis, hutan Konservasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Pananjung Pangandaran yang dikelola Balai Besar BKSDA-Jawa Barat seluas 494,70 Ha.
- Hutan Rakyat seluas 34.289,80 Ha yang tersebar di 10 Kecamatan dengan potensi kayu sebesar 59.646,50 m³ dengan lebih kurang 5.964,65 M³/Kecamatan. Dengan demikian populasi tegakan pada lahan milik yang biasa disebut Hutan Rakyat menjadi sumber utama penghasil kayu khususnya albasia dan mahoni (rimba) untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku yang dewasa ini semakin besar.
- Hutan Pantai Mangrove dengan luas kurang 310 Ha di Kabupaten Pangandaran tersebar di 6 (enam) Kecamatan pesisir pantai merupakan kawasan andalan Pangandaran yakni kawasan Pang andaran dengan kegiatan pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan.

Selain kawasan hutan tersebut, Kabupaten Pangandaran mempunyai lahan milik masyarakat yang cukup luas dan layak untuk ditanami tanaman

kayu-kayuan. Populasi (tegakan) tanaman kayu-kayuan pada lahan milik masyarakat yang biasa disebut dengan “Hutan Rakyat” diharapkan menjadi sumber utama penghasil kayu yang berkelanjutan, mengingat Hutan Negara yang mempunyai fungsi produksi sudah semakin terbatas untuk dapat

mensuplai kebutuhan hasil hutan berupa kayu. Kebijakan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dalam bentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

b) Potensi Industri

Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, yang diarahkan untuk pengembangan agroindustri, yaitu mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sektor pertanian, kelautan dan kehutanan.

Peningkatan jumlah usaha industri tersebut masih didominasi oleh industri skala rumah tangga berupa olahan bahan makan, kerajinan dan aneka bahan bangunan serta konveksi. Dukungan Pemerintah terhadap pengrajin berupa bantuan mesin dan penguasaan teknologi serta pembinaan keterampilan pengrajin berupa diklat-diklat teknologi produksi, sehingga memberi dampak pada peningkatan kapasitas industri serta peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terampil. Namun sejauh ini industri yang ada baru sebatas industri kecil.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi antara lain melakukan pelatihan bimbingan dan penyuluhan pada kelompok-kelompok industri baik industri agro maupun non agro misalnya: dalam pengemasan produk, pembinaan GMP (*Good Manufacturing Practise*), memberikan bantuan peralatan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

c) Potensi Perdagangan

Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor didominasi oleh produk komoditas pertanian dan perkebunan sebagai mana pada tabel 1. 29 dibawah ini.

Tabel 1.24
Data Komoditas Ekspor Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No (1)	Komoditas (2)	Volume (3)	Negara Tujuan (4)	Ket. (5)
1.	Coconut Powder	220.515 Kg	Brazil, Papua New Guine, Germany, France, Rusia, Australia, China, Italy, Canada, Thailand, Hongkong, USA, Ukraine, Korea, Singapore dan Turkey	
2.	Desiccated Coconut	646.650 Kg		
3.	Coconut Cream	1.668.891 Kg		
4.	Coconut Water	1.215.932 Kg		
5.	Udang	10.000 Kg	Jepang	

Sumber : DPMP TSPKUMKM dan Perdagangan

Ditopang oleh Sarana Perdagangan berupa pasar tradisional dan pasar Desa serta mini market/toserba yang ada di tiap Kecamatan

Di tengah pelaksanaan otonomi daerah dan menyongsong diberlakukannya ACFTA (*Asean China Free Trade Area*), Kabupaten Pangandaran menghadapi berbagai masalah yang harus segera ditangani baik

dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Permasalahan yang masih nampak menonjol antara lain sistem perdagangan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari pola aliran barang dari Kabupaten Pangandaran masih berkisar di seputar lokal, Jawa Barat dan luar Jawa Barat;

d) Potensi Koperasi

Koperasi saat ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran dan apabila dilihat dari kegiatan usahanya maka koperasi telah menyentuh seluruh bidang perekonomian di masyarakat, namun demikian harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan koperasi. Pada tahun 2017, jumlah koperasi berkembang sebesar 1,98% yakni dari 199 unit pada tahun 2016 menjadi 203 unit pada tahun 2017.

Sedangkan jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 11,36 % yaitu dari 9.195 orang pada tahun 2016 menjadi 8.257 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah modal usaha mengalami kenaikan sebesar 55,42% dari jumlah modal usaha sebesar Rp. 41.469.763.347,11 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 93.018.010.552,00 pada tahun 2017. Dari jumlah koperasi yang ada yaitu sebanyak 203 buah koperasi, namun yang benar-benar masih aktif hanya sebanyak 62 koperasi. Dan sebanyak 133 koperasi yang sudah tidak aktif diajukan untuk dibubarkan. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi menjadi turun dari Rp 1.355.009.102 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.109.234.479 pada tahun 2017 dikarenakan banyaknya koperasi yang kurang aktif.

Pemberdayaan Koperasi memerlukan kepekaan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, Lembaga Koperasi dan merumuskan kebijakan secara terintegrasi dan akuntabel yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat dan Lembaga Koperasi. Permasalahan yang masih nampak dalam pengelolaan Koperasi antara lain :

- Masih rendahnya SDM pengelola Koperasi;
- Sulitnya untuk mengakses permodalan dari pihak lembaga keuangan;
- Belum adanya regulasi peraturan yang melindungi terhadap usaha-usaha yang telah berhasil dikelola oleh Koperasi misalnya di bidang pertanian;
- Kelembagaan Koperasi yang masih bersifat konvensional;
- Akses pemasaran yang belum berdaya saing;
- Rendahnya jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat.

e) Potensi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten

Pangandaran. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja antara lain:

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;
- Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi UMKM;
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha, dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk lebih mengembangkan usahanya adalah:

- Kurangnya wawasan tentang manajemen usaha kecil;
- Kurangnya informasi peluang pasar;
- Kurangnya wawasan untuk mengakses permodalan.

Sejauh ini UMKM yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 masih tetap sebanyak 2.417 unit belum mengalami penambahan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.417 unit, kegiatan UMKM yang ada bergerak pada komoditas gula merah dan perdagangan.

f) Potensi Pasar

Pasar tradisional yang menjadi kewenangan pembinaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 3 buah Pasar dan di tingkat operasional tugas Kepala Dinas dibantu pelaksanaannya oleh Kepala Pasar yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalipucang, Pangandaran dan Parigi. Pasar tradisional memiliki peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Jumlah pedagang di pasar tradisional pada tahun 2017 mencapai 1.431 orang. Sarana dan prasarana di pasar tradisional sudah banyak yang rusak dan kurang layak sehingga banyak yang ditinggalkan oleh pedagang. Jumlah kios di pasar tradisional pada tahun 2017 mencapai 2.857 kios dan los, namun dari jumlah tersebut ada sebagian los yang sudah tidak difungsikan oleh pemiliknya. Disamping pasar tradisional yang di kerlola pemerintah daerah terdapat juga pasar Desa sebanyak 23 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.163 orang pedagang dan terdiri dari 2.670 kios/los.

Selain pedagang di pasar tradisional dan pasar Desa, terdapat juga pedagang informal yang menggelar usahanya di tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL), adapun jumlah PKL yang sudah terdata sebanyak 1.486 pedagang. Sedangkan pedagang kaki lima yang sudah ditertibkan baru di dua lokasi. Dalam kaitannya dengan penataan PKL, pelaksanaan relokasi PKL dihadapkan pada kendala kesulitan dalam proses penertibannya, terutama dari jumlah PKL yang begitu banyak sedangkan lokasi yang tersedia masih terbatas. Pada tahun 2017 pemerintah daerah telah merelokasi para PKL di dua tempat yaitu yang ada didepan pasar Pananjung sebanyak 104 PKL direlokasi ke kios yang ada disamping pasar Pananjung, dan para PKL yang berada di pantai barat dan pantai timur obyek wisata Pangandaran sebanyak 1.364 PKL yang ditempatkan di 4 (empat) lokasi, yaitu Nanjung Elok sebanyak 92 Kios, Nanjung Asri 252 Kios, Nanjung Endah sebanyak 188 Kios dan Nanjung Sari 832 Kios.

g) Potensi Sarana Prasarana

Dinamika perekonomian mendorong pada peningkatan mobilitas penduduk dan barang antar daerah, Oleh karena itu sarana dan prasarana yang ada di wilayah sangatlah penting untuk menunjang dan mendorong kemajuan perekonomian, sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana transportasi seperti jalan, kendaraan dan penunjang angkutan serta didukung oleh sarana komunikasi seperti pos dan telekomunikasi untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomian. Prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

a) Prasarana Transportasi

1. Jalan

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi yang memiliki peran sangat penting khususnya untuk sarana transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat disamping angkutan yang ada di Kabupaten Pangandaran terdapat jalan yang cukup panjang walaupun menurut status/kelas jalan yang ada panjangnya berbeda-beda. Sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dan janji kepala daerah terpilih bahwa infrastrur jalan merupakan prioritas yang paling utama disamping kegiatan lain yang harus diselesaikan selama kurun waktu RPJMD 2016-2021. Kondisi jalan yang ada saat ini baik jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2017 yaitu;

Tabel 1.25
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2017

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kriteria Jalan (Km)			
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
I.	Tahun 2016					
	Jalan Nasional	94,25	57,41	4,20	14,44	18,20
	Jalan Provinsi	8,89	2,05	0,50	6,34	-

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kriteria Jalan (Km)			
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Jalan Kabupaten	500,24	97,83	62,13	101,16	239,12
II.	Tahun 2017					
	Jalan Nasional	94,25	75,62	18,63	-	-
	Jalan Provinsi	8,89	2,05	0,50	6,34	-
	Jalan Kabupaten	500,24	181,00	57,71	78,06	183,47

Sumber, DISPUTARKIM Kab. Pangandaran, 2017

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2017 kondisi jalan Nasional sepanjang 94,25 km, yang kondisinya baik sepanjang 75,62 km, dan sisanya dalam kondisi rusak sedang yaitu sepanjang 18,63 km. Kondisi jalan Provinsi yang ada saat ini di Kabupaten Pangandaran sepanjang 8,89 km, dalam kondisi baik sepanjang 2,05 km, kondisi sedang yaitu sepanjang 0,50 km, sisanya sepanjang 6,34 Km dalam keadaan rusak ringan dan berat. Sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 500,24 km, berdasarkan kondisi jalan yang baik sepanjang 181,00 km, dan jalan yang kondisinya sedang sepanjang 57,71 km, sisanya dalam kondisi rusak ringan dan berat sepanjang 78,06 Km dan rusak berat sepanjang 183,47 Km.

Ruas jalan terpanjang untuk jalan Kabupaten adalah pada ruas jalan di Kecamatan Langkaplancar yang mencapai 79,78 Km. Sedangkan ruas jalan terpendek untuk jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang berada di Kecamatan Mangunjaya hanya mencapai 13,41 Km. pada tahun 2017 baik jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang kondisinya baik sudah semakin bertambah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah yaitu peningkatan kualitas infrastruktur.

Sarana pendukung transportasi darat dan ASDP di Kabupaten Pangandaran meliputi kondisi jalan, terminal, angkutan sungai dan angkutan udara. Kabupaten Pangandaran memiliki jalan yang cukup banyak ruas jalan dan dapat menghubungkan antar Kecamatan dan Desa. Ruas jalan yang ada dapat dijadikan sebagai pembentuk struktur ruang Kabupaten Pangandaran tanpa harus membangun jalan baru. Kendala yang dihadapi adalah dimensi jalan yang relatif kecil, serta banyaknya ruas jalan yang berkategori rusak, diantaranya beberapa ruas jalan alternatif antara Kecamatan dan beberapa ruas jalan dikawasan perbatasan.

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh ruas jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten, ruas jalan Nasional yang ada di Kabupaten Pangandaran melewati Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran, Kalipucang dan Padaherang. Ruas-ruas jalan tersebut berfungsi ganda, yaitu sebagai jalan antar provinsi (*regional*) sekaligus sebagai jalan utama antar Kecamatan (lokal).

2. Jasa Penunjang Angkutan

Berdasarkan data pada Tahun 2017, di Kabupaten Pangandaran jumlah angkutan umum meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu dari jumlah total 2.418 kendaraan menjadi 2.496 kendaraan di Tahun 2017. Sedangkan peningkatan dari tahun 2016 dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 78 Unit. Seperti halnya kendaraan Truk yang semula berjumlah 614 unit di tahun 2016 menjadi 707 unit pada tahun 2017, meningkat sekitar 13,15%.

Tabel 1.26
Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015 – 2017

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2015	2016	2017
Angkutan Kota	-	14	14
Angkutan PeDesaan	66	14	14
Otolet/Mobil Penumpang	-	-	-
Otobis	11	6	6
Micro Bus	10	16	16
Mini Bus	26	24	21
Truck	663	614	707
Pick Up	1.316	1.656	1.639
Box	62	74	77
Tanki	-	-	2
Kereta Gandengan/Truk	-	-	-
Kendaraan Sewa	-	-	-
Jumlah	2.156	2.418	2.496

Sumber: DISHUB Kab. Pangandaran, 2017

3. Pelabuhan

Di Kabupaten Pangandaran terdapat juga sungai besar, sehingga diperlukan angkutan untuk penyebrangan sungai. Jenis transportasi sungai yang terdapat di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

- 1) Dermaga angkutan penyebrangan penumpang dan barang di Kalipucang (Dermaga Santolo)
- 2) Dermaga angkutan penyebrangan penumpang dan barang di Kalipucang (Dermaga Majingklak)
- 3) Kedua dermaga tersebut diatas melayani pergerakan yang menghubungkan Kalipucang dengan Kota Cilacap (Jawa Tengah)
- 4) Dermaga Santolo melayani rute angkutan pariwisata, selain melayani pelayanan komersial. Pendangkalan sungai Citanduy yang terjadi berimplikasi tidak dapat berfungsinya Dermaga Santolo secara Optimal.
- 5) Dermaga Bojongsalawe, yang sampai dengan tahun 2017 pembangunannya baru mencapai 25 %, namun kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

4. Bandar Udara

Selain sarana transportasi darat, dan sungai terdapat juga jaringan transportasi udara berupa Bandar udara. Bandar udara yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu Bandar udara Nusawiru yang berada di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.27
Kondisi Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Pangandaran

No	Item	Eksisting	Tahap Pengembangan	
			Tahap I 2011-2025	Tahap II 2026-2036
1	Pesawat Terbesar	Cessna C208B	ATR-42/F-50	B - 737
2	Rute Terjauh	Nusawiru – Jakarta	Nusawiru - Jakarta	Nusawiru - Jakarta
3	Aerodrome Refence Kode	1A	2C	4C
4	Kategori Operasional Runway Operasi Runway 07 – 25	Non Instrument	Instrument Non Precisi	
5	Dimensi Runway Operasi Runway 07 – 25	(1400 x 30) M ²	(1400 x 30) M ²	(1850 x 35) M ²
6	Dimensi Runway Strip Operasi Ranway 07 – 25	(1520 x 150) M ²	(1640 x 150) M ²	(2000 x 150) M ²
7	STOPWAY Runway 07 Runway 25	(60 x 30) M ² (60 x 30) M ²	(60 x 30) M ² (60 x 30) M ²	(60 x 45) M ² (60 x 45) M ²
8	RESA Runway 07 Runway 25	(90 x 60) M ² (90 x 60) M ²	(90 x 30) M ² (90 x 30) M ²	(90 x 60) M ² (90 x 60) M ²
9	Turning Pad Runway 07 Runway 25	(50/100 x 20) M ² (50/100 x 20) M ²	(50/100 x 20) M ² (50/100 x 20) M ²	(50/100 x 20) M ² (50/100 x 20) M ²
10	TORA Runway 07/25	1400 M	1400 M	1850 M
11	LDA Runway 07/25	1400 M	1400 M	1850 M
12	ASDA Runway 07/25	1460 M	1460 M	1910 M
13	TODA Runway 07/25	1610 M	1610 M	2060 M
14	Taxiway Perpendicularor Dimensi A Dimensi B	(100 x 23) M ² -	(90 x 23) M ² -	(90 x 23) M ² (90 x 23) M ²
15	Apron Klasifikasi Pesawat : Pesawat regular Sejenis C208B Sejenis ATR 42 Total Stands Total Dimensi Apron	3 0 3 (150 x 60) M ²	3 0 3 -	3 0 3 (150 x 80) M ²
	Pesawat Latih Jenis Pesawat: Single Engine Multi Engine Jet Total Stands Total Dimensi Apron	- - - - -	2 2 2 9 (170 x 80) M ²	4 4 2 10 (170 x 80) M ²
	Pesawat Perawatan (Lahan) Jenis Pesawat: Sejenis 8 – 737 Total Stands Total Dimensi Apron	- - -	- - -	3 3 (233,5 x 115) M ²
16	Alat Bantu Pendaratan Runway 07 Runway 25	MARKA MARKA	PAPI, MARKA PAPI, MARKA SIRINE	PA, MARKA PAPI, MARKA SIRINE SIGNAL GUN, RWY LIGHT
17	Fasilitas Komunikasi Pendaratan	SSB, VHF A/G	SSB, VHF A/G PABX	SSB, VHF A/G, TRANCIVER PABX, DS, VSAT, ATN
18	Fasilitas PLLU	AFIS	ADC	ADC
19	Alat Bantu Navigasi Udara	NDB	NDB	NDB, DVOR
20	Kategori PKP - PK	Category I	Category IV	Category VI

Sumber: Masterplant Bandara Nusawiru, 2017

b) Prasarana Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Area Tasikmalaya, bahwa Prasarana Listrik telah menjangkau seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan jumlah Kwh yang terjual selama Tahun 2017 sebanyak 103.371 pelanggan dengan kategori sebagai berikut :

- Jumlah Pelanggan Tarif Rumah Tangga sebanyak 93.626 pelanggan;
- Jumlah Pelanggan Tarif Bisnis sebanyak 7.117 pelanggan;
- Jumlah Pelanggan Tarif Sosial sebanyak 2.757 pelanggan;
- Jumlah Pelanggan Tarif Instansi Pemerintah sebanyak 178 pelanggan;
- Jumlah Pelanggan Tarif Industri sebanyak 30 pelanggan;
- Jumlah Penerangan Jalan Umum sebanyak 1.256 unit.

Dari jumlah tersebut masih didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebanyak 93.626 pelanggan. Hal tersebut dapat menggambarkan jangkauan listrik dari PT. PLN (Persero) telah sampai ke pelosok Desa.

c) Prasarana Irigasi

Prasarana irigasi berdasarkan pengelolaannya terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya :

- Irigasi Teknis	:	4.855	Ha
- Irigasi ½ Teknis	:	1.172,20	Ha
- Irigasi Sederhana/Desa PU	:	1.063	Ha
- Irigasi Sederhana/Desa Non PU	:	2.095	Ha
- Tadah Hujan	:	6.615,90	Ha
- Lebak	:	606,90	Ha
- Pasang Surut	:	18	Ha

Dari data tersebut diatas menggambarkan Kabupaten Pangandaran harus bisa mempertahankan lokasi irigasi teknis karena sebagai lumbung pangannya daerah.

d) Potensi Sektor Pariwisata

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu tujuan utama destinasi wisata di Indonesia, hal ini termaktub dalam PP No. 50 Tahun 2011 RIPPARNAS 2010 - 2025 yang menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembangunan kepariwisataan memerlukan landasan yang kokoh antara lain kebijakan strategis untuk dapat menciptakan partisipasi aktif seluruh lapisan guna memanfaatkan aktivitas pembangunan kepariwisataan secara luas untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan,

meningkatkan pendapatan daerah, dan mempertahankan budaya, yang melibatkan seluruh *stakeholders*-nya dalam suatu sinergi. Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan kepariwisataan nasional maupun pada tingkat destinasi adalah sinergi antar *stakeholders* pariwisata dalam merumuskan arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Hal yang sering terjadi adalah dalam penetapan rencana pengembangan pariwisata umumnya kurang terjadi suatu koordinasi antar *stakeholders* dalam hal ini bahwa pengembangan dan perencanaan pariwisata dapat dikatakan kurang optimal mengingat bahwa kegiatan pariwisata adalah kegiatan multidisiplin dan multisektoral. Menurut penelitian Bill Fualkner, Griffith University yang mengatakan bahwa “*effective involvement & coordination all of stakeholder who have a role of play in tourism development and/or potentially affected by such development*”. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kurang terjadinya sinergi antar *stakeholders* dalam menyusun rencana serta pengelolaan pariwisata yang mengakibatkan pengembangan kepariwisataan kurang optimal. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran sebagai suatu destinasi wisata unggulan, dalam proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak yang terkait satu dengan lainnya. Dengan kata lain diperlukan koordinasi yang tinggi antara SKPD yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya yang menangani bidang kepariwisataan dengan pembina kepariwisataan di tingkat Kabupaten maupun dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pembangunan kepariwisataan di wilayah ini. Masih terbatasnya kinerja kepariwisataan Kabupaten Pangandaran seperti kualitas produk wisata yang sebagian besar masih belum bersifat *customize* atau *market oriented*, lemahnya kemampuan pengelolaan, serta tingkat pertambahan investasi yang belum optimal, memperlihatkan bahwa penetapan pariwisata sebagai sektor prioritas dan andalan pembangunan di Kabupaten Pangandaran belum dapat diwujudkan secara optimal pula, dimana pembangunan kepariwisataan telah dipilih oleh banyak negara sebagai salah satu generator perekonomian.

Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa dalam proses pembangunan pariwisata daerah kurangnya *stakeholders* yang terlibat didalamnya. Penetapan sektor pariwisata sebagai sektor andalan seharusnya didukung oleh tindakan-tindakan kolektif pembangunan yang mampu menciptakan sinergi para pelakunya guna diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Meskipun Kabupaten Pangandaran memiliki daerah pesisir yang cukup panjang sekitar $\pm$ 91 km dengan potensi wisata alam pantainya, Kabupaten Pangandaran memiliki juga potensi wisata alam lainnya, yaitu wisata cagar alam, wisata rawa, wisata goa, wisata hutan dan wisata sungai. Jenis potensi

wisata lainnya yang dimiliki adalah wisata budaya dan wisata buatan/minat khusus.

Gambar di bawah ini memperlihatkan sebaran titik-titik tempat wisata di Kabupaten Pangandaran, terlihat bahwa mayoritas jenis wisata yang ada merupakan wisata alam yang tersebar di seluruh Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Maka pemerintah daerah secara terus menerus menata desinasi wisata yang ada baik destinasi yang sudah ada maupun yang baru.

Gambar 1.8
Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata
Kabupaten Pangandaran



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RIPP Kab. Pangandaran, 2017

Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dibagi kedalam tiga kategori:

- Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang memperlihatkan kekhasan lokal dari kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah Batu kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang.
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang merupakan obyek wisata berbasis pantai dan cagar alam yang diantaranya adalah Karang Nini, Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung, Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari dan Keusik Luhur.
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang merupakan objek wisata yang dibuat secara khusus untuk menunjang minat-mnat tertentu yang diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh / Green Canyon dan Curug Jambe serta Cagar Alam Pananjung.

Sebaran daya tarik wisata pada masing-masing Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 1.28
Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya Tarik Wisata
Kabupaten Pangandaran

No	Kawasan Pariwisata Kabupaten Pangandaran	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
I	Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Sekitarnya	1) Kawasan Wisata Pantai Pangandaran dan Sekitarnya	1) Pantai Barat Pangandaran 2) Pantai Timur Pangandaran 3) Kawasan Taman Wisata Alam Pananjung 4) Kawasan Mangrove Bulak Setra 5) Kawasan Pantai Cikembulan	1) Desa Wisata Babakan	
		2) Kawasan Wisata Curug Bojong dan Sekitarnya	1) Air Terjun (Curug) Bojong 2) Air Terjun (Curug) Jambe Enum 3) Sungai Pingit 4) Gua Bojong Lekor 5) Gua Badak Paeh		
		3) Kawasan Wisata Karang Tirta-Cikalong dan Sekitarnya	1) Pantai Karang Tirta 2) Air Terjun (Curug) Pule 3) Air Terjun (Curug) Luhur 4) Gua Macan 5) Gua Sodong Panjang	1) Desa Wisata Cikalong	
		4) Kawasan Wisata Pantai Batu Hiu-Citumang-Santirah dan Sekitarnya	1) Pantai Batu Hiu 2) Gua Lanang 3) Gua Regregan 4) Sungai Citumang 5) Gua Jogjogan 6) Gua Sienjang Lawang 7) Sungai Ciwayang 8) Air Terjun Curug Tonjong	1) Desa Wisata Selasari (Santirah)	1) Penangkaran Penyu Batu Hiu
		5) Kawasan Margacinta dan Sekitarnya	1) Sungai Cijulang 2) Gua Muara Bengang 3) Kawasan Mangrove Margacinta	1) Kampung Seni Badud 2) Padepokan Seni Sunda Jenggala Manik 3) Saung Angklung Mang Koko	1) Sirkuit Motorcross Metro Jaya 2) Agrowisata Margacinta
		6) Kawasan Cukang Taneuh-Pondok Patra dan Sekitarnya	1) Green Canyon (Cukang Taneuh) 2) Green Coral (Curug Taringgul) 3) Pemandian Mata Air Cikalungkung 4) Sungai Muara Cibodas 5) Gua Patra 6) Pemandian Mata Air Sodong Gebos 7) Gua Kolor 8) Gua Bagong		1) Agrowisata Pondok Patra
		7) Kawasan Pantai Batukaras dan Sekitarnya	1) Pantai Batukaras 2) Hutan Mangrove Batukaras 3) Danau Situ Cisamping		

No	Kawasan Pariwisata Kabupaten Pangandaran	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
II	Kawasan Pembangunan Pariwisata Kalipucang-Mangunjaya dan Sekitarnya	1) Kawasan Karang Nini-Majingklak dan Sekitarnya	1) Pantai Karang Nini 2) Pantai Lembah Putri 3) Pantai Karapyak 4) Pantai Solok Timun 5) Pantai Palatar Agung 6) Kawasan Muara dan Mangrove Pantai Majingklak	1) Terowongan Wihelmina	
		2) Kawasan Sungai Jogjogan-Kedung Wuluh dan Sekitarnya	1) Sungai Jogjogan 2) Gua Cipalungpung 3) Air Terjun Curug Bunton 4) Curug Leutik Tonjong 5) Mata Air Panas Pemandian Kedung Wuluh	1) Makam Syech Muchtar 2) Situs Gedeng Mataram 3) Situs Jagapati 4) Situs Dayang Sumbi 5) Situs Lingga Kencana 6) Situs Astana Budha 7) Makam Eyang K.H Santarudin 8) Makam Mbah Layung Mangkunagara 9) Makam Syech Abdullah Ciayam 10) Situs Batu Majapahit 11) Tugu Pangeling-Eling	1) Home Industri Jus Honje 2) Agrowisata Kaliki Permai
III	Kawasan Pembangunan Pariwisata Langkaplancar-Cigugur dan Sekitarnya	1) Kawasan Gunung Singkup-Parang dan Sekitarnya	1) Gunung Singkup 2) Gunung Parang 3) Air Terjun Curug Bilik	1) Patilasan Syech Abdul Hamid	
		2) Kawasan Pasir Bentang-Cipatahunan dan Sekitarnya	1) Panorama Pasir Bentang 2) Sungai Muara Cijalu 3) Hutan Gunung Haur 4) Sungai Leuwi Kerti 5) Air Terjun Curug Leuwi Leutak 6) Air Terjun Curug Dendeng 7) Hutan Pagar Bumi		
IV	Kawasan Pembangunan Pariwisata Cimerak dan Sekitarnya	1) Kawasan Pantai Madasari dan Sekitarnya	1) Pantai Madasari 2) Pantai Legok Jawa 3) Gua Cirawun		1) Danau D'J 2) Pacuan Kuda Madasari
		2) Kawasan Pantai Ciparanti-Keusik Luhur dan Sekitarnya	1) Pantai Ciparanti 2) Pantai Cikaracak 3) Pantai Muara Gatah 4) Pantai Keusik Luhur 5) Air Terjun Curug Sawyer		

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Pangandaran, 2015

Aktivitas wisata yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran cukup beragam, dimana diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti Nyuguh, Hajat Bumi, Upacara Adat, Gelar Budaya Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat Laut, Ronggeng Gunung dan Kontes Burung Berkicau.

Untuk menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak memasuki wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada Tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran terdapat 311 hotel, diantaranya Hotel bintang ada 2 buah, Hotel Melati 309 buah dengan jumlah kamar sekitar 4.934 buah kamar. Namun ketersediaan sarana dan akomodasi ini masih banyak berpusat di Kecamatan Pangandaran yang memang sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan mancanegara.

Dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah yang lebih merata, peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cukup penting, mengingat panjangnya mata rantai kegiatan usaha kepariwisataan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi: biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran pemandu wisata/pramuwisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata. Rantai kegiatan pariwisata ini jelas akan membutuhkan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan cinderamata, bahan dan alat bangunan. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya atau dengan kata lain sektor ini mempunyai imbas secara multisektoral. Potensi usaha pariwisata seperti usaha sarana, usaha jasa dan usaha obyek dan daya tarik wisata mengalami pertumbuhan yang cukup berarti.

Salah satu keberhasilan yang dinilai adalah peningkatan jumlah wisatawan, target jumlah pegeinjung pada tahun 2017 yaitu 3.440.06 orang terealisasi sebanyak 2.916.141 orang terdiri dari Wisman sebanyak 10.332 orang dan Wisnus sebanyak 2.905.809 orang baru tercapat sekitar 84,83%. Dari jumlah kunjungan wisatawan dan lamanya tinggal di wilayah Kabupaten pangandaran akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata dari retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sebesar Rp.17.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.598.742.005,00 atau sekitar 85,87 % dari target.

b) Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi/PDRB mengalami perubahan Tahun Dasar yang dilatarbelakangi oleh pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir menggunakan *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka *Supply and Use Tables* (SUT) untuk menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDRB. Implikasi dari perubahan ini berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari rendah, menjadi menengah, atau tinggi, serta mengubah

indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar dengan beberapa pertimbangan bahwa sejak tahun bersangkutan perekonomian Indonesia relatif stabil, kemudian terjadi perubahan struktur selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi. Selain itu tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (IHP)/ *Producer Price Index* (PPI). Komponen pembentuk PDRB Tahun Dasar 2010 menjadi 17 kategori terdiri dari kategori 1). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2). Pertambangan dan Penggalian; 3). Industri Pengolahan; 4). Pengadaan Listrik dan Gas; 5). Pengadaan Air; 6). Konstruksi; 7). Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8). Transportasi dan Pergudangan; 9). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10). Informasi dan Komunikasi; 11). Jasa Keuangan; 12). Real Estate; 13). Jasa Perusahaan; 14). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15). Jasa Pendidikan; 16). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17). Jasa Lainnya.

Adapun *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDB.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 yang diukur atas dasar harga berlaku berdasarkan pengolahan *benchmark* data, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 560 Milyar atau 6,37% dari Rp. 8,78 trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp.9,34 trilyun pada tahun 2017(angka sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Pangandaran. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Pangandaran, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 -2017 juga menunjukkan angka peningkatan walaupun relative sedikit. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp. 6,52 Trilyun atau meningkat sebesar Rp. 272,12 Milyar atau sekitar 4,17% dari tahun 2017 sebesar Rp. 6,80 Trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi

quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Pangandaran secara makro berkembang positif selama periode tiga tahun terakhir.

Sampai dengan tahun 2017, sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2017 sektor pertanian memberikan sumbangan nilai tambah mencapai sebesar Rp. 2,42 Trilyun yang dihitung atas dasar harga berlaku. Apabila dibandingkan dengan realisasi PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2,37 Trilyun terjadi peningkatan sebesar Rp. 49,45 Milyar atau 2,04 %. Sedangkan PDRB sektor pertanian apabila dihitung atas dasar harga konstan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1,58 Trilyun, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 24,58 Milyar dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1,61 Trilyun atau sekitar 1,55 %.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila dibandingkan dengan sektor lainnya terutama Perdagangan besar dan eceran, revarasi mobil dan sepeda motor, sehingga tidaklah mengherankan jika suatu wilayah/daerah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhannya sangat lamban. Kendati demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, sektor pertanian merupakan penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan, diikuti oleh sub sektor lainnya, yaitu subsektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Namun apabila ditelaah lebih dalam, pada tahun 2013-2017, kontribusi nilai tambah dari sektor pertanian cenderung semakin menurun, kendati terjadi penurunan relative sedikit. Kondisi tersebut dapat disebabkan adanya peningkatan nilai tambah dari sektor lainnya terjadi secara lebih cepat. Pada sisi lain, saat ini luas lahan pertanian cenderung terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping sektor pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan adalah sektor perdagangan, besar dan eceran, revarasi mobil dan sepeda motor, dimana pada tahun 2017 sektor perdagangan, besar dan eceran, revarasi mobil dan sepeda motor mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1,95 Trilyun mengalami peningkatan sebesar Rp. 110,41 Milyar dari tahun 2016 sebesar Rp. 1,84 Trilyun setara dengan 5,65 %.

Sementara jika dihitung atas dasar harga konstan, sektor perdagangan, besar dan eceran, revarasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2017 mencapai Rp. 1,54 Trilyun atau meningkat 3,54% dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1,49 Trilyun.

Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Pangandaran. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan, besar dan eceran, revarasi mobil dan sepeda motor yang diikuti peranan sektor transportasi dan pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada dasarnya, ketiga sektor tersebut, di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi untuk dikembangkan, karena banyak lokasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, bahkan sampai skala internasional. Namun dalam pengembangannya saat ini masih mengalami beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan sarana infrastruktur serta masih minimnya dukungan dari investor lokal maupun internasional dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Pangandaran.

Pada sisi lain, sektor industri yang merupakan sektor andalan provinsi Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2013 – 2017 masih belum menunjukkan angka kenaikan yang berarti, karena di Kabupaten Pangandaran belum ada industri besar, masih berupa industri olahan bahan makanan skala rumah tangga.

Tabel1.29
PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
I	Primer					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.039.236,88	2.108.586,57	2.280.088,30	2.370.588,61	2.420.044,57
2	Pertambangan dan Penggalian	54.076,70	59.424,61	61.106,92	66.002,72	66.880,36
II	Skunder					
1	Industri Pengolahan	306.732,80	348.825,84	398.348,18	425.430,96	452.767,77
2	Pengadaan Listrik dan Gas	4.241,13	4.981,49	5.874,45	5.779,10	5.964,96
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	821,04	848,88	908,85	971,00	1.002,64
4	Konstruksi	577.762,46	628.836,67	692.393,40	754.459,47	803.982,73
III	Tersiaer					
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.412.782,37	1.539.193,44	1.671.596,65	1.844.943,35	1.955.351,27

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
2	Transportasi dan Pergudangan	661.350,69	797.656,61	1.004.955,94	1.038.908,84	1.170.136,86
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	525.122,46	584.553,99	666.088,97	725.822,00	782.111,90
4	Informasi dan Komunikasi	96.187,16	104.719,85	117.184,05	143.409,22	164.129,30
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	133.302,63	142.968,85	159.186,25	177.684,76	193.608,87
6	Real Estate	178.604,44	193.771,21	211.611,25	233.808,67	248.547,06
7	Jasa Perusahaan	58.227,44	67.594,27	75.364,27	86.580,16	95.572,78
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	230.020,99	230.195,38	294.395,38	302.912,83	307.951,45
9	Jasa Pendidikan	305.946,74	352.013,37	404.033,37	465.782,86	521.505,45
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.332,39	14.173,41	17.000,41	19.154,93	21.026,99
11	Jasa lainnya	90.106,21	97.767,33	109.367,33	124.230,38	135.390,51
	PRRB	6.686.854,54	7.276.111,78	8.169.503,98	8.786.469,86	9.345.975,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2017, *) Angka sementara

Tabel 1.30
PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
I	Primer					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.663.702,76	1.632.528,83	1.614.532,02	1.610.052,53	1.585.467,16
2	Pertambangan dan Penggalian	46.612,48	47.526,08	47.775,95	47.843,32	48.425,06
II	Skunder					
1	Industri Pengolahan	265.609,54	283.588,93	301.282,69	312.323,92	323.906,51
2	Pengadaan Listrik dan Gas	4.464,66	4.718,06	4.819,20	4.907,11	5.042,88
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	724,47	733,31	747,17	759,05	771,32
4	Konstruksi	518.455,10	540.541,29	564.587,49	585.815,01	608.475,62
III	Tersiaer					
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.284.015,76	1.373.752,53	1.439.969,59	1.492.256,43	1.546.994,44
2	Transportasi dan Pergudangan	553.211,78	607.487,36	667.608,91	734.505,42	808.980,70
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433.178,12	464.000,57	505.115,00	531.864,28	560.790,05
4	Informasi dan Komunikasi	90.683,62	101.541,78	113.721,64	127.386,69	142.720,93
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	115.234,64	118.495,58	126.785,76	135.606,04	144.628,50
6	Real Estate	158.162,72	165.422,39	173.091,21	180.195,79	187.764,68
7	Jasa Perusahaan	50.139,57	54.165,78	58.536,96	63.284,42	68.442,48
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	199.229,72	191.722,81	226.776,59	237.674,07	237.896,33
9	Jasa Pendidikan	252.269,40	281.192,19	309.712,19	339.781,32	372.949,10
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.124,30	12.417,80	13.966,67	15.035,38	16.188,14
11	Jasa lainnya	86.510,74	93.713,49	102.058,19	108.777,52	116.262,26
	PDRB	5.733.329,37	5.973.548,76	6.271.087,22	6.528.068,32	6.800.191,97

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2017 *) Angka sementara

c) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah.

Upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang lebih penting seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk dicermati.

Kondisi perekonomian Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2017 ini mengalami sedikit peningkatan laju pertumbuhan ekonominya, Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,10 prosen, diproyeksikan pada tahun 2017 naikmenjadi 4,17 prosen, sehingga hal ini akan berdampak terhadap tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang mengakibatkan Paritas Daya Beli (PDB/PPP) masyarakat Kabupaten Pangandaran ada peningkatan walupun pergerakannya cukup lambat. Pada Tahun 2016 daya beli masyarakat / penduduk Kabupaten Pangandaran mencapai angka sebesar Rp. 8.312.000,- dan diproyeksikan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 8.346.723,-,

ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat pergerakannya tidak terlepas dari dinamika kinerja ekonomi yang saling terkait dengan kondisi perekonomian regional, nasional dan internasional.

Tabel 1.31
LajuPertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Paritas Daya Beli (PPP) serta Inflasi
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

Rician	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,95	4,19	4,98	4,10	4,17
3. PPP (Rp.)	8.200.000	8.232.000	8.265.000	8.312.000	8.346.723
4. Inflasi Tahunan(YoY)	7,21	7,47	3,29	3,45	3,56

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2017,*) Angka sementara

Dalam teori ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), prosentase pengeluaran non makanan akan dapat melihat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pengeluaran konsumsi non makanan ≥ 50 prosen, menunjukkan kondisi rumahtangga baik, sedangkan pengeluaran konsumsi non makanan < 20 prosen, menunjukkan kondisi rumahtangga buruk dan pengeluaran konsumsi non makanan 20 - 49 prosen, menunjukkan

kondisi rumahtangga sedang (*Kantor Menko Kesra, Buku Panduan Penyusunan IKK, 1992*).

Kebijakan perizinan, retribusi/pajak dan keamanan yang kondusif dapat membawa iklim berinvestasi sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran bertambah pesat dan dimungkinkan terbukanya lapangan kerja baru yang mampu menyerap sumber daya manusia yang ada, terutama penduduk miskin. Terserapnya tenaga kerja tentu merupakan salah satu jaminan sumber penghasilan rumah tangga yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai pilihan kebutuhan hidup.

d) Inflasi

Inflasi merupakan prosentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara umum, penghitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*.

Pada tahun 2016, secara umum inflasi di Kabupaten Pangandaran mencapai 3,45 %, sedangkan tahun 2017 diproyeksikan nilai inflasi sekitar 3,56 % atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3,45%, namun masih dibawah rata-rata inflasi gabungan 7 kota/kabupaten di Jawa Barat yaitu sebesar 3,63 % dan masih dibawah inflasi nasional yaitu sebesar 3,61 %. Hal ini dikarenakan ada pada tahun 2017 peningkatan Tarif Dasar Listrik (TDL). Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 mengalami sedikit perubahan/pergeseran.

e) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Jika dilihat dari PDRB perkapita Kabupaten Pangandaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meningkat (bersifat positif). Pada tahun 2017, PDRB perkapita diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.286.983,39,- setara dengan 5,44% dari Rp. 22.367.845,22,- pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 23.654.828,61,- pada tahun 2017. Walaupun terjadi peningkatan, indikator tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Hal itu

disebabkan PDRB per kapita dihitung atas dasar harga berlaku, sehingga tingkat inflasi perlu dipertimbangkan karena turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada sisi lain, pola distribusi pendapatan regional Kabupaten Pangandaran perlu pula dievaluasi untuk menggambarkan mengenai sejauhmana tingkat pemerataan daya beli masyarakat. Namun demikian, pendapatan per kapita yang dipresentasikan oleh PDRB per Kapita dapat menggambarkan nilai produk yang dihasilkan di wilayah Pangandaran per penduduk selama satu tahun. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai tingkat produktifitas penduduk di Kabupaten Pangandaran dan dapat merefleksikan tingkat pendapatan per penduduk di Kabupaten Pangandaran.

f) Investasi

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) yang diterbitkan pada tahun 2017, tercatat nilai investasi di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 4.151.210.450.000,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 93,78% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 258.275.893.391,- tahun 2016. Pada tabel di bawah disajikan perkembangan investasi di Kabupaten Pangandaran menurut sektor usaha tahun 2016 dan tahun 2017.

Tabel 1.32
Data Investasi di Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2017

No	Sektor	Tahun		Peningkatan/ Penurunan (Rp)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	
I	Sektor Primer			
1	Pertanian	1.117.000.000	1.369.000.000	- 252.000.000
2	Perikanan	262.500.000	15.000.000	- 247.500.000
3	Peternakan		3.785.881.000.000	3.785.881.000.000
II	Sektor Sekunder			
1	Industri	9.676.000.000	3.997.800.000	- 5.678.200.000
III	Sektor Tersier			
1	Jasa	26.380.000.000	47.154.150.000	20.774.150.000
2	Keuangan	110.566.291.166		- 110.566.291.166
3	Perdagangan	121.329.602.255	312.793.500.000	191.463.897.745
	Jumlah	258.275.893.391	4.151.210.450.000	3.892.934.556.000

Sumber : DPMPSTSPKP Kabupaten Pangandaran, Tahun 2017

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2017, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2017, harus dapat menginformasikan seberapa berdayanya kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun sebagai representasi ringkasan ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Prosentase Penduduk Miskin, Prosentase

Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB sebagaimana tabel 1.38 berikut :

Tabel 1.33
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2017

NO	JENIS INDIKATOR	ANGKA CAPAIAN				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Penduduk (orang)	391.471	393.686	402.413	405.683	409.016
1	Jumlah Penduduk Laki-Laki (orang)	194.708	195.737	202.095	203.269	205.032
	Jumlah Penduduk Perempuan (orang)	196.763	197.949	200.318	202.414	203.984
2	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	387	389	395	401	404
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	0,56	2,17	0,80	0,81
4	Laju Inflasi (%)	7,21	7,47	3,29	3,45	3,56
5	Penduduk Miskin:					
	Jumlah (jiwa)	32.209	30.418	32.686	31.552	30.418
	Prosentase (%)	8,34	7,83	8,38	7,77	7,43
6	Indikator Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja (Orang)	211.816	211.393	222.516	223.403	243.702
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,40	3,70	4,81	4,20	3,34
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,60	96,30	95,19	95,80	96,66
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,73	65,28	65,62	65,79	66,14
	Indeks Pendidikan	55,26	56,53	56,84	56,96	57,59
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,48	11,89	11,99	12,02	12,22
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,01	7,05	7,06	7,07	7,110
	Indeks Kesehatan	76,60	76,68	77,29	77,54	77,73
	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,79	69,84	70,24	70,40	70,53
	Indeks Pengeluaran	64,07	64,19	64,31	64,49	64,61

NO	JENIS INDIKATOR	ANGKA CAPAIAN				
		2013	2014	2015	2016	2017*
	Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.200.000	8.232.000	8.265.000	8.312.000	8.346.723
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,19	4,98	4,10	4,17
9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	6.686.854,54	7.276.111,78	8.169.503,98	8.786.469,86	9.345.975,47
10	PDRB Atas Dasar Konstan (Juta Rp.)	5,733,329,37	5,973,548,76	6.271.087,22	6.528.068,32	6.800.191,97
11	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (Rp.)	17.317.669,84	18.737.411,87	20.921.535,57	22.367.845,22	23.654.828,61
12	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (Rp.)	14.848.222,66	15.383.057,18	16.059.821,36	16.618.599,29	17.211.405,70
13	Dependency Ratio (Angka Ketergantungan)	48,25	48,28	48,31	48,34	48,36
14	Sex Ration	98,96	98,88	98,81	98,74	98,66
15	Gini Ration	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan Didukcapil Kabupaten Pangandaran, 2017,
*) Angka sementara



2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Pangandaran untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Pangandaran. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memerhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2016-2021 RPJMD Kabupaten Pangandaran disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Kabupaten Pangandaran : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Tujuan Wisata : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu

membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing.

Berkelas Dunia : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).

Visi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjang yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Untuk menjamin optimalnya upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami yang memenuhi standar kualitas yang tinggi.

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Keterkaitan antara Visi dan Misi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

VISI	MISI
KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
	2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
	3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
	4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
	5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
	6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi Kedua: Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Misi Ketiga: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, storage, dan lain lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya

kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan insfrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antar objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu juga diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintahan cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

Misi Keempat: Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal.

Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan prilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

Misi Kelima: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

Misi Keenam: Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 diuraikan mengenai janji politik Bupati Pangandaran sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Pangandaran 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan janji politik mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain.

RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 merupakan Dokumen Strategis Kabupaten Pangandaran untuk mengimplementasikan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, selanjutnya tentu akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkenaan dengan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tercatat ada 22 item janji politik. Berikut janji-janji dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/ Wakil Bupati
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. Urusan Kearsipan 3. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Urusan Komunikasi dan Informatika 5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Perencanaan dan penerapan APBD yang berpihak kepada rakyat 2. Percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/ Wakil Bupati
2	Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	1. Urusan Penataan Ruang 2. Urusan Lingkungan Hidup 3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Penataan dan pengembangan kawasan wisata 2. Pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan
3	Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas	1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Perumahan 3. Urusan Perhubungan 4. Urusan Lingkungan Hidup	1. Percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran 2. Percepatan pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memadai 3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi 4. Pembangunan dan peningkatan jalan yang antar kawasan pariwisata 5. Peningkatan kualitas jalan kabupaten dan penghubung ibu Kabupaten kecamatan melalui hotmix dan cor beton 6. Peningkatan dan pengembangan jalan poros tengah (Pangleseran Cikohkol)

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/ Wakil Bupati
4	Memperkuat katahahanan nilai-nilai kearifan lokal	1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata	1. Pemberian beras untuk pesantren 2. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji, madrasah dan pengelola masjid 3. Pengembangan budaya dan pelestarian kearifan lokal 4. Jaminan kesehatan untuk ulama
5	Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Perpustakaan 3. Urusan Kesehatan 4. Urusan Keluarga Berencana 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Urusan Sosial 7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar hingga tingkat SLTA guna mempercepat terlaksananya wajib belajar 12 tahun 2. Gratis pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) 3. Pembentukan-pembentukan unit penanggulangan kemiskinan, gratis raskin, gratis jaminan pendidikan, dan kesehatan bagi warga tidak mampu 4. Pengembangan pendidikan agama islam untuk semua anak didik
6	Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	1. Urusan Ketenagakerjaan 2. Urusan Penanaman Modal 3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Urusan Perdagangan 5. Urusan Industri 6. Urusan Ketahanan Pangan 7. Urusan Pertanian	1. Peningkatan pendapatan petani dan produksi hasil pertanian 2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir 3. Pengembangan industri kreatif

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/ Wakil Bupati
		8. Urusan Kelautan dan Perikanan 9. Urusan Pariwisata	4. Penguatan ketahanan pangan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga masyarakat. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan kabupaten, terutama terkait pendidikan, kesehatan, pariwisata dan persoalan infrastruktur. Selain itu, janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga masyarakat selanjutnya menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.

2.1.2 Tujuan serta Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 dan menetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tujuan dan 59 (lima puluh sembilan) sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
		Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan.
		Meningkatnya sistem tata kelola dan pelayanan kearsipan
2	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Daerah
		Kapasitas Aparatur Pemerintah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu
3	Mewujudkan pemerintahan yang bersih	Berkurangnya praktek KKN dilingkungan birokrasi
4	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya transparansi publik
		Meningkatnya pelayanan masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
5	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM	Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
6	Meningkatkan layanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan Prasarana perdesaan
7	Mewujudkan kemandirian Kemasyarakatan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
8	Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten Terjaganya pemanfaatan ruang publik dan sempadan Terpetakannya Rencana Pengembangan Wilayah yang baik
9	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau
10	Menyediakan infrastruktur, yang mendukung kepariwisataan dan perekonomian	Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing
11	Membangun pangandaran kabupaten cerdas	Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pangandaran kabupaten cerdas
12	Menyediakan infrastruktur, Sarana dan prasarana pemerintahan yang berkualitas.	Tersedianya Sarana Dan prasarana pusat pemerintahan.
13	Menyediakan Sarana dan prasarana kesehatan yang representative	Terbangunnya gedung Rumah Sakit Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu
14	Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi	Tersedianya lingkungan permukiman yang sehat

NO	TUJUAN	SASARAN
	lingkungan yang nyaman	Tersedianya taman makam pahlawan dan pemakaman umum
		Meningkatnya penang gulangan bencana dan perlindungan masyarakat
		Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
15	Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal, dan ramah	Terwujudnya sistem transportasi yang handal
16	Meningkatkan pelestarian seni budaya	Meningkatnya pelestarian seni budaya/sertarian seni budaya/serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat
17	Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
18	Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka	Meningkatnya akses pendidikan
		Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya budaya dan minat baca
19	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau
		Meningkatnya budaya sehat
		Terkendalnya kesehatan makanan
20	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
21	Meningkatkan peran serta peuda dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta organisasi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
22	Menigkatkan prestasi oleh raga	Meningkatnya prestasi olahraga
23	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan
24	Membangun perekonomian yang tangguh	Terjaganya stabilitas harga
		Terjaganya pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri
		Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan
		Meningkatnya pendapatan daerah
25	Membangun perekonomian yang maju	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan insfestasi
		Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi

NO	TUJUAN	SASARAN
		Optimalisasi kabupaten pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing
26	Membangun perekonomian yang berkeadilan	Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan rata rata pendapatan masyarakat
27	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	Meningkatnya komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan

2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016. RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2017.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertumpu pada 4 pilar, yaitu:

- Pemenuhan infrastruktur dasar;
- Peningkatan pelayanan kesehatan;
- Peningkatan pelayanan pendidikan; dan
- Pengembangan wisata.

2.3 Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian

tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pelaksanaan reuiu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 640/ /Huk.Org/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran	Opini	WDP
2	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai Evaluasi LKIP dari KemenpanRB	Nilai	Cukup
3	Tersusunnya LPPD	Nilai LPPD dari Kemendagri	Nilai	Baik
4	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan}}{\text{Jumlah kewenangan yang akan dilimpahkan ke kecamatan}} \times 100$	Persen	0
5	Panjang infrastruktur desa yang baik	$\frac{\text{PanjangInfrastrukturDesa yang baik}}{\text{PanjangtotalinfrastrukturDesa}} \times 100$	Persen	3
6	Jumlah rencana tata ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Dokumen	1

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target
7	Terbentuknya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen wilayah strategis cepat tumbuh	Dokumen	7
8	Terjaganya kualitas air, tanah dan udara di bawah batas baku mutu	$\frac{\text{Jumlah lokasi atau titik yang kualitas air dan udaranya di bawah batas baku mutu}}{\text{Jumlah lokasi atau titik seluruhnya}} \times 100$	Persen	49
9	Luas lahan yang direhabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	5
10	Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$	Persen	45
11	Luas jalan dan jembatan yang dibangun	$\frac{\text{Luas jalan dan jembatan yang dibangun yang menghubungkan antar obyek wisata}}{\text{Jumlah luasan jalan yang menghubungkan antar obyek wisata}} \times 100$	Persen	10,18
12	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Km	25
13	Tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	M	150
14	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Lokasi	0
15	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa wisata	0
16	Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang membangun infrastruktur TIK}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya}} \times 100$	Persen	10
17	Jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah gedung SKPD yang dibangun}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya}} \times 100$	Persen	10
18	Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah RSUD yang dibangun	Unit	1

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target
19	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	0
20	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah tersedia sarana dan prasarana air minum dan air limbah}}{\text{Jumlah desa}} \times 100$	Persen	15
21	Jumlah penghargaan	Jumlah Piagam/ Piala tentang Pelestarian Seni dan Budaya	Piagam/ Piala	1
22	Jumlah binaan kelompok seni budaya	Jumlah Kelompok seni budaya yang dibina	Kelompok	20
23	APK SD/MI dan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD} - \text{MI dan SMP} - \text{MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7} - 15 \text{ tahun}} \times 100$	Persen	72
24	APK Pendidikan Menengah	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA} - \text{SMK}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16} - 18 \text{ tahun}} \times 100$	Persen	70
25	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara /AMH)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia} > 15 \text{ melek huruf}}{\text{Jumlah Penduduk Usia} > 15 \text{ tahun}} \times 100$	Persen	100
26	Jumlah guru yang bersertifikat	Jumlah guru yang bersertifikat di akhir tahun pelaporan	Guru	2.377
27	Nilai rata-rata uji kompetensi guru	Nilai Rata-rata uji kompetensi guru	Nilai	>75
28	Angka kematian ibu /100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ kelahiran hidup}$	Orang	3
29	Angka kematian bayi /1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000 \text{ kelahiran hidup}$	Orang	58
30	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang dilayani}}{\text{Total anak balita}} \times 100$	Persen	86
31	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	Unit	4

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target
32	Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang	136.000
33	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Desa	35
34	Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS	Jumlah orang miskin yang ditangani dan PMKS	Orang	878
35	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat	Jumlah produksi pangan dikurangi jumlah konsumsi pangan	Ton	72.600
36	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	Jumlah pelaku usaha IKM yang terbentuk selama setahun pelaporan	Pelaku Usaha	75.480
37	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan selama setahun pelaporan	Orang	3.314.710
38	Meningkatnya pendapatan petani ikan	Rata-rata pendapatan petani ikan per bulan	Rupiah	19.800.000
39	Meningkatnya pendapatan nelayan	Rata-rata pendapatan nelayan per bulan	Rupiah	24.681.600
40	Meningkatnya Indeks nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks harga yg diterima petani (It)}}{\text{Indeks harga yg dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Indeks	120
41	Jumlah Produksi:			
	Kelapa	Jumlah produksi hasil pertanian dalam tahun berkenaan	Butir	114.000.000
	Karet		Ton	346
	Cengkeh		Ton	9
	Pala		Ton	9
	Tembakau		Ton	30
	Kakao		Ton	540
	Kopi		Ton	337
	Padi		Ton	232.125
	Jagung		Ton	504
	Kedelai		Ton	5.865
	Jumlah produksi peternakan:			

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target
	Sapi	Jumlah produksi hasil peternakan dalam tahun berkenaan	Ekor	250
	Kambing		Ekor	450
	Domba		Ekor	800
	Unggas		Ekor	500
	Jumlah produksi perikanan:			
	Ikan Budidaya	Jumlah produksi hasil perikanan dalam tahun berkenaan	Ton	95
	Jumlah produksi kelautan:			
	Ikan Tangkap	Jumlah produksi hasil kelautan dalam tahun berkenaan	Ton	3.444

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan, sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP
		Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Cukup
		Tersusunnya LPPD	Baik
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan	0
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan	Panjang infrastruktur desa yang baik	3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Jumlah rencana tata ruang	1
5	Terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik	Terbentuknya wilayah strategis dan cepat tumbuh	7
6	Meningkatnya pengelolaan Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas air, tanah dan udara di bawah batas baku mutu	49
7	Kabupaten Pangandaran bersih dan hijau	Luas lahan yang direhabilitasi	5
		Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	45
8	Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata	Luas jalan dan jembatan yang dibangun	10,18
9	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	25
10	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	Tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	150
11	Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	0
		Jumlah desa wisata yang dikembangkan	0
12	Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas	Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	10
13	Tersedianya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan	10
14	Terbangunnya gedung rumah sakit	Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah	1
15	Terbangunnya gedung Puskesmas dan Pustu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0
16	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat	15
17	Meningkatnya pelestarian seni budaya/ serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat	Jumlah penghargaan	1
		Jumlah binaan kelompok seni budaya	20
18	Meningkatnya akses pendidikan	APK SD/MI dan SMP/MTs	72
		APK Pendidikan Menengah	70
		Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara /AMH)	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
19	Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah guru yang bersertifikat	2.377
		Nilai rata-rata uji kompetensi guru	>75
20	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka kematian ibu /100.000 kelahiran hidup	3
		Angka kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup	58
		Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	86
		Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	4
21	Meningkatnya budaya sehat	Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	136.000
		Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	35
22	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS	878
23	Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat	72.600
24	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	75.480
25	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3.314.710
26	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat	Meningkatnya pendapatan petani ikan	19.800.000
		Meningkatnya pendapatan nelayan	24.681.600
		Meningkatnya indeks nilai tukar petani	120
27	Meningkatnya produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	Jumlah Produksi:	
		Kelapa	114.000.000
		Karet	346
		Cengkeh	9
		Pala	9
		Tembakau	30
		Kakao	540
		Kopi	337
		Padi	232.125
		Jagung	504
		Kedelai	5.865
		Jumlah produksi peternakan:	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Sapi	250
		Kambing	450
		Domba	800
		Unggas	500
		Jumlah produksi perikanan	
		Ikan budidaya	95
		Jumlah produksi kelautan	
		Ikan tangkap	3.444

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2017

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 717,597,339,584.,00.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Pangandaran. Komposisi anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	RENCANA (RP.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	651,695,578,089.50	47.59
2	Belanja Langsung	717,597,339,584.00	52.41
	Jumlah	1,369,292,917,673.50	100.00

Sumber: Perbup Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Nomor 40 Tahun 2016.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Belanja per Misi Tahun 2017

NO	MISI KABUPATEN	ANGGARAN BELANJA (Rp)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	34,562,389,125.00
2	Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	27,403,074,900.00
3	Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas	310,965,270,370.00
4	Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local	622,869,732.00
5	Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	138,572,524,082.00
6	Membangun perekonomian yang tangguh, maju berkeadilan dan berkelanjutan	10,697,530,003.00
	JUMLAH	522,823,658,212.00

Sumber : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 (diolah).

Berdasarkan perbandingan antara anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja program yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian Misi terdapat anggaran belanja program yang tidak secara langsung mendukung pencapaian Misi yaitu sebesar Rp. 194,773,681,372.00 atau 27.14 % dari jumlah anggaran belanja langsung, yaitu untuk anggaran belanja program non-urusan.



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Belum Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melampaui Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

NO.	Kriteria	Interval Nilai Capaian Kinerja
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan **Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Pangandaran dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 640/ - Huk.Org/2016** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Bersih Dan Melayani						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran	Opini	WDP	WTP	133,3
2	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai Evaluasi LKIP dari KemenpanRB	Nilai	Cukup	Kurang	66,66
3	Tersusunnya LPPD	Nilai LPPD dari Kemendagri	Nilai	Baik	Baik	100
4	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan}}{\text{Jumlah kewenangan yang akan dilimpahkan ke kecamatan}} \times 100$	Persen	0%	100	>100
5	Panjang infrastruktur desa yang baik	$\frac{\text{Panjang Infrastruktur Desa yang baik}}{\text{Panjang total infrastruktur Desa}} \times 100$	Persen	3%	25	833,33
Misi 2: Mewujudkan Penataan Ruang Yang Harmonis Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan						
6	Jumlah rencana tata ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Doku- men	1	1	100
7	Terbentuknya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen wilayah strategis cepat tumbuh	Doku- men	7	0	0
8	Terjaganya kualitas air, tanah dan udara di bawah batas baku mutu	$\frac{\text{Jumlah lokasi atau titik yang kualitas air dan udaranya di bawah batas baku mutu}}{\text{Jumlah lokasi atau titik seluruhnya}} \times 100$	Persen	49	20,83	42,51
9	Luas lahan yang direhabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	5	0	0
10	Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$	Persen	45	17.61	39,13
Misi 3: Menyediakan Infrastruktur Dan Fasilitas Yang Berkualitas						
11	Luas jalan dan jembatan yang dibangun	$\frac{\text{Luas jalan dan jembatan yang dibangun yang menghubungkan antar obyek wisata}}{\text{Jumlah luasan jalan yang menghubungkan antar obyek wisata}} \times 100$	Persen	10,18	71,02	697,6
12	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Km	25	181	724
13	Tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Panjang saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	M	150	734.242	489,5
14	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Lokasi	0	7	>100
15	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa wisata	0	0	0
16	Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang membangun infrastruktur TIK}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya}} \times 100$	Persen	10	20,58	205,8
17	Jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah gedung SKPD yang dibangun}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya}} \times 100$	Persen	10	52,94	529,4
18	Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah RSUD yang dibangun	Unit	1	0	0

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
19	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	7	9	128,57
20	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah tersedia sarana dan prasarana air minum dan air limbah}}{\text{Jumlah desa}} \times 100$	Persen	15	50,54	336,93
Misi 4: Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal						
21	Jumlah penghargaan	Jumlah Piagam/ Piala tentang Pelestarian Seni dan Budaya	Piagam /Piala	1	1	100
22	Jumlah binaan kelompok seni budaya	Jumlah Kelompok seni budaya yang dibina	Kelompok	20	12	60
Misi 5: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Mandiri, Berkualitas Dan Berdaya Saing						
23	APK SD/MI dan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD - MI dan SMP - MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 tahun}} \times 100$	Persen	72	98	36,2
24	APK Pendidikan Menengah	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA - SMK}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 tahun}} \times 100$	Persentase	70	n/a	0
25	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara /AMH)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 15 melek huruf}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 15 tahun}} \times 100$	Persentase	100	n/a	0
26	Jumlah guru yang bersertifikat	Jumlah guru yang bersertifikat di akhir tahun pelaporan	Guru	2.377	1940	81,61
27	Nilai rata-rata uji kompetensi guru	Nilai Rata-rata uji kompetensi guru	Nilai	>75	55,7	74,2
28	Angka kematian ibu / 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Orang	3	5	33,33
29	Angka kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$	Orang	58	49	100
30	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang dilayani}}{\text{Total anak balita}} \times 100$	Persentase	86	81,52	94,8
31	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	Unit	4	6	150
32	Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang	136.000	158.545	116,57
33	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Desa	35	53	151,43
34	Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS	Jumlah orang miskin yang ditangani dan PMKS	Orang	878	52.634	5.994,76
Misi 6: Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan Dan Berkelanjutan						
35	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat	Jumlah produksi pangan dikurangi jumlah konsumsi pangan	Ton	72.600	340.250,7	468,66

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
36	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	Jumlah pelaku usaha IKM yang terbentuk selama setahun pelaporan	Pelaku Usaha	480	5.073	1.056,88
37	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan selama setahun pelaporan	Orang	3.314.710	2.916.141	88
38	Meningkatnya pendapatan petani ikan	Rata-rata pendapatan petani ikan per bulan	Rupiah	19.800.000	20.400.000	103,03
39	Meningkatnya pendapatan nelayan	Rata-rata pendapatan nelayan per bulan	Rupiah	24.681.600	28.757.217	116,5
40	Meningkatnya Indeks nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks harga yg diterima petani (It)}}{\text{Indeks harga yg dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Indeks	120	129,41	107,84
41	Jumlah Produksi:	Jumlah produksi hasil pertanian dalam tahun berkenaan				
	Kelapa		Butir	114.000.000	125.610.299	110,18
	Karet		Ton	346	333,3	96,3
	Cengkeh		Ton	78	81,80	104,87
	Pala		Ton	9	10,3	114,44
	Tembakau		Ton	30	49,98	166,6
	Kakao		Ton	540	209,01	38,7
	Kopi		Ton	337	303,02	89,91
	Padi		Ton	232.125	192.953,95	83,12
	Jagung		Ton	504	4.739,59	940,39
	Kedelai		Ton	5.865	541,20	9,22
	Jumlah produksi peternakan:	Jumlah produksi hasil peternakan dalam tahun berkenaan				
	Sapi		Ekor	250	16.587	6.634,8
	Kambing		Ekor	450	16.530	3.673,3
	Domba		Ekor	800	36.535	4.566,87
	Unggas		Ekor	500	977.767	195.553,4
	Jumlah produksi perikanan:	Jumlah produksi hasil perikanan dalam tahun berkenaan				
	Ikan Budidaya		Ton	95	233,10	245,36
	Jumlah produksi kelautan:	Jumlah produksi hasil kelautan dalam tahun berkenaan				
	Ikan Tangkap		Ton	3.444	5.674,87	164,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani, dapat dilihat dari indikator :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, mencapai 133,3%;
2. Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten, mencapai 66,66%;
3. Tersusunnya LPPD, belum mendapatkan nilai 100%;
4. Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan, mencapai >100%;
5. Panjang infrastruktur desa yang baik, mencapai 833,33%.

B. MISI 2: Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, dapat dilihat dari indikator :

1. Jumlah rencana tata ruang, mencapai 100%
2. Terbentuknya wilayah strategis dan cepat tumbuh, mencapai 0%

3. Terjaganya kualitas air, tanah dan udara di bawah batas baku mutu, mencapai 42,51%
4. Luas lahan yang direhabilitasi, mencapai 0%
5. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, mencapai 39,13%

C. MISI 3: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator :

1. Luas jalan dan jembatan yang dibangun, mencapai 697,6%
2. Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, mencapai 724%
3. Tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik, mencapai 459,5%
4. Jumlah obyek wisata yang dikembangkan, mencapai >100%
5. Jumlah desa wisata yang dikembangkan, mencapai 0 %
6. Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), mencapai 205,8%
7. Jumlah sarana dan prasarana pusat pemerintahan, mencapai 529,4%
8. Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah, mencapai 0%
9. Jumlah Puskesmas yang dibangun, mencapai 128,57%
10. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat, mencapai 336,93%

MISI 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal, dapat dilihat dari indikator :

1. Jumlah penghargaan, mencapai 100%
2. Jumlah binaan kelompok seni budaya, mencapai 60%

MISI 5 : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, dapat dilihat dari indikator :

1. APK SD/MI dan SMP/MTs, mencapai 103,87 %
2. APK Pendidikan Menengah, mencapai 77,8%
3. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara /AMH), mencapai 84,5%
4. Jumlah guru yang bersertifikat, mencapai 81,61%
5. Nilai rata-rata uji kompetensi guru, mencapai 85,5%
6. Angka kematian ibu /100.000 kelahiran hidup, mencapai 33,33%
7. Angka kematian bayi /1.000 kelahiran hidup, mencapai 100%
8. Cakupan pelayanan anak balita (SPM), mencapai 94,8%
9. Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar, mencapai 150%
10. Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan, mencapai 116,57%
11. Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat, mencapai 151,43%
12. Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS, mencapai 5.994,76%

MISI 6 : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator :

1. Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat, mencapai 468,66%
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM, mencapai 1.056,88%
3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, mencapai 88%
4. Meningkatnya pendapatan petani ikan, mencapai 103,03%

5. Meningkatnya pendapatan nelayan, mencapai 116,51%
6. Meningkatnya Indeks nilai tukar petani, mencapai 107,84%
7. Meningkatnya Produksi:
 - A. Pertanian:
 - a. Kelapa, mencapai 110,18%
 - b. Karet, mencapai 96,3%
 - c. Cengkeh, mencapai 104,87%
 - d. Pala, mencapai 114,44%
 - e. Tembakau, mencapai 166,6%
 - f. Kakao, mencapai 38,7%
 - g. Kopi, mencapai 89,91 %
 - h. Padi, mencapai 83,12%
 - i. Jagung, mencapai 940,39%
 - j. Kedelai, mencapai 9,22%
 - B. Peternakan:
 - a. Sapi, mencapai 6.634,8%
 - b. Kambing, mencapai 3.673,3%
 - c. Domba, mencapai 4.566,87%
 - d. Unggas, mencapai 195.553,4%
 - C. Perikanan:
 - a. Ikan Budidaya, mencapai 245,36%
 - D. Kelautan
 - a. Ikan Tangkap, mencapai 164,77%

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Janji Bupati dan Wakil Bupati sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati, tercatat ada 22 item janji politik. Tidak seluruh item janji tersebut merupakan indikator *outcome* sasaran strategis RPJMD Kabupaten Pangandaran tetapi merupakan *output* penting.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Bupati dan Wakil Bupati diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 640/ -Huk.Org/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 59 (lima puluh sembilan) sasaran dengan 118 (seratus delapan belas) indikator kinerja (*outcomes*), namun demikian berdasarkan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dari sebanyak 59 sasaran dan 118 indikator kinerja sasaran telah dipilih dan ditetapkan 27 sasaran yang bersifat strategis dan 41 indikator kinerja utamanya, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi | Sebanyak 3 | Indikator |
| 2. Meningkatnya pelayanan masyarakat | Sebanyak 1 | Indikator |
| 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan | Sebanyak 1 | Indikator |
| 4. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten | Sebanyak 1 | Indikator |
| 5. Terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik | Sebanyak 1 | Indikator |
| 6. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup | Sebanyak 1 | Indikator |
| 7. Kabupaten Pangandaran bersih dan hijau | Sebanyak 2 | Indikator |
| 8. Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata | Sebanyak 1 | Indikator |
| 9. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi | Sebanyak 1 | Indikator |

10.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	Sebanyak	1	Indikator
11.	Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing	Sebanyak	2	Indikator
12.	Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas	Sebanyak	1	Indikator
13.	Tersedianya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Sebanyak	1	Indikator
14.	Terbangunnya gedung rumah sakit	Sebanyak	1	Indikator
15.	Terbangunnya gedung Puskesmas dan Pustu	Sebanyak	1	Indikator
16.	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Sebanyak	1	Indikator
17.	Meningkatnya pelestarian seni budaya/ serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat	Sebanyak	2	Indikator
18.	Meningkatnya akses pendidikan	Sebanyak	3	Indikator
19.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Sebanyak	2	Indikator
20.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Sebanyak	4	Indikator
21.	Meningkatnya budaya sehat	Sebanyak	2	Indikator
22.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	Sebanyak	1	Indikator
23.	Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan	Sebanyak	1	Indikator
24.	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi	Sebanyak	1	Indikator
25.	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing	Sebanyak	1	Indikator
26.	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
27.	Meningkatnya produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	Sebanyak	1	Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017							
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2017		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	133,3
		2	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai	Cukup	Kurang	66,66
		3	Tersusunnya LPPD	Nilai	Baik	Baik	100
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan	Persen	-	100	>100
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan	1	Panjang infrastruktur desa yang baik	Persen	3	25	833,33
4	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1	Jumlah rencana tata ruang	Dokumen	1	1	100
5	Terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik	1	Terbentuknya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen	7	0	0
6	Meningkatnya pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Terjaganya kualitas air, tanah, dan udara di bawah batas baku mutu	Persen	49	20,83	42,51
7	Kabupaten Pangandaran bersih dan hijau	1	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	5	0	0
		2	Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	Persen	45	17,61	39,13
8	Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata	1	Luas jalan dan jembatan yang dibangun	Persen	10,18	71,02	697,6
9	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	1	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Km	25	181	724
10	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	1	Tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	M	150	734,242	489,5
11	Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing	1	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Lokasi	0	7	>100
		2	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa wisata	0	0	0
12	Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas	1	Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Persen	10	20,58	205,8
13	Tersedianya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	1	Jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persen	10	52,94	529,4
14	Terbangunnya gedung rumah sakit	1	Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah	Unit	1	0	0
15	Terbangunnya gedung Puskesmas dan Pustu	1	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	7	9	128,57
16	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat	Persen	15	50,54	336,93
17	Meningkatnya pelestarian seni budaya/ serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat	1	Jumlah penghargaan	Piagam/ Piala	1	1	100
			Jumlah binaan kelompok seni budaya	Kelompok	20	12	60
18	Meningkatnya akses pendidikan	1	APK SD/MI dan SMP/MTs	Persen	72	98	136,2
		2	APK Pendidikan Menengah	Persen	70	n/a	0

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2017		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		3	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara /AMH)	Persen	100	n/a	0
19	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Jumlah guru yang bersertifikat	Guru	2.377	1.940	81,61
		2	Nilai rata-rata uji kompetnsi guru	Nilai	>75	55,7	74,2
20	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	1	Angka kematian ibu / 100.000 kelahiran hidup	Orang	3	5	33,33
		2	Angka kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup	Orang	58	49	100
		3	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	Persen	86	81,52	94,8
		4	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	Unit	4	6	150
21	Meningkatnya budaya sehat	1	Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang	136.600	158.545	116,57
		2	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Desa	35	53	151,43
22	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	1	Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS	Orang	878	52.634	5.994,76
23	Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan	1	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat	Ton	72.600	340.250,7	468,66
24	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi	1	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	Pelaku Usaha	480	5.073	1.056,88
25	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	3.314.710	2.916.141	88
26	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat	1	Meningkatnya pendapatan petani ikan	Rupiah	19.800.000	20.400.000	103,03
		2	Meningkatnya pendapatan nelayan	Rupiah	24.681.600	28.757.217	116,51
		3	Meningkatnya Indeks nilai tukar petani	Indeks	120	129,41	107,84
27	Meningkatnya produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	1	Jumlah Produksi:				
		a	Kelapa	Butir	114.000.000	125.610.299	110,18
		b	Karet	Ton	346	333,3	96,3
		c	Cengkeh	Ton	78	81,80	104,87
		d	Pala	Ton	9	10,3	114,44
		e	Tembakau	Ton	30	49,98	166,6
		f	Kakao	Ton	540	209,01	38,7
		g	Kopi	Ton	337	303,02	89,91
		h	Padi	Ton	232.125	192.953,95	83,12
		i	Jagung	Ton	504	4.739,59	940,39
		j	Kedelai	Ton	5.846	541,20	9,22
			Jumlah produksi peternakan:				
		k	Sapi	Ekor	250	16.587	6.634,8
		l	Kambing	Ekor	450	16.530	3.673,3
		m	Domba	Ekor	800	36.535	4.566,87
		n	Unggas	Ekor	500	977.767	195.553,4
		a	Jumlah produksi perikanan:				
		a	Ikan Budidaya	Ton		233,10	245,36

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		a Jumlah produksi kelautan: Ikan Tangkap	Ton		5.674,87	164,77

Kategori pencapaian indikator kinerja sasaran pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No.	Predikat	Rata-Rata Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$	26
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$	2
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$	2
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$	1
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	8
6	n/a		2
Jumlah			41

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Jml IKU	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	$\leq 50\%$	$51\% \leq 65\%$	$66\% \leq 75\%$	$76\% \leq 90\%$	$91\% \leq 100\%$
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	3	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	>100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan	1	833,33	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
5	Terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik	1	1	Sangat Rendah	-	-	-	-
6	Meningkatnya pengelolaan Lingkungan Hidup	1	42,51	Sangat Rendah	-	-	-	-
7	Kabupaten Pangandaran bersih dan hijau	2	19,56	Sangat Rendah	-	-	-	-
8	Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata	1	697,6	-	-	-	-	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Jml IKU	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	1	724	-	-	-	-	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	1	489,5	-	-	-	-	Sangat Tinggi
11	Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing	2	400	-	-	-	-	Sangat Tinggi
12	Tersedianya infrastruktur Teknologi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Hebat	1	205,8	-	-	-	-	Sangat Tinggi
13	Tersedianya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	1	529,4	-	-	-	-	Sangat Tinggi
14	Terbangunnya gedung rumah sakit	1	0	Sangat Rendah	-	-	-	-
15	Terbangunnya gedung Puskesmas dan Pustu	1	128,57	-	-	-	-	Sangat Tinggi
16	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	1	336,93	-	-	-	-	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya pelestarian seni budaya/ serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2	80	-	-	-	Tinggi	-
18	Meningkatnya akses pendidikan	3	32	Sangat Rendah	-	-	-	-
19	Meningkatnya kualitas pendidikan	2	83,55	-	-	-	Tinggi	-
20	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	4	94,53	-	-	-	-	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya budaya sehat	2	134	-	-	-	-	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	1	5.994,76	-	-	-	-	Sangat Tinggi
23	Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan	1	468,66	-	-	-	-	Sangat Tinggi
24	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi	1	1.056,88	-	-	-	-	Sangat Tinggi
25	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing	1	88	-	-	-	Tinggi	-

No	Sasaran Strategis	Jml IKU	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
26	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat	3	109,12	-	-	-	-	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	1	>100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
27 Sasaran				5	0	0	3	19

Tabel 3.7
Pencapaian target Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui target (>100%)		Sesuai Target =100%		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	3	100	1	33,33	1	33,33	1	33,33
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	>100	1	100	-	-	-	-
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan	1	833,33	1	100	-	-	-	-
4	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1	0	-	-	-	-	1	100,00
5	Terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik	1	0	-	-	-	-	1	100,00
6	Meningkatnya pengelolaan Lingkungan Hidup	1	42,51	-	-	-	-	1	100
7	Kabupaten Pangandaran bersih dan hijau	2	-	-	-	-	-	2	100
8	Tersedianya jalan yang menghubungkan antar obyek wisata	1	697,6	1	100	-	-	-	-
9	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	1	724	1	100	-	-	-	-
10	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	1	489,5	1	100	-	-	-	-
11	Terwujudnya destinasi pariwisata siap kunjung yang memiliki ketahanan dan berdaya saing	2	400	1	50	-	-	1	50

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui target (>100%)		Sesuai Target =100%		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
12	Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas	1	205,8	1	100	-	-	-	-
13	Tersedianya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	1	529,4	1	100	-	-	-	-
14	Terbangunnya gedung rumah sakit	1	0	-	-	-	-	1	100
15	Terbangunnya gedung Puskesmas dan Pustu	1	128,57	1	100	-	-	-	-
16	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	1	336,93	1	100	-	-	-	-
17	Meningkatnya pelestarian seni budaya/ serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat	2	80	-	-	1	50	1	50
18	Meningkatnya akses pendidikan	3	32	1	33,33	-	-	2	66,66
19	Meningkatnya kualitas pendidikan	2	83,55	-	-	-	-	2	100
20	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	4	123,66	1	25	1	25	2	50
21	Meningkatnya budaya sehat	2	134	2	100	-	-	-	-
22	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	1	5.994,76	1	100	-	-	-	-
23	Tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi kelembagaan	1	468,66	1	100	-	-	-	-
24	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi	1	1.056,88	1	100	-	-	-	-
25	Optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing	1	88	-	-	-	-	1	100

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui target (>100%)		Sesuai Target =100%		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
26	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat	3	109,12	3	100	-	-	-	-
27	Meningkatnya produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan	1	>100	1	100	-	-	-	-
Jumlah		41		22	46,34	3	2,44	16	41,46

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran dengan total belanja langsung urusan dan non urusan sebesar Rp. 717.597.339.584,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 681,839,744,351.36 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,02 %.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, komposisi belanja APBD Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2017
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	651,695,578,089.50	625,920,188,235.00	96,04
2	Belanja Langsung	717.597.339.584,00	681.839.744.351.36	95,02
	Jumlah	1,369,292,917,673.50	1,307,759,932,586.36	95,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2017 (data diperoleh per 02 Maret 2018)

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 47,86% dari realisasi belanja Kabupaten Pangandaran di tahun 2017 dan sisanya sebesar 52,14% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu anggaran yang terkait dengan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Pangandaran yang diperjanjikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 522,823,658,212.00 dan realisasi anggaran terkait pencapaian misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 495,935,981,579.36 atau 94,86%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Per Misi Tahun 2017

Misi Ke-	MISI KABUPATEN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani (35 Program)	34,562,389,125.00	32,115,551,605.00	92.92
2	Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan (11 Program)	27,403,074,900.00	26,690,455,513.00	97.39
3	Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas (15 Program)	310,965,270,370.00	300,744,477,175.00	96.71
4	Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal (2 Program)	622,869,732.00	581,693,000.00	93.39
5	Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing (32 Program)	138,572,524,082.00	125,804,107,384.36	90.79
6	Membangun perekonomian yang tangguh, maju berkeadilan dan berkelanjutan (23 Program)	10,697,530,003.00	9,999,696,902.00	93.48
JUMLAH		522,823,658,212.00	495,935,981,579.36	94.86

Sumber : BPKD Kabupaten Pangandaran sebelum diaudit BPK

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017.

3.4 Prestasi dan Penghargaan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan amanahnya, dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana lampiran.

3.5 Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran

Sasaran 1 Misi ke-1 RPJMD :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Pertama Kabupaten

Pangandaran “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Bersih dan Melayani”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, Nilai evaluasi LKIP Kabupaten dan Tersusunnya LPPD (Nilai LPPD). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	WDP	100	WDP	WTP	133,3	WTP	100
2	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai	0	C	285,71	Cukup	Kurang	66,66	BB	40
3	Tersusunnya LPPD	Nilai	Baik	0	0	Baik	Baik	100	Sangat Baik	80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					128,57				100	73,33

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Tahun 2017 melalui 3 indikator yang diperjanjikan tidak bisa dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 28,57%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 73,33%.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 ditargetkan mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun 2017 terkait opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI atas audit LKPD Tahun 2016 Kabupaten Pangandaran mendapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian.

Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan kuantifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan “Opini Tidak Wajar” (OTW), diberikan nilai 1 (satu);
- Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka nilainya adalah 2 (dua);
- Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan
- Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).

Pemeriksaan BPK Nomor : 18B/S-HP/XVIII.BDG/06/2017 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan
BPK memberi opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan diantaranya :
 - a. Pengelolaan Barang Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan Belum Tertib;
 - b. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum Optimal.
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Penggunaan Personil oleh Penyedia Jasa dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 486,7 juta;
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp. 469,1 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pangandaran agar:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyeteroran Kakus, Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- b. Menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas 16 jenis Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang diterbitkan;
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dan Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang untuk menuntaskan kegiatan inventarisasi, penilaian, pemuktahiran Buku Inventaris Daerah, KIB, KIR dan Kodifikasi Barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. Menarik kembali kelebihan pembayaran dari pelaksanaan atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 486,7 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- e. Menarik kembali kelebihan pembayaran dari pelaksanaan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 469,1 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah

Adapun sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 targetnya adalah Cukup, sedangkan realisasinya mendapatkan nilai C (kurang) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 66,66 (belum memenuhi target).

Capaian Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten Pangandaran didasarkan pada tingkatan nilai evaluasi LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator ini, jika dibandingkan dengan capaian di tahun lalu yaitu sama-sama mendapatkan nilai C (kurang), karena LKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran baru dinilai pada tahun ini oleh Kementerian PAN dan RB. Jika membandingkan capaian indikator ini dengan target tahun terakhir yang terdapat di dalam RPJMD yaitu kriteria BB (sangat baik) masih terdapat margin sebesar 40%.

Dalam rangka penilaian capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten, dilakukan kuantifikasi pengukuran dengan tingkatan persentase capaian sebagai berikut:

- Nilai AA (sangat memuaskan) peringkat 7 dengan tingkatan persentase capaian 100%
- Nilai A (memuaskan) peringkat 6 dengan tingkatan persentase capaian 85,71%
- Nilai BB (sangat baik) peringkat 5 dengan tingkatan persentase capaian 71,43%
- Nilai B (baik) peringkat 4 dengan tingkatan persentase capaian 57,14%
- Nilai CC (cukup) peringkat 3 dengan tingkatan persentase capaian 42,86%
- Nilai C (kurang) peringkat 2 dengan tingkatan persentase capaian 28,57%
- Nilai D (sangat kurang) peringkat 1 dengan tingkatan persentase capaian 14,29%
- Tanpa Nilai peringkat 0 dengan tingkatan persentase capaian 0%

Untuk mendapatkan nilai BB dari Tim Evaluasi Kemenpan dan RB, maka dalam penyusunan LKIP Kabupaten harus memenuhi persyaratan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, diantaranya LKIP itu harus akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pencapaian sasaran ini mengalami hambatan, yaitu dengan adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dimulai dengan adanya koordinasi yang intensif dari 4 (empat) SKPD (Bappeda, DPPKAD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat) yang berperan sebagai *leading sector* dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan melakukan asistensi dalam rangka memperbaiki dokumen SAKIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator Tersusunnya LPPD, pada tahun 2017 capaiannya adalah 100%. Target indikator ini adalah Nilai Baik (Tinggi) dan realisasinya untuk LPPD hasil evaluasi tahun 2016 Kabupaten Pangandaran mendapatkan nilai Baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Pangandaran yaitu:

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW;
- Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Konsultasi Publis.

Solusinya:

- Perlunya/berkoordinasi dengan Kementerian terkait;
- Mengajukan Peraturan Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk melakukan penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD serta penyelarasan program

dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Pertama Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Bersih dan Melayani”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	0	0	0	0	0	>100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					0			0		0

Sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan indikator jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan pada tahun 2017 targetnya sebesar 0% dan realisasi sebesar 0%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada peningkatan terhadap pelayanan masyarakat untuk tahun 2017.

Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Indikator ini akan direalisasikan pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan:

1. Kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi.
2. Penerima delegasi wajib bertanggungjawab kepada pemberi delegasi.
3. Pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut berasal dari pemberi delegasi kewenangan.

Pendelegasian sebagian kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan dengan menerbitkan Surat

Keputusan Bupati. Pertimbangannya adalah bahwa yang didelegasikan adalah kewenangan pejabat atasan (Bupati) kepada pejabat bawahannya (Camat).

Untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati, Camat memerlukan dukungan organisasi. Tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah, sama seperti pengaturan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah lainnya.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi tiga prasyarat sebagai berikut:

1. Adanya kemauan politik dari Bupati dan DPRD Kabupaten untuk menjadikan Kecamatan sebagai SKPD dan Pusat Pelayanan Publik.
2. Ketersediaan Dinas atau Lembaga Teknis Daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Camat, melalui keputusan Kepala Daerah.
3. Adanya dukungan anggaran/pendanaan dan personil/SDM Aparatur yang kompeten untuk menjalankan kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Camat.

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini karena pelimpahan kewenangan ke Kecamatan sudah dilimpahkan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Lingkup Kabupaten Pangandaran. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tahun berikutnya adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2015 dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran 14 Misi ke-1 RPJMD :

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan

Sasaran Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Pertama Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Bersih dan Melayani”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan dapat dilihat melalui

indikator kinerja utama berupa panjang infrastuktur desa dalam kondisi baik. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Panjang infrastruktur desa yang baik	%	3	n/a	-	3	25	833,33	22	113,6
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-	833,33			113,6	-

Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan dengan indikator panjang infrastruktur desa yang baik pada tahun 2017 targetnya sebesar 3% sedangkan realisasinya tidak bisa dihitung karena tidak tersedia data.

Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Karena tidak tersedia data, maka tidak bisa dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD.

Peningkatan infrastruktur perdesaan didanai dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Bantuan APBD Kabupaten), Program Peningkatan Infrastruktur Desa (Bantuan APBD Provinsi), dan Pendapatan Asli Desa.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah:

1. Belum tersedianya database mengenai jumlah sarana dan prasarana (infrastruktur) perdesaan seluruhnya;
2. Belum dilakukan dan dilaporkannya inventarisasi hasil pekerjaan infrastruktur perdesaan;

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah:

1. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana (infrastruktur) perdesaan untuk membangun database infrastruktur perdesaan yang lebih akurat;
2. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa yang ada untuk memenuhi kebutuhan data infrastruktur desa yang langsung dapat dimonitor oleh dinas teknis;

Capaian Misi ini didukung oleh 35 (tiga puluh lima) program yang tersebar di beberapa SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34,562,389,125.00 dan realisasi sebesar Rp. 32,115,551,605.00 (92,92%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program Pendukung Misi ke-1

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,574,558,000.00	1,459,836,573.00	92.71
2	Program Pengembangan Data/Informasi	191,248,000.00	190,959,500.00	99.85
3	Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media	290,600,000.00	278,563,000.00	95.86
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,423,900,000.00	2,423,165,000.00	99.97
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	216,495,000.00	195,260,692.00	90.19
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,229,269,000.00	1,222,110,874.00	99.42
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	38,328,000.00	35,627,400.00	92.95
8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	32,360,000.00	27,864,700.00	86.11
9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	85,956,000.00	84,149,750.00	97.90
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,028,400,000.00	850,507,508.00	82.70
11	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,514,450.00	100,514,450.00	100.00
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	23,717,000.00	23,218,135.00	97.90
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	143,120,000.00	139,920,000.00	97.76
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	221,768,700.00	195,595,397.00	88.20
15	Program Pendidikan Politik Masyarakat	54,774,000.00	50,417,100.00	92.05
16	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	399,181,000.00	398,473,000.00	99.82
17	Program Pendidikan Kedinasan	96,611,000.00	96,369,200.00	99.75
18	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	526,377,500.00	515,000,306.00	97.84
19	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	371,663,000.00	335,319,123.00	90.22
20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	401,229,000.00	391,655,454.00	97.61
21	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	327,900,000.00	315,654,654.00	96.27
22	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	299,271,000.00	143,197,400.00	47.85
23	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	380,235,000.00	363,357,974.00	95.56
24	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,987,345,000.00	5,266,780,665.00	87.97
25	Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	116,598,000.00	116,598,000.00	100.00
26	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	535,466,700.00	529,462,800.00	98.88
27	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	174,917,000.00	165,974,764.00	94.89
28	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5,391,558,600.00	5,063,698,907.00	93.92
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,120,100,000.00	982,685,020.00	87.73
30	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	107,865,000.00	102,179,200.00	94.73

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
31	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4,354,505,668.00	4,154,846,905.00	95.41
32	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,606,699,507.00	4,217,097,488.00	91.54
33	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	27,085,000.00	27,085,000.00	100.00
34	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,667,240,000.00	1,637,509,622.00	98.22
35	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	15,533,000.00	14,896,044.00	95.90
JUMLAH		34,562,389,125.00	32,115,551,605.00	92.92

Sasaran 17 Misi ke-2 RPJMD:
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten

Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kedua Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan”. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah Rencana Tata Ruang. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah Rencana Tata Ruang	Dokumen	4	0	0	1	0	0	14	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					0				0	0

Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten dapat dilihat melalui satu indikator yang diperjanjikan yaitu Jumlah Rencana Tata Ruang dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi sebanyak 0 dokumen serta capaiannya 0%. Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan penurunan atau peningkatannya dari tahun 2016 karena satu indikator ini merupakan indikator baru. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 0%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 baru pada tahap proses rekomendasi persetujuan substansi dari Gubernur dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Berdasarkan Permen PU Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya bahwa setiap Raperda RTRW Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi dari Gubernur dan persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Kegiatan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 belum pada tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah karena proses persetujuan substansi Raperda RTRW pada tahun 2017 baru mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi Raperda RTRW dari Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya proses yang ditempuh untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.

2. Penyusunan RDTR Kecamatan Pangandaran pada tahun 2017 tidak dilanjutkan/dibatalkan dengan pertimbangan menunggu pengesahan Raperda RTRW Kabupaten Pangandaran. Apabila pekerjaan RDTR Kecamatan Pangandaran tetap dilaksanakan dikhawatirkan tidak sejalan dengan arahan yang ada di RTRW Kabupaten Pangandaran, karena RTRW Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sedang dalam proses persetujuan substansi dari Gubernur, sehingga ada kemungkinan perubahan dari substansi Raperda RTRW Kabupaten Pangandaran.

**Sasaran 19 Misi ke-2 RPJMD :
Terpetakannya Rencana Pengembangan Wilayah yang Baik**

Sasaran Terpetakannya Rencana Pengembangan Wilayah yang Baik merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kedua Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan”. Capaian kinerja sasaran terpetakannya rencana pengembangan wilayah yang baik dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Terbentuknya Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Terpetakannya Rencana Pengembangan
Wilayah yang Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Terbentuknya Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Dokumen	1	0	0	7	0	0	10	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					0			0		0

Sasaran Terpetakannya Rencana Pengembangan Wilayah yang Baik dapat dilihat melalui satu indikator yang diperjanjikan yaitu Terbentuknya Wilayah Strategis Cepat Tumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan realisasi sebanyak 0 dokumen serta capaiannya 0%. Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan penurunan atau peningkatannya dari tahun 2016 karena satu indikator ini merupakan indikator baru. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 0%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini karena kegiatan pembentukan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada tahun anggaran 2017 tidak teranggarkan, baru pada tahap sosialisasi dan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Provinsi. Rencananya kegiatan tersebut akan direalisasikan pada tahun anggaran 2018.

Sasaran 21 Misi ke-2 RPJMD :
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kedua Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan”. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Terjaganya Kualitas Air, Tanah, dan Udara di Bawah Batas Baku Mutu. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Terjaganya kualitas air, tanah, dan udara di bawah batas baku mutu	%	2	22,35	1.117,5	49	20,83	42,51	100	43,18
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					1.117,5			42,51		43,18

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup tahun 2017 dapat dilihat melalui satu indikator yang diperjanjikan yaitu terjaganya kualitas air, tanah, dan udara di bawah batas baku mutu. Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan penurunan atau peningkatannya dari tahun 2016 karena satu indikator ini merupakan indikator baru. Capaian kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 22,35%.

Target dan realisasi kinerja sasaran ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah lokasi atau titik yang kualitas air dan udaranya di bawah batas baku mutu}}{\text{Jumlah lokasi atau titik seluruhnya}} \times 100$$

Adapun realisasi kinerja sebesar 20,83% diperoleh dari :

Jumlah lokasi/titik yang kualitas air dan udaranya dibawah baku mutu = 5

Jumlah lokasi/titik seluruhnya = 24

$$= \frac{5}{24} \times 100 = 20,83\%$$

Adapun data pendukung yang dapat ditampilkan terkait dengan baku mutu lingkungan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Lokasi atau Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan
Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Objek yang dipantau	Baku Mutu		Parameter Melebihi Baku Mutu	Status (PP 82 Tahun 2001, Kelas II)
		Memenuhi	Tidak		
1	Air Sungai Citonjong (PT.PECU)		V	TDS, BOD, COD	Tercemar ringan
2	Air Sungai Cipeuteuy Hulu		V	BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
3	Air Sungai Cipeuteuy Tengah		V	TDS, BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
4	Air Sungai Cipeuteuy Hilir		V	TDS, BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
5	Air Sungai Cibeureum Hulu		V	BOD, Cd, Pb, P	Tercemar ringan
6	Air Sungai Cibeureum Tengah		V	BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
7	Air Sungai Cibeureum Hilir		V	BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
8	Air Sungai Ciroyom Hulu		V	BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
9	Air Sungai Ciroyom Tengah		V	BOD, Cd, Zn, Pb, P	Tercemar ringan
10	Air Sungai Ciroyom Hilir		V	BOD, Zn, Pb, P	Tercemar ringan

11	Air Sungai Ciseel Hulu		V	TSS, BOD, COD, NO3, NO2	Tercemar ringan
12	Air Sungai Ciseel Tengah		V	TSS, BOD, COD, NO3, NO2	Tercemar ringan
13	Air Sungai Ciseel Hilir		V	TSS, BOD, COD, NO3, NO2	Tercemar ringan
14	Air Laut Pantai Barat Pangandaran		V	Kecerahan, Salinitas, NO3, Coliform	-
15	Air Laut Pantai Timur Pangandaran		V	Kecerahan, Salinitas, PO4, NO3	-
16	Air Laut Pantai Batukaras		V	Kecerahan, Salinitas, NO3, Coliform	-
17	Udara Ambien Terminal Cijulang		V	Kebisingan	-
18	Udara Ambien Kantor SETDA	V		-	-
19	Udara Ambien Pemukiman Cibenda		V	Kebisingan	-
20	Udara Ambien PT. PECU Sukaresik	V		-	-
21	Udara Ambien TPA Purbahayu	V		-	-
22	Udara Ambien Pantai Pangandaran	V		-	-
23	Udara Ambien Bundaran Ikan Marlin		V	Kebisingan	-
24	Udara Ambien Pemukiman Sindangwangi	V		-	-
Jumlah		5	19		

Berdasarkan data tersebut di atas rata-rata kualitas air dan udara tidak mencapai target Penyebab dari kondisi ini, yaitu:

Pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan usaha dan warga masyarakat pada umumnya belum memiliki pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas kelestarian lingkungan hidup.

Solusi yang akan dilakukan untuk kondisi ini, yaitu:

1. Melakukan pembinaan kepada aparat kecamatan, pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan usaha dan warga masyarakat;
2. Melakukan pengawasan kepada pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan usaha yang telah maupun belum memiliki Dokumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.18
Hasil Pemantaun Kualitas Air Sungai di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No	Objek yang dipantau	Jumlah Indeks Pencemaran	Status
1	Sungai Cikidang Hulu	0.793	Memenuhi baku mutu
2	Sungai Cikidang Tengah	0.436	Memenuhi baku mutu
3	Sungai Cikidang Hilir	1.302	Tercemar ringan
4	Sungai Cijalu Hulu	0.150	Memenuhi baku mutu
5	Sungai Cijalu Tengah	0.660	Memenuhi baku mutu
6	Sungai Cijalu Hilir	0.876	Memenuhi baku mutu
7	Sungai Ciwayang Hulu	0.442	Memenuhi baku mutu
8	Sungai Ciwayang Tengah	0.658	Memenuhi baku mutu
9	Sungai Ciwayang Hilir	0.520	Memenuhi baku mutu

No	Objek yang dipantau	Jumlah Indeks Pencemaran	Status
10	Sungai Cijulang Hulu	1.022	Tercemar ringan
11	Sungai Cijulang Tengah	0.459	Memenuhi baku mutu
12	Sungai Cijulang Hilir	0.690	Memenuhi baku mutu
13	Sungai Citonjong Hulu	0.698	Memenuhi baku mutu
14	Sungai Citonjong Tengah	0.707	Memenuhi baku mutu
15	Sungai Citonjong Hilir	2.943	Tercemar ringan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2017

Tabel 3.19
Hasil Pemantaun Kualitas Air Laut di Kab. Pangandaran
Tahun 2016

No	Objek yang dipantau	Status
1	Pantai Barat I	Tercemar ringan
2	Pantai Barat II	Tercemar ringan
3	Pantai Barat III	Tercemar ringan
4	Pantai Timur I	Tercemar ringan
5	Pantai Timur II	Tercemar ringan
6	Pantai Batukaras	Tercemar ringan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2017

Walaupun secara rata-rata kualitas air dan udara mencapai target di bawah baku mutu tetapi khusus untuk kualitas air laut masih di atas batas baku mutu (tercemar ringan). Penyebab dari kondisi ini, yaitu:

1. Limbah hotel, tempat umum dan rumah tangga domestik yang dibuang ke laut;
2. Belum terdapatnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Upaya yang akan dilakukan untuk kondisi ini, yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha;
2. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal pada tahun 2018;

Sasaran 21 Misi ke-2 RPJMD :
Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau

Sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kedua Kabupaten Pangandaran “Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan”. Capaian kinerja sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Luas lahan yang direhabilitasi dan Cakupan Pelayanan Pengelolaan

Persampahan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	0	13	>100	5	0	0	30,4	42,76
2	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	%	30	23,37	77,9	45	17,61	39,13	65	58,5
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					88,90					40,86

Capaian kinerja sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau melalui indikator Luas Lahan yang Direhabilitasi dan Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan tidak bisa dibandingkan penurunan atau peningkatannya dari tahun 2016 karena indikator ini merupakan indikator baru.

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian kinerja sasaran Kabupaten Pangandaran Bersih dan Hijau melalui indikator Luas Lahan yang Direhabilitasi dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan karena pada tahun 2017 tidak dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini mencapai 42,76%.

Kendala yang dihadapi pada pencapaian target yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran belum mempunyai peraturan tentang penetapan lahan kritis;
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sehingga ada penyusunan skala prioritas kegiatan.

Solusi :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Kab. Pangandaran, Kantor Perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Jabar di Kabupaten Pangandaran, dan Bagian Hukum Setda Kab.Pangandaran;
2. Melakukan pembinaan kepada aparat kecamatan, pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan usaha dan warga masyarakat agar dapat mengelola, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan;
3. Melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang telah maupun belum memiliki Dokumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan, dengan target yang

ditentukan 45% dan realisasinya hanya sebesar 17,61%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini sudah mencapai 58,5%.

Pada Tahun 2017 terkait pelayanan pengelolaan persampahan target yang ditentukan sebesar 30% dan realisasi sebesar 23,37% sehingga capaian target sebesar 77,90%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 38,95%.

Adapun penjelasan atas realisasi tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21
Data Capaian Penanganan Sampah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	Produksi Sampah (m³)	Ket.
A.	Yang tidak ditangani sampahnya			
1.	Kecamatan Cimerak	46.849	32.755,54	
2.	Kecamatan Cigugur	21.812	15.584,28	
3.	Kecamatan Langkaplancar	50.494	35.085,49	
4.	Kecamatan Mangunjaya	32.632	21.246,30	
	Sub Jumlah A	151.787	104.671,61	
B.	Yang ditangani sampahnya			
1.	Kecamatan Cijulang	26.996	19.411,91	
2.	Kecamatan Parigi	43.448	31.279,09	
3.	Kecamatan Sidamulih	27.674	19.936,02	
4.	Kecamatan Pangandaran	54.429	39.857,40	
5.	Kecamatan Kalipucang	37.418	26.880,50	
6.	Kecamatan Padaherang	67.264	45.323,24	
	Sub Jumlah B	257.229	182.688,16	
	JUMLAH	409.016	287.323,77	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran 2017

Tabel 3.22
Daftar Penanganan Sampah Kab. Pangandaran

N o	Kecamatan	Yang Ditangani (M3)	Ket.
1.	Kecamatan Cijulang	4.392,00	
2.	Kecamatan Parigi	3.266,92	
3.	Kecamatan Sidamulih	465,55	
4.	Kecamatan Pangandaran	32.359,16	
5.	Kecamatan Kalipucang	8.827,19	
6.	Kecamatan Padaherang	1.298,57	
	JUMLAH	50.609,39	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran 2017

Target dan realisasi kinerja sasaran ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$$

Adapun realisasi kinerja sebesar 17,61% diperoleh dari :

Volume produksi sampah = 287.323,77

Jumlah lokasi/titik seluruhnya = 50.609,77

$$= \frac{50.609,39}{287.323,77} \times 100 = 17.61\%$$

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan;
2. TPA belum di bangun dan masih kurang minimal 3 TPA;
3. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam membuang sampah pada tempatnya;
4. Masyarakat masih rendah kesadarannya tentang membayar retribusi sampah sehingga tidak mau ikut menjadi konsumen sampah;
5. Belum ada sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut menjadi konsumen persampahan;
6. Belum adanya bank sampah;
7. Belum adanya TPS3R untuk mengurai timbunan sampah;
8. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah;
9. Biaya operasional penanganan sampah masih rendah;
10. Belum mempunyai alat berat untuk penanganan sampah di TPA.

Solusi :

1. Tercukupinya Sarana dan Prasarana Persampahan;
2. TPA dibangun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang yaitu TPA yang representatif, TPA terasering bukan TPA open dumping dan perlu adanya penambahan TPA Minimal 3 TPA yang memadai;
3. Mengadakan sosialisasi tentang kesadaran membuang sampah dan membayar retribusi persampahan kepada seluruh oknum masyarakat;
4. Adanya dukungan program penanganan sampah dari seluruh SKPD sehingga sanksi dapat diberlakukan bagi yang melanggar peraturan persampahan;
5. Dibentuk bank sampah di tingkat RW dan dibentuk koordinator bank sampah di setiap dusun juga di bentuk kepengurusan pengelolaan sampah di desa;
6. Dibangun TPS 3R di tingkat Dusun di seluruh Kecamatan;
7. Biaya operasional penanganan sampah yang memadai;
8. Tersedianya alat berat di TPA.

Berikut gambar perencanaan program untuk tahun yang akan datang yang terdapat dalam misi ke-2:

Gambar 3.1
Alun-alun Parigi



Gambar 3.2
Lapang Merdeka



Gambar 3.3
PIAMARI



Gambar 3.4
Kios Eks Hotel Star Meridian



Gambar 3.5
Kios Eks Hotel Pananjungsari



Gambar 3.6
Ruang Terbuka Hijau dan Taman Rekreasi



Capaian misi kedua ini didukung oleh 11 (sebelas) Program dengan jumlah anggaran Rp. 27,403,074,900.00 dengan realisasi sebesar Rp. 26,690,455,513.00 (97,39%). Rincian program berikut anggaran dan realisasinya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Program Pendukung Misi ke-2

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18,012,839,000.00	17,666,532,800.00	98.08
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2,795,811,000.00	2,704,671,600.00	96.74
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	84,935,000.00	34,935,000.00	41.13
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3,180,946,000.00	3,047,340,568.00	95.80
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	337,537,500.00	336,622,500.00	99.73
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20,114,400.00	11,473,300.00	57.04
7	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	305,850,000.00	302,482,000.00	98.90
8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1,994,087,000.00	1,946,173,701.00	97.60
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	111,100,000.00	106,420,000.00	95.79
10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	75,000,000.00	73,571,100.00	98.09
11	Program Perencanaan Tata Ruang	484,855,000.00	460,232,944.00	94.92
JUMLAH		27,403,074,900.00	26,690,455,513.00	97.39949

Sasaran 22 Misi ke-3 RPJMD :
Tersedianya Jalan yang Menghubungkan Antar Obyek Wisata

Sasaran Tersedianya Jalan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Tersedianya Jalan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Luas Jalan dan Jembatan yang Dibangun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Jalan yang Menghubungkan
Antar Obyek Wisata Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Luas Jalan dan Jembatan yang dibangun	%	8,40	16,24	193,28	10,18	71,02	697,6	96	90,89
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					193,28			697,6		90,89

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Jalan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017, indikator ini ditargetkan sebesar 10,18% dengan realisasi sebesar 71,02%, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 697,6%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini sudah mencapai 90,89%.

Jumlah Luas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan antar obyek wisata di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sebesar 70,75 Km, dan luas jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 50,246 Km, sehingga persentase luas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar obyek wisata di Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2017 adalah $\frac{50,246}{70,75} \times 100 = 71,02\%$. Rincian luas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar obyek wisata di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Tabel 3.25
Jalan dan Jembatan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi		
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang
1	1	Cimulungan	Bojong - Cintaratu	6,00	4,00	2,00
	2	Sal. Citumbang		2,60	5,00	1,00
	3	Cikamaju		2,40	4,50	1,00
	4	Bojong		20,00	4,00	1,00
2	1	Cisitu	Cibatu - Ciwilis	3,80	5,00	1,00
	2	Cimandala		5,50	5,00	1,00
	3	Ciparay		3,40	5,50	1,00
	4	Curuk Bilik		20,00	5,00	2,00
	5	Cilumar		5,00	5,60	1,00
	6	Ciharuman		12,50	8,00	1,00
	7	Cihikeu		4,50	2,50	1,00
3	1	Cipisitan	Cibatu - Sp. BJ Kondang	3,00	4,50	1,00

	2	Cijurago V		24,00	4,50	2,00
4	1	Kalen Buaya II	Cikembulan - Pananjung	8,40	4,50	1,00
	2	Kalen Buaya III		4,00	4,50	1,00
	3	Bulak Laut I		3,00	4,50	1,00
	4	Bulak Laut II		3,00	4,50	1,00
	5	Cikembulan II		3,00	4,50	1,00
	6	Cikembulan I Japuh		12,00	6,00	1,00
5	1	Gembor (Cigede)	Cikembulan - Kalijati	6,00	6,00	1,00
	2	Kalen Wades		24,00	3,50	3,00
	3	Balembeng		9,00	6,00	1,00
	4	Cibodas I		40,00	4,00	1,00
	5	Cibodas II		5,00	4,50	1,00
	6	Muara Tiga		18,60	5,00	3,00
	7	Cihonje		22,00	5,00	2,00
	8	Cimuara		6,00	5,00	1,00
6	1	Tangkolan	Cikohkol - Pangleseran	5,00	7,00	1,00
	2	Ciwates		16,50	6,00	2,00
	3	Cikarang Ampel		5,00	7,00	1,00
	4	Karangpucung		4,50	5,50	1,00
	5	Citabelang		8,00	4,50	1,00
	6	Cikadu		8,00	4,50	1,00
7	1	Cihideung	Cukup - Karangkamiri	5,00	3,50	1,00
	2	Cicepek		7,50	5,00	1,00
8	1	Cibening	Cimerak - Sindangsari	3,00	5,50	1,00
9	1	Cipeundeuy	Ciwangkal - Pagerbumi	3,00	4,40	1,00
	2	Cikuya		46,00	4,00	3,00
	3	Cigugur		3,50	4,50	1,00
10	1	Cisamping	Curug - Batukaras	5,00	4,50	1,00
11	1	Cisitu	Jadikarya - Karangkamiri	14,00	4,50	2,00
	2	Bulak Jemer		15,10	5,00	1,00
12	1	Cikadu	Kertamukti - Cikondang	6,50	5,00	1,00
13	1	Bunjul	Padaherang - Panyutran	10,00	5,00	1,00
14	1	Cibuntu	Pangleseran - Cibatu	9,00	4,50	3,00
	2	Cipatat		2,00	4,00	1,00
	3	Ciwayang		15,00	5,00	1,00

	4	Karangbayawa k		3,00	4,50	1,00
	5	Ciburial		3,00	4,50	1,00
	6	Cipicung		3,00	4,50	1,00
	7	Cireundeu		6,00	6,50	1,00
	8	Cinambo		8,00	8,00	1,00
	9	Cidukuh I		3,00	4,50	1,00
	10	Cidukuh II		3,00	4,00	1,00
	11	Cikapinis		4,50	4,50	1,00
	12	Jurago I		5,00	5,00	1,00
	13	Jurago II		24,00	4,50	2,00
15	1	Cikencreng	Pareang - Cikondang	16,50	6,00	1,00
	2	Cibening Udik		26,00	6,00	2,00
16	1	Cijalu	Parigi - Pangleseran	24,00	8,00	2,00
	2	Cibarengkok		7,00	5,50	1,00
17	1	S. Cikaso	Sindanghayu - Mangunjaya	15,60	7,90	1,00
	2	Jemb. Irigasi		5,00	3,50	1,00
18	1	Cimedang I	Sindangsari - Cimedang	16,00	7,00	1,00
	2	Cimedang II		60,00	7,00	2,00
	1	Cipeuteuy	Legokjawa - Madasari	75,00	4,00	1,00
	2	Cidadap		40,00	4,00	1,00
	3	Madasari		23,00	6,00	1,00
	1	Ciawitali I	Cijulang - Cibanten	20,00	4,00	1,00
	2	Ciawitali II		8,00	4,00	1,00
	1	Kalenceri	Parigi - Babakan	21,00	4,00	1,00
	1	Bojongmalang	Parigi - Bojongmalang	12,00	4,00	1,00
	1	Cikiray	Parigi - Bojongsalawe	10,00	6,00	1,00
	2	Bojongsalawe		60,00	4,50	3,00
19	1	Cipari	Sukaresik - Sidamulih	3,50	2,60	1,00
	2	Cibungur		3,20	5,00	1,00
	3	Cimanggu		6,00	3,00	1,00
	4	Guha Bungbas		3,00	2,50	1,00
	5	Cibeureum		2,00	5,00	1,00
	6	Kedunglangu		5,00	3,50	1,00
	7	Cihonje		4,00	4,00	1,00
	8	Balengbeng		5,00	4,50	1,00
				1001,6		

Sumber : DPUTRPRKP, 2017

Gambar 3.7
Jalan dan Jembatan yang Menghubungkan antar Obyek Wisata



Sumber : DISPUHUBKOMINFO, 2017

**Sasaran 23 Misi ke-3 RPJMD:
Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi**

Sasaran Meningkatkan Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Capaian Indikator Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Km	25	64,76	259,04	25	181	724	235	104,6
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					259,04					104,6

Capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan mengalami peningkatan dari tahun 2016. Dari target 2017 sebesar 25 km terealisasi 181 km. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini sudah mencapai 104,6%.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran sangat penting khususnya untuk sarana transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Pangandaran terdapat panjang jalan menurut

status/kelas jalan yang ada.

Kondisi jalan yang ada saat ini di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2017 yaitu :



Sumber : DPUTRPRKP 2017



Sumber : DPUTRPRKP 2017

Gambar 3.10
Jalan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017



Sumber : DPUTRPRKP 2017

Sasaran 25 Misi ke-3 RPJMD :
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana
Dasar Permukiman

Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa tersedianya saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan
Prasarana Dasar Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Tersedianya Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik	M	0	1.380	>100	150	734.242	489,5	750	>100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					>100			489,5		>100

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator

yang diperjanjikan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan menjadi 734,242 dengan satuan meter (M). Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini mencapai >100%.

Data saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik di tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.28
Realisasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik
Tahun 2017

No	Lokasi	Drainase & gorong-gorong	
		Panjang	Lebar
		(m)	(m)
1	Kecamatan Cigugur		
a	Desa Harumandala	3500	0,5
b	Desa Pagerbumi	3000	0,5
c	Desa Kertajaya	3000	0,5
d	Desa Bunisari	1800	0,5
e	Desa Campaka	2700	0,5
f	Desa Cimindi	2500	0,5
g	Desa Cigugur	2300	0,5
2	Kecamatan Cijulang		
a	Desa Cijulang	300	2,5
b	Desa Batukaras	1800	0,6
c	Desa Kertayasa	120	0,5
d	Desa Cibanten	100	0,5
e	Desa Margacinta	3235	0,5
f	Desa Kondangjajar	6000	2,5
g	Desa Ciakar	1500	1,5
3	Kecamatan Cimerak		
a	Desa Sukajaya	26000	0,5
b	Desa Kertaharja	129000	
c	Desa Legokjawa	2300	0,6
d	Desa Limusgede	14062	0,6
e	Desa Mekarsari	150	
f	Desa Batumalang	5000	0,6
g	Desa Kertamukti	34000	
h	Desa Masawah	8000	0,5
i	Desa Ciparanti	500	
j	Desa Cimerak	17000	1
k	Desa Sindangsari	400	0,9
4	Kecamatan Kalipucang		
a	Desa Tunggilis	1400	3
		500	2,5
b	Desa Ciparakan	18000	0,5
c	Desa Emplak	2400	0,5
d	Desa Putrapinggan		
e	Desa Banjarharja	31900	0,5
f	Desa Kalipucang	175	0,6
		5000	
		200	0,9

g	Desa Pamotan	2500	0,5
h	Desa Bagolo	4383	2,5
		2700	3
5	Kecamatan Langkaplancar		
a	Desa Pangkalan	546	0,6
b	Desa Cimanggu	16000	0,6
c	Desa Jadimulya	15200	1,2
d	Desa Karangkamiri	7640	0,5
e	Desa Cisarua	5000	0,5
f	Desa Bojongkondang	8000	1,6
g	Desa Bangunjaya	13886	
h	Desa Bungurraya	5630	1
i	Desa Bojong	600	0,5
j	Desa Bangunkarya	19050	0,6
k	Desa Jayasari	3500	
l	Desa Sukamulya	21000	1
m	Desa Jadikarya	5000	2
n	Desa Langkaplancar	33182	0,5
o	Desa Mekarwangi		
6	Kecamatan Mangunjaya		
a	Desa Sukamaju	2500	0,8
b	Desa Kertajaya	7000	0,8
c	Desa Mangunjaya	10950	0,8
d	Desa Jangraga	18252	0,8
e	Desa Sindangjaya	33250	0,8
7	Kecamatan Padaherang		
a	Desa Kedungwuluh		
b	Desa Padaherang	546	0,6
c	Desa Cibogo	248	0,8
d	Desa Panyutran	60000	1
e	Desa Karangsari	400	0,5
f	Desa Sindangwangi	510	0,5
g	Desa Paledah		
h	Desa Karangpawitan	5000	
i	Desa Maruyungsari	247	0,5
j	Desa Sukanagara	2000	1
k	Desa Pasirgeulis	2000	1
l	Desa Karangmulya	1500	1,5
m	Desa Bojongsari	22230	0,5
8	Kecamatan Parigi		
a	Desa Cibenda	240	1
b	Desa Cintaratu	7025	1
c	Desa Bojong	1500	1
d	Desa Parakanmanggu	1700	1,5
e	Desa Karangjaladri	6000	1
f	Desa Selasari	7000	1
g	Desa Cintakarya	9205	1
h	Desa Parigi	5000	1,5
i	Desa Ciliang	17000	1
j	Desa Karangbenda	8200	1

9	Kecamatan Pangandaran	10740	
a	Desa Babakan		
b	Desa Pagergunung		
c	Desa Pananjung		
d	Desa Pangandaran		
e	Desa Purbahayu		
f	Desa Sidomulyo		
g	Desa Sukahurip		
h	Desa Wonoharjo		
10	Kecamatan Sidamulih	2340	
a	Desa Cikalong		
b	Desa Cikembulan		
c	Desa Kalijati		
d	Desa Kersaratu		
e	Desa Pajaten		
f	Desa Sidamulih		
g	Desa Sukaresik		

Sumber : DPUTRPRKP 2017

Gambar 3.11
Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik
Tahun 2017



Sumber : DPUTRPRKP 2017

Sasaran 26 misi ke-3 RPJM :
Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung Yang Memiliki Ketahanan Dan Berdaya Saing

Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang
Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Lokasi	1	2	200	0	7	>100	10	90
2	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa wisata	0	0	0	0	0	0	20	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100			400		45

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing Tahun 2017 melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu jumlah obyek wisata yang dikembangkan dan jumlah desa wisata yang dikembangkan. Target kinerja untuk indikator jumlah obyek wisata yang dikembangkan sebanyak 0 obyek wisata dan realisasinya 7 obyek wisata sehingga capaiannya sebesar >100%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya sudah mencapai 90%, sedangkan untuk indikator jumlah desa wisata yang dikembangkan target pada tahun 2017 sebanyak 0 desa dan realisasinya 0 desa sehingga capaiannya 0%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya baru mencapai 0%.

Data obyek wisata yang dikembangkan pada tahun 2017 yaitu:

Tabel 3.30
Data Obyek Wisata yang Dikembangkan pada Tahun 2017

No	Lokasi Obyek Wisata	Kecamatan
1	Green Canyon Dermaga	Cijulang
2	Pantai Madasari	Cimerak
3	Pantai Karapyak	Kalipucang
4	Pantai Batukaras	Cimerak
5	Kawasan Kampung Turis	Pangandaran
6	Taman Goa Donan	Kalipucang
7	Batu Hiu	Parigi

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2017

Gambar 3.12
Penataan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Situ Cisamping



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2017

Sasaran 27 Misi ke-3 RPJMD :
Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas

Sasaran Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Cakupan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	persen	0	0	0	10	20,58	205,8	90	22,86
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					0			205,8		22,86

Capaian kinerja sasaran Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pangandaran Kabupaten Cerdas Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 20,58%, karena di tahun 2016

sebelumnya indikator ini tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini mencapai 22,86%.

Data SKPD yang sudah membangun infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Data SKPD Yang Membangun Infrastruktur TIK

NO	SKPD	Fasilitas Pelayanan TIK	
		Ada	Tidak Ada
1	Sekretariat DPRD	√	
2	Sekretariat Daerah	√	
3	SATPOL PP		√
4	INSPEKTORAT		√
DINAS			
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	√	
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		√
8	Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
9	Dinas Kesehatan		√
10	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	√	
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		√
12	Dinas Pertanian		√
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan		√
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		√
15	Dinas Perhubungan		√
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		√
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√
18	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√
19	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi		√
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		√
BADAN			
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√
KANTOR			
24	KESBANGPOL		√
KECAMATAN			
25	Kecamatan Pangandaran		√
26	Kecamatan Cimerak		√
27	Kecamatan Cijulang		√
28	Kecamatan Parigi		√
29	Kecamatan Mangunjaya		√
30	Kecamatan Padaherang		√

31	Kecamatan Sidamulih		√
32	Kecamatan Cigugur		√
33	Kecamatan Langkaplancar		√
34	Kecamatan Kalipucang		√
Jumlah		7	27

Sumber : Diskominfo 2017

Penjelasan cara pengkuran :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang membangun infrastruktur TIK (7)}}{\text{Jumlah SKPD Seluruhnya(34)}} \times 100 = 20,58\%$$

Jadi, realisasinya sebesar 20,58%.

**Sasaran 28 Misi ke-3 RPJMD :
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan**

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan	persen	0	7,41	>100	10	52,94	529,4	80	75,4
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					>100			529,4		75,4

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan menjadi 52,94% dengan target 10%. Realisasi kinerja untuk indikator jumlah Sarana dan prasarana pusat pemerintahan dengan target akhir RPJMD capaiannya mencapai 75,4%.

Realisasi sebesar 52,94% diperoleh dari data sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah gedung SKPD yang dibangun (18)}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya (34)}} \times 100 = 52,94\%$$

Tabel 3.34
Tabel Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan

NO	SKPD	GEDUNG SKPD	
		Milik Pemerintah	Sewa
1	Sekretariat DPRD	√	
2	Sekretariat Daerah	√	
3	SATPOL PP		√
4	INSPEKTORAT		√
DINAS			
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		√
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	√	
8	Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
9	Dinas Kesehatan	√	
10	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	√	
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	√	
12	Dinas Pertanian		√
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan		√
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		√
15	Dinas Perhubungan		√
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		√
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√
18	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√
19	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi		√
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		√
BADAN			
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√
KANTOR			
24	KESBANGPOL		√
KECAMATAN			
25	Kecamatan Pangandaran	√	
26	Kecamatan Cimerak	√	
27	Kecamatan Cijulang	√	
28	Kecamatan Parigi	√	
29	Kecamatan Mangunjaya	√	

30	Kecamatan Padaherang	√	
31	Kecamatan Sidamulih	√	
32	Kecamatan Cigugur	√	
33	Kecamatan Langkaplancar	√	
34	Kecamatan Kalipucang	√	
Jumlah		18	16

Sumber : DPUTRPRKP 2017

Adapun contoh gedung SKPD yang dibangun yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 3.13
Pembangunan Gedung Setda dan Setwan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017



Gedung Sekretariat DPRD

Gedung Sekretariat Daerah

Sasaran 29 Misi ke-3 RPJMD :
Terbangunnya Gedung Rumah Sakit

Sasaran Terbangunnya Gedung Rumah Sakit merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Terbangunnya Gedung Rumah Sakit dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya Gedung Rumah Sakit
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah	Unit	0	0	0	1	0	0	1	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					0			0		0

Capaian kinerja sasaran Terbangunnya Gedung Rumah Sakit Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu masih sama dengan realisasi 0%. Indikator Terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2017 targetnya adalah 0 unit dengan realisasi sebanyak 0 unit sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini mencapai 0%. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ditargetkan akan berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan RPJMD, akan tetapi dikarenakan terbatasnya anggaran sampai 2017 akhir tahun pun masih belum terealisasi. Dari tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sudah berupaya dengan cara menyusun Detail Engineering Desain (DED) Rumah Sakit Umum Daerah dan membuat dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rumah Sakit Umum Daerah.

Gambar rencana pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran sesuai DED sebagai berikut:

Gambar 3.14
Rencana Pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran Sesuai DED



Sumber : BAPPEDA Kab. Pangandaran

Sasaran 30 Misi ke-3 RPJM:
Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu

Sasaran Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Sasaran Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah Puskesmas yang Dibangun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit	0	2	>100	7	9	128,57	15	73,33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					>100			128,57		73,33

Capaian kinerja sasaran Terbangunnya Gedung Puskesmas dan Pustu Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebelumnya mengalami peningkatan. Indikator Jumlah Puskesmas yang dibangun ditargetkan sebanyak 7 unit dengan realisasi 9 unit sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 128,57%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini sudah mencapai 73,33%.

Pada tahun 2017 Kabupaten Pangandaran melakukan pembangunan 9 gedung Puskesmas di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3.37
Data Pembangunan Fisik Puskesmas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	RENCANA KINERJA s.d 31 Desember 2017	
					KELUARAN (output)	HASIL (outcome)
A	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya					
1	Pembangunan Puskesmas Kalipucang	Kec. Kalipucang	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
2	Pembangunan Puskesmas Legokjawa	Kec. Cimerak	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
3	Pembangunan dan Renovasi Puskesmas Cimerak	Kec. Cimerak	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
4	Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas DTP Parigi	Kec. Parigi	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
5	Peningkatan Fungsi Puskesmas Langkaplancar	Kec. Langkaplancar	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
6	Pembangunan Puskesmas DTP Padaherang	Kec. Padaherang	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
7	Pembangunan Puskesmas Pangandaran	Kec. Pangandaran	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
8	Pembangunan Puskesmas Cigugur	Kec. Cigugur	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas
9	Pembangunan Puskesmas	Kec. Sidamulih	1 unit	BANPROV	1 Puskesmas	1 Puskesmas

	Cikembulan (Lanjutan)					
B	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata					
1	Pembangunan RS Pangandaran	Kec. Sidamulih	1 unit	APBD KAB	1 RSUD	1 RSUD
2	Pembangunan Rumah Sakit	Kab. Pangandaran	1 unit	APBD KAB.	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran 2017

Gambar 3.15
Contoh Pembangunan Fisik Puskesmas Cikembulan dan Puskesmas Parigi Tahun 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran 2017

Sasaran 34 Misi ke-3 RPJM:
Terwujudnya Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih Yang Berkualitas dan Merata

Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Ketiga Kabupaten Pangandaran “Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas”. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah untuk Masyarakat. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih
yang Berkualitas dan Merata Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat	persen	10	29,03	290,3	15	50,54	336,93	95	83,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					290,30			336,93		83,75

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun 2016. Indikator Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk masyarakat ditargetkan sebesar 15% dengan realisasi sebesar 50,54% sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 336,93%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 83,75%.

Data realisasi sebesar 50,54% diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah tersedia sarana dan prasarana air minum dan air limbah (47 desa)}}{\text{Jumlah desa (93 desa)}} \times 100 = 50,54\%$$

Berikut data desa yang sudah tersedia sarana dan prasarana air minum dan air limbah, kondisi sampai dengan tahun 2017:

Tabel 3.39
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah untuk Masyarakat

NO	PROGRAM	JUMLAH DESA YANG SUDAH TERSEDIA
1	PAMSIMAS	33
2	SPAM	5
3	IPAL	7
4	SANIMAS	2
	Jumlah	47

Sumber : DPUTRPRKP 2017

Gambar 3.16
Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Pangandaran



Menara air/Reservoir



IPAL KOMUNAL KOMBINASI MCK
Sumber : PUHUBKOMINFO, 2017

Capaian misi ketiga ini didukung oleh 15 (lima belas) Program dengan jumlah anggaran Rp. 310,965,270,370.00 dengan realisasi sebesar Rp. 300,744,477,175.00 (96,71%). Rincian program berikut anggaran dan realisasinya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.40
Program Pendukung Misi ke-3

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	100,000,000.00	99,125,000.00	99.13
2	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	550,000,000.00	489,714,700.00	89.04
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7,011,000,000.00	6,797,855,000.00	96.96
4	Program Pengendalian Banjir	11,408,830,800.00	11,159,970,300.00	97.82
5	Program Peningkatan Jalan	215,352,165,400.00	208,403,741,472.00	96.77

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	dan Jembatan			
6	Program Pengembangan Perumahan	52,967,988,000.00	52,415,698,100.00	98.96
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7,573,168,000.00	6,717,829,105.00	88.71
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	250,000,000.00	240,313,200.00	96.13
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6,886,081,000.00	6,233,941,863.00	90.53
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	207,866,000.00	180,944,000.00	87.05
11	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	228,275,000.00	228,077,160.00	99.91
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	350,373,170.00	347,781,670.00	99.26
13	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	506,355,000.00	711,656,500.00	140.54
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	130,000,000.00	11,550,000.00	8.88
15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7,443,168,000.00	6,706,279,105.00	90.10
JUMLAH		310,965,270,370.00	300,744,477,175.00	96.71

Sasaran 36 Misi ke-4 RPJMD:
Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya/Serta Kuatnya Nilai Budaya yang Berkembang di Masyarakat

Sasaran Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya/serta Kuatnya Nilai Budaya yang Berkembang di Masyarakat merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keempat Kabupaten Pangandaran “Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya/serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa jumlah binaan kelompok seni budaya. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya/serta Kuatnya Nilai Budaya yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah penghargaan	Piagam / Piala	1	3	300	1	1	100	5	80
2	Jumlah binaan	kelompok	10	12	120	20	12	60	60	40

	kelompok seni budaya								
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					210		80		60

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya/serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat Tahun 2017 melalui dua indikator yang diperjanjikan yaitu jumlah penghargaan dan jumlah binaan kelompok seni dan budaya. Target indikator jumlah penghargaan sebanyak 1 piagam/piala dan realisasinya sebanyak 1 piagam/piala sehingga capaiannya 100%, sedangkan indikator jumlah binaan kelompok seni dan budaya targetnya sebanyak 20 kelompok dan realisasinya sebanyak 12 kelompok sehingga capaiannya 60%. Dari kedua indikator rata-rata capainnya sebesar 80%. Kedua indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD, maka capaian untuk indikator jumlah penghargaan sebesar 80% sedangkan untuk indikator jumlah binaan kelompok seni budaya mencapai sebesar 40% dan rata-rata capaian dari kedua indikator ini sebesar 60%.

Budaya lokal mempunyai peranan yang penting dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa, untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya, karena budaya tumbuh dan kembang pada ranah masyarakat pendukungnya. Disamping itu, bagi pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat sendiri, dan elemen lainnya haruslah menyokong atas keberlangsungan dalam pengelolaan kekayaan budaya kedepannya. Sejalan dengan hal tersebut fokus peningkatan pelestarian seni budaya Kabupaten Pangandaran yaitu dengan menetapkan sasaran meningkatnya pelestarian seni budaya/serta kuatnya nilai budaya yang berkembang di masyarakat Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan indikator jumlah binaan kelompok seni dan budaya. Kondisi ini ditunjang dengan potensi yang menjadikan pariwisata sebagai potensi unggulan. Selain itu, keberadaan potensi seni inipun sudah merupakan tradisi yang turun temurun. Berikut jumlah kebudayaan Kabupaten Pangandaran periode tahun 2017

Tabel 3.42
Jumlah Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017

No	Nama Sanggar	Ketua/Pimpinan	Kecamatan
1	Sanggar Tari Algia	Alinda	Kec. Parigi
2	Sanggar Tari Lingga Seni	Fani	Kec. Pangandaran
3	Lingkung Seni Campaka Mekar	Rizki	Kec. Sidamulih
4	Lingkung Seni Baranang Siang	Devi	Kec. Padaherang
5	Lingkung Seni Giri Mukti	Kusnan	Kec. Padaherang
6	Lingkung Seni Margajaya	Abah Karsodi	Kec. Cijulang
7	Saung Angklung Mang Koko	Koko Komarudin	Kec. Cijulang
8	Lingkung Seni Muncul Jaya Grup	Sabar	Kec. Pangandaran
9	Lingkung Seni Kuda Pangrawit	Mulyadi	Kec. Mangunjaya

10	Lingkung Seni Giri Santika	Iyus Rusliadi	Kec. Parigi
11	Lingkung Seni Mustika Paksi	R. Mehmet	Kec. Cijulang
12	Lingkung Seni Jembar Mustika	Apan Rahmat	Kec. Parigi

Sumber : Disparbud Tahun 2017

Prestasi yang diraih oleh kelompok seni budaya yang telah berdiri di Kabupaten Pangandaran. Berikut beberapa Piagam Penghargaan yang diraih atas prestasi yang ditorehkan oleh kelompok seni budaya di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 :

Gambar 3.17
Piagam Penghargaan Kesenian Se-Provinsi Jawa Barat



Capaian misi keempat ini didukung oleh 2 (dua) Program dengan jumlah anggaran Rp. 622,869,732.00 dengan realisasi sebesar Rp. 581,693,000.00 (93,39%). Rincian program berikut anggaran dan realisasinya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.43
Program Pendukung Misi ke-4

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	268,316,232.00	267,790,000.00	99.80
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	354,553,500.00	313,903,000.00	88.53
JUMLAH		622,869,732.00	581,693,000.00	93.39

Sasaran 38 Misi ke-5 RPJMD:
Meningkatnya Akses Pendidikan

Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kelima Kabupaten Pangandaran “Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pendidikan dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa APK SD/MI dan SMP/MTs, APK Pendidikan Menengah,

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) dan APK Pendidikan Non Formal. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akses pendidikan
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	APK SD/MI dan SMP/MTs	Persen	71	106,14	149,49	72	98	136,2	80	122,5
2	APK Pendidikan Menengah	Persen	60	63	105,00	70	n/a	0	100	63
3	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara/AMH)	Persen	97,99	97,43	99,43	100	n/a	0	100	97,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					117,97				45,4	97,3

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pendidikan Tahun 2017 melalui 4 indikator yang diperjanjikan tidak bisa dibandingkan penurunan atau peningkatannya dari tahun 2016 karena 2 indikator data tidak ditemukan. Hal itu terjadi karena, untuk APK Pendidikan menengah dari tahun 2017 SMA menjadi kewenangan provinsi bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota lagi. Sedangkan untuk indikator Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sulitnya melakukan pendataan.

Sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APK SD/MI dan SMP/MTs ditargetkan sebesar 72%, realisasi untuk indikator ini sebesar 98%, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 136,2%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD sebesar 80%, capaian tahun ini telah melebihi target sebesar 122,5%

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Jumlah Siswa Jenjang SD, SMP, MI, MTs Kab. Pangandaran

No	Instansi	Jumlah	Ket
1	SD	31.821	
2	MI	5.596	
3	SMP	13.140	
4	MTs	5.460	
Jumlah		56.017	

Sumber: *Buku Profil Disdikpora 2017*

Tabel 3.46
Jumlah Penduduk Usia 7 Sampai 15 Tahun Kab. Pangandaran

No	Penduduk	Jumlah	Ket
1	Usia 7-12 Tahun	37.689	
2	Usia 13-15 Tahun	19.427	
Jumlah		57.116	

Sumber: *Buku Profil Disdikpora*

Dari tabel di atas dapat terlihat Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Pangandaran sebesar 98%. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jumlah murid SD dan MI dengan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun. Untuk mengukur capaian indikator APK SD/MI dan SMP/MTs, menggunakan Formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa SD} - \text{MI dan SMP} - \text{MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7} - 15 \text{ tahun}} \times 100$$

Berdasarkan Tabel 3.35 dan Tabel 3.36 di atas dapat diketahui Jumlah Siswa SD/MI sebanyak 37.417 orang sedangkan Jumlah Siswa SMP/MTs sebanyak 18.600 orang dan Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun sebanyak 37.689 orang sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 19.427 orang. Maka jika data tersebut dihitung berdasarkan formulasi yang ditentukan hasilnya didapat APK SD/MI dan SMP/MTs sebesar 98% sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\frac{37.417 + 18.600}{37.689 + 19.427} \times 100 = 98$$

Sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APK Pendidikan Menengah ditargetkan sebesar 70%. Realisasi untuk indikator ini sebesar 63%, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar n/a%. Karena sekarang ini SMA menjadi lingkup kewenangan provinsi, bukan Pemerintah Kabupaten/Kota lagi, jadi data tidak tersedia (n/a).

Sedangkan untuk indikator penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) terkendala sulitnya untuk melakukan pendataan. Jadi, data untuk tahun 2017 tidak tersedia (n/a).

**Sasaran 39 Misi ke-5 RPJMD:
Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kelima Kabupaten Pangandaran “Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pendidikan dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa jumlah guru yang bersertifikat dan nilai rata-rata uji kompetensi guru. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah guru yang bersertifikat	Guru	2.292	2.219	96,82	2.337	1.940	81,61	2.654	73,1
2	Nilai rata-rata uji kompetensi guru	Nilai	>65	>56	86,15	>75	55,7	74,2	>80	69,53
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					91,49				77,9	71,3

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan Tahun 2017 melalui 2 indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari rata-rata capaian kinerja sasaran 91,49% menjadi 77,9%.

Sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator Jumlah Guru yang bersertifikat ditargetkan sebanyak 2.337 guru, realisasi untuk indikator ini sebanyak 1.940 guru, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 81,61%.

Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD sebanyak 2.654 guru, capaian tahun ini belum mencapai target yaitu 73,1% dari target akhir RPJMD. Berikut data guru bersertifikat pada akhir tahun 2017 dilihat berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 3.48
Jumlah Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan/Sekolah

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Bersertifikat (orang)
1	Taman Kanak-Kanak	92
2	Sekolah Dasar	1.411
3	Sekolah Menengah Pertama	405
4	Pengawas	32
JUMLAH		1.940

Sumber: Disdikpora Kab. Pangandaran, 2017

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru. Guru sebagai tenaga profesional bertugas mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pada tahun 2017 kendala tidak tercapainya indikator jumlah guru yang bersertifikat karena masih adanya guru yang belum bersertifikasi :

1. Dikarenakan nilai pre test UKG tidak mencapai rata-rata KKM dari pusat;
2. Banyak guru yang tidak linier dengan ijazah dan mata pelajaran yang ditempuh.

Upaya yang akan terus dilakukan yaitu:

1. Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru;
2. Pemberdayaan komunitas guru (KKG/MGMP) untuk ikut memfasilitasi guru dalam peningkatan kompetensinya.

Sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator nilai rata-rata uji kompetensi guru ditargetkan memiliki nilai >65. Realisasi untuk indikator nilai rata-rata uji kompetensi guru ini adalah 55,7, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 74,2%.

Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD dengan nilai >80, capaian tahun ini belum mencapai target atau hanya 69,53% dari target akhir RPJMD. Berikut data hasil uji kompetensi Guru di Kabupaten Pangandaran menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 3.49
Nilai Rata-Rata UKG Kab.Pangandaran 2017

No	Mapel/Jenjang	Rata-Rata	Ket
1	Guru SD	42,74	
2	Guru Matematika SMP	66,27	
3	Guru IPA SMP	55,85	
4	Guru Bahasa Inggris SMP	54,95	
5	Guru Bahasa Indonesia SMP	58,69	
Jumlah		55,70	

Sumber: *Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2017*

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu nilai rata-rata UKG Kab. Pangandaran masih di bawah nilai rata-rata nasional. Hal ini disebabkan salah satunya masih relatif sedikitnya program dalam upaya peningkatan kompetensi guru khususnya bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional.

Upaya yang dilakukan yaitu harus diadakannya program-program untuk meningkatkan kompetensi guru.

Sasaran 41 Misi ke-5 RPJMD:
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kelima Kabupaten Pangandaran “Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Cakupan pelayanan anak balita (SPM) dan Jumlah Puskesmas dan Rumah sakit yang memenuhi Standar. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Angka kematian ibu /100.000 kelahiran	Orang	3	9	33,33	3	5	33,33	18	77,78

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
	hidup									
2	Angka kematian bayi/1.000 kelahiran hidup	Orang	59	54	109,26	58	49	100	339	30,38
3	Cakupan Pelayanan anak balita (SPM)	Persen	85	86,66	101,95	86	81,52	94,8	88	191,1
4	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar	unit	3	2	66,67	4	6	150	15	53,33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					77,80					88,14

Capaian kinerja sasaran Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau Tahun 2017 melalui 4 indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan positif.

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau dengan indikator Angka kematian ibu / 100.000 kelahiran hidup ditargetkan sebanyak 3 orang. Realisasi untuk indikator ini sebanyak 5 orang. sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 33,33%.

Penghitungan capaian untuk indikator ini bersifat kebalikan, jika realisasi lebih besar dari target maka capaiannya semakin rendah dan jika realisasi lebih kecil dari target, maka capaiannya semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan indikator ini menghitung jumlah kematian masyarakat, sehingga akan berpengaruh juga terhadap data angka harapan hidup masyarakat.

Berikut disajikan data jumlah kematian ibu dan penyebabnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3.51
Jumlah Kematian Ibu dan Penyebabnya
Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	PUSKESMAS	JML KEMATIAN IBU	SEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN	INFEKSI	GGN SISTEM PEREDARAN DARAH (JANTUNG, STROKE, DLL)	PARTUS LAMA	LAIN-LAIN
1	Parigi	2	0	0	0	0	0	2
2	Selasari	1	0	0	0	1	0	0
3	Cijulang	0	0	0	0	0	0	0

No	PUSKESMAS	JML KEMATIAN IBU	SEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN	INFEKSI	GGN SISTEM PEREDARAN DARAH (JANTUNG, STROKE, DLL)	PAR-TUS LAMA	LAIN-LAIN
4	Cimerak	0	0	0	0	0	0	0
5	Legokjawa	1	0	1	0	0	0	0
6	Cigugur	0	0	0	0	0	0	0
7	Langkaplancar	0	0	0	0	0	0	0
8	Jadikarya	0	0	0	0	0	0	0
9	Mangunjaya	0	0	0	0	0	0	0
10	Padaherang	0	0	0	0	0	0	0
11	Sindangwangi	0	0	0	0	0	0	0
12	Kalipucang	0	0	0	0	0	0	0
13	Pangandaran	3	1	2	0	0	0	0
14	Sidamulih	1	1	0	0	0	0	0
15	Cikembulan	1	0	0	0	1	0	0
JUMLAH		9	2	3	0	2	0	2

sumber: Dinas Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian target indikator Angka kematian ibu /100.000 kelahiran hidup adalah:

1. Kurangnya pengetahuan ibu hamil/bersalin tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan;
2. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan yang beresiko tinggi seperti terlalu tua usia atau terlalu dekat jarak kehamilan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir Angka kematian ibu /100.000 kelahiran hidup dengan cara:

1. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
2. Pembebasan biaya melahirkan khususnya bagi penduduk Kabupaten Pangandaran;
3. Peningkatan kapasitas tenaga bidan dalam menangani persalinan;
4. Melakukan bedah kasus kematian ibu.

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau dengan indikator Angka kematian bayi/1.000 kelahiran hidup ditargetkan sebanyak 58 orang, realisasi untuk indikator ini sebanyak 49 orang, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 100%.

Pergitungan capaian untuk indikator ini bersifat kebalikan, jika realisasi lebih besar dari target maka capaiannya semakin rendah dan jika realisasi lebih kecil dari target, maka capaiannya semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan indikator ini menghitung jumlah kematian bayi, sehingga akan berpengaruh juga terhadap data angka harapan hidup masyarakat.

Berikut disajikan data jumlah kematian bayi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.52
Jumlah Kematian Bayi Neonatal dan Post Neonatal
Tahun 2017

NO	NAMA NEO/BAYI	NAMA ORANG TUA	UMUR	TANGGAL MENINGGAL	SEBAB KEMATIAN	TEMPAT KEMATIAN
1	By. Ny Ratmi	Ny. Ratmi/Tn Asep	6 Jam	01-Sep-17	Aspiksi	Diperjalanan ke RSU
2	By. Ny Kesih	Ny. Kesih/Tn. Juhendi	1 Hari	14-Mar-17	Aspirasi	Rumah
3	By. Ny Teti	Ny. Teti/Tn. Eka	5 Hari	31-Agu-17	BBLR	RSUD Banjar
4	By. Ny Rian	Ny. Trian/Tn. Dede	2 Hari	26-Jun-17	BBLR	RSUD Banjar
5	By. Ny. Rasumi	Ny. Rasumi/Tn. Sukiad	6 Hari	20-Jan-17	BBLR	RSUD Banjar
6	Rizki	Ny. Ila/Tn. Odang	7 Hari	05-Mar-17	BBLR	Rumah
7	Anisa	Ny. Cucun/Tn. Suhenda	5 Hari	17-Mar-17	BBLR	RSUD Banjar
8	By. Ny. Pipih	Ny. Pipih/Tn. Sugiran	1 Hari	18-Jan-17	BBLR/Cacat	RSUD Banjar
9	By. Ny. Siti	Ny. Siti/Tn. Ahmad	7 Hari	19-Jan-17	BBLR	RSUD Banjar
10	Fauzan	Ny. Nida/Tn. Asep	6 Hari	27-Mei-17	Aspirasi	Rumah
11	Rahmania	Ny. Susi/Tn. Abdul	1 Hari	05-Mei-17	BBLR	RSU Margono
12	Rahmani	Ny. Susi/Tn. Abdul	1 Hari	05-Mei-17	BBLR	RSU Margono
13	By. Ny. Neti	Ny. Neti/Tn. Jamil	3 Hari	03-Nov-17	Aspiksi	RS Mitra Idaman
14	By. Ny. Aisah	Ny. Aisah/Tn. Rahmat	3 Hari	26-Apr-17	Hisprung	RSUD Banjar
15	By. Ny. Ecah	Ny. Ecah/Tn. Mahpud	2 Hari	31/09/2017	Atresia Ani	RS Mitra Idaman
16	By. Ny. Otiah	Ny. Otiah/Tn. Ahmad	4 Hari	10-Jun-17	Ikterus	Diperjalanan ke RSU
17	By. Ny. Sulyanti	Ny. Sulyanti/Tn. Dedi	4 Hari	02-Jul-17	Pneumonia	RSUD Banjar
18	By. Ny. Reni	Ny. Reni/Tn. Mamat	2 Hari	17-Jan-17	BBLR	Rumah
19	Ananda Ibrohim	Ny. Dede/Tn. Nurdin	15 Hari	07-Apr-17	Cacat Bawaan	RS Mitra IDaman
20	Abdul Aziz	Ny. Desi/Tn. Nurjamil	1 Hari	03-Mar-17	Aspiksi	Diperjalanan ke RSU
21	By. Ny. Nurhayati	Ny. Nurhayati/Tn. Dadang	1/2 Jam	01-Mar-17	Aspiksi	Poskesdes
22	By. Ny. Yani	Ny. Yani/Tn. Edi	3 Hari	21-Agu-17	BBLR	Rumah
23	By. Ny. Rinawati	Ny. Rinawati/Tn. Asep S	2 Hari	25-Agu-17	BBLR	Klinik Bunda
24	By. Ny. Lasmanah	Ny. Lasmanah/Tn. Sumaja	1 Hari	07-Okt-17	BBLR	Rumah
25	Rafiski Haikal	Ny. Ratna/Tn. Enjang	5 Hari	24-Jan-17	BBLR	RSUD Banjar
26	By. Ny. Susi	Ny. Susi/Tn. Ipin Aripin	2 Hari	16-Apr-17	BBLR	RSUD Banjar
27	By. Ny. Kusmawati	Ny. Kusmawati/Tn. Toha	6 Jam	21-Apr-17	BBLSR	RSUD Banjar
28	By. Ny. Kusmawati	Ny. Kusmawati/Tn. Toha	6,5 Jam	22-Apr-17	BBLSR	RSUD Banjar
29	By. Ny. Kusmawati	Ny. Kusmawati/Tn. Toha	7 Jam	23-Apr-17	BBLSR	RSUD Banjar
30	Septian	Ny Narti/Tn.Nursalin	1 Hari	17/09/2017	Kel Jantung	Rs Mitra Idaman
31	By Ny Ai Omah	Ny. Ai Omah/Tn. Agus	1 Hari	06/05/2017	Kel Jantung	RS Banjar Patroman
32	Akmal	Ny. Omi/Tn Kasro	28 Hari	14/05/2017	Susp Meningitis	RS Mitra Idaman
33	By Ny Resi	Ny. Resi/Tn. Juhaya	3 hari	19/01/2017	BBLR	RSUD Banjar
34	By Ny Siti N	Ny. Siti N/Tn Wahro	11 Jam	13/08/2017	BBLR	RSUD Banjar
35	By. Ny Siska	Ny.Siska/Tn. Wisnu	10 Jam	26/02/2017	Aspiksi	Rumah Bersalin
36	By. Ny Aningsih	Ny. Aningsih/Tn. Sahli	3 Hari	19/05/2017	Aspiksi	RSUD Banjar
37	By. Ny Reni	Ny.Reni/Tn Rasiman	3 Hari	29/07/2017	Aspiksi	PKM Pangandaran
38	Arif	Ny. Siti/Tn Rohimat	6 Bln	17/09/2017	Dehidrasi	Rumah
39	Lutfi	Ny Wiwin/Tn Abdul	2 BLn	23/02/2017	Pneumonia	PKM Cijulang
40	Muhammad Erfvin	Ny Hesti/Tn Suparman	3,5 Bln	12/12/2017	Pneumonia	Diperjalanan ke RSU
41	Nadira	Ny. Lastri/Tn Asep	6 Bln	06/03/2017	Pneumonia	RS Siaga Medika
42	Firgi	Ny. Neneng/Tn Aris	8 Bln	28/05/2017	Kel Jantung	RSUD Banjar
43	Fazri Hidayat	Ny Tati/Tn Solihin	3 Bln	24/02/2017	Diare	RSUD Banjar

44	Jihan Rahayu	Ny Surati/Tn Sarto	6 Bln	07/12/2017	Kel Jantung	RSUD Banjar
45	By. Ny Yulianti	Ny Yulianti/Tn Salim	1 Bln	22/04/2017	Kel Saluran Cerna	RS Mitra Idaman
46	rizal	Ny Een/Tn Pendi	1 Bln	31/05/2017	Hisprung	Diperjalanan ke RSU
47	Devi	Ny Anisah/Tn Endang	10 Bln	05/10/2017	Kel Jantung	Rumah
48	Zahra	Ny Laeli/Tn Wili	1 Bln	21/07/2017	Cacat Bawaan	Klinik Cimenyan
49	By. Ny Wasintah	Ny Wasintah/Tn Waspan	1,5 Bln	12/12/2017	BBLR	RSUD Margono

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian target indikator Angka kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup adalah:

1. Belum ada fasilitas rujukan yang memadai di Kabupaten Pangandaran;
2. Belum maksimalnya penanganan ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
3. Distribusi bidan desa yang belum merata.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir Angka kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup dengan cara:

1. Melakukan bedah kasus kematian ibu dan bayi;
2. Peningkatan kapasitas bidan dalam menangani persalinan dan penanganan bayi baru lahir;
3. Penyuluhan dan pemanfaatan kegiatan posyandu dalam intervensi kesehatan ibu dan bayi.

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau dengan indikator cakupan pelayanan anak balita (SPM) ditargetkan sebesar 86%. Realisasi untuk indikator ini sebesar 81,52%. sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 94,8%.

Berikut disajikan data Cakupan Pelayanan Anak Balita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.53
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Tahun 2017

No	Puskesmas	Jumlah Sasaran Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita			
			Abs	%	Kum	%
1	Parigi	1482	90	6.07	1374	92.71
2	Selasari	964	56	5.81	844	87.55
3	Cijulang	1632	217	13.30	694	42.52
4	Cimerak	1226	187	15.25	889	72.51
5	Legokjawa	1498	89	5.94	1326	88.52
6	Cigugur	1322	174	13.16	1713	129.58
7	Langkaplancar	1740	190	10.92	1412	81.15
8	Jadikarya	1302	71	5.45	1164	89.40
9	Mangunjaya	1660	165	9.94	1116	67.23
10	Padaherang	2408	256	10.63	2114	87.79
11	Sindangwangi	1398	78	5.58	1247	89.20
12	Kalipucang	2582	278	10.77	1930	74.75

13	Pangandaran	3439	342	9.94	2522	73.34
14	Sidamulih	630	135	21.43	528	83.81
15	Cikembulan	890	55	6.18	834	93.71
JUMLAH		24173	2383	9.86	19707	81.52

Permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian target indikator cakupan pelayanan anak balita adalah:

1. Masih adanya faktor penanganan ibu melahirkan yang tidak sejalan dengan prosedur medis, salah satunya melahirkan dengan bantuan dukun beranak.
2. Adanya faktor “3T” yaitu terlambat rujukan, terlambat tindakan dan terlambat penanganan dan “4 terlalu” yaitu terlalu muda (usia ibu), terlalu tua (usia ibu), terlalu dekat (jarak kehamilan) dan terlalu banyak (anak).

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator cakupan pelayanan anak balita dengan cara:

1. Penguatan program seribu hari kehidupan pertama, mulai dari fase melahirkan sampai bayi tumbuh besar.
2. Penguatan peran posyandu dan desa siaga.
3. Menerapkan konsep kesiapsiagaan lingkungan mulai dari keluarga, tetangga dan perangkat lingkungan untuk memberi perhatian khusus pada ibu hamil.

Sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau dengan indikator Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar ditargetkan sebanyak 4 unit. Realisasi untuk indikator ini sebanyak 6 unit, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 150%. Enam unit puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Padaherang, Puskesmas Cijulang, Puskesmas Cikembulan, Puskesmas Cigugur, Puskesmas Parigi dan Puskesmas Pangandaran. Data tersebut baru berupa informasi lisan karena Sertifikatnya belum diterima dari Tim Asesor.

Permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian target indikator Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar adalah:

1. Pemerataan Sumber Daya tenaga kesehatan yang tidak merata.
2. Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai.
3. Kesiapan dokumen administrasi diantaranya profil dan hasil kegiatan puskesmas dan rumah sakit.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar dengan cara:

1. Melakukan pemerataan Sumber Daya tenaga kesehatan.
2. Pemenuhan Sarana dan prasarana kesehatan.
3. Menyiapkan tenaga administrasi sesuai dengan keahliannya.

**Sasaran 42 Misi ke-5 RPJMD:
Meningkatnya Budaya Sehat**

Sasaran meningkatnya budaya sehat merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Kelima Kabupaten Pangandaran “Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya sehat dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Sehat
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	135.000	103.025	76,31	136.000	158.545	116,57	825.000	12,49
2	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Desa	30	49	163,33	35	53	151,43	255	19,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					119,82				134	15,86

Sasaran meningkatnya budaya sehat dengan indikator Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan ditargetkan sebanyak 136.000 orang. Realisasi untuk indikator ini sebesar 158.545 orang, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 116,57%. Berikut disajikan data Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.55
Rekapitulasi Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar
Tahun 2017

NO	NAMA INSTANSI	PELAYANAN KESEHATAN DASAR				JUMLAH KUNJUNGAN/ KASUS
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	UGD	RUJUKAN	
1	Puskemas Mangunjaya	9.226	323	88	7	9.644
2	Puskemas Padaherang	9.537	144	101	93	9.875
3	Puskemas Sindangwangi	7.038	-	155	4	7.197

4	Puskemas Kalipucang	6.995	792	457	102	8.346
5	Puskemas Pangandaran	14.552	3.296	7.032	413	25.293
6	Puskemas Cikembulan	12.354	115	817	20	13.306
7	Puskemas Sidamulih	7.943	-	121	5	8.069
8	Puskemas Cijulang	8.959	761	440	153	10.313
9	Puskemas Cigugur	8.441	-	10	15	8.466
10	Puskemas Selasari	10.594	-	174	29	10.797
11	Puskemas Parigi	14.800	506	1.142	103	16.551
12	Puskemas Cimerak	6.603	-	105	16	6.724
13	Puskemas Legokjawa	5.581	-	477	37	6.095
14	Puskemas Langkaplancar	7.189	-	120	38	7.347
15	Puskemas Jadikarya	5.321	-	37	6	5.364
16	UPTD Labkesda	5.158	-	-	-	5.158
JUMLAH		140.291	5.937	11.276	1.041	158.545

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian target indikator Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jumlah tempat pelayanan dengan jumlah masyarakat yang dilayani belum memadai.

Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara pembangunan Puskesmas rawat inap di setiap kecamatan.

Sasaran meningkatnya budaya sehat dengan indikator jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat ditargetkan sebanyak 35 desa. Realisasi untuk indikator ini sebesar 53 desa, sehingga dapat diketahui capaiannya sebesar 151,43%. Berikut disajikan data jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.56
Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Tahun 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB)					
				Desa Melaksanakan		Desa Stop BABS		Desa STBM	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Cimerak	Legokjawa	6	4	67,00	0	0	0	0
		Cimerak	5	4	80,00	0	0	0	0
2	Cijulang	Cijulang	7	2	28,60	0	0	0	0
3	Parigi	Parigi	5	4	60,00	0	0	0	0
		Selasari	5	2	40,00	0	0	0	0
4	Cigugur	Cigugur	7	3	42,90	0	0	0	0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB)					
				Desa Melaksanakan		Desa Stop BABS		Desa STBM	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
5	Sidamulih	Cikembulan	4	4	100,00	0	0	0	0
		Sidamulih	3	3	100,00	0	0	0	0
6	Pangandaran	Pangandaran	8	4	50,00	0	0	0	0
7	Kalipucang	Kalipucang	9	5	44,40	0	0	0	0
8	Padaherang	Sindangwangi	5	4	60,00	0	0	0	0
		Padaherang	9	4	44,40	0	0	0	0
9	Mangunjaya	Mangunjaya	5	5	100,00	0	0	0	0
10	Langkaplancar	Langkaplancar	7	3	42,90	0	0	0	0
		Jadikarya	8	2	12,50	0	0	0	0
Jumlah			93	53	52,70			0	0

**Sasaran 48 Misi ke-5 RPJMD:
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan
Kemiskinan**

Sasaran meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian misi kelima Kabupaten Pangandaran “Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pendidikan dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS	orang	1.658	28.114	1.695,66	878	52.634	5.994,76	6.048	>100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					1.695,66					464,84

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan indikator jumlah keluarga miskin yang ditangani dan PMKS ditargetkan sebanyak 878 orang. Realisasi untuk indikator ini 52.634 orang, sehingga capaiannya 5.994,76%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 6.048 orang maka realisasi tahun 2017 telah mencapai >100%.

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah PMKS yg Seharusnya Menerima Bantuan	Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan					Ket
			APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lainnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8=4 sd 7	9
1	PARIGI	4.722	3.444	18	2.780	3	6.245	
2	CIJULANG	2.527	1.296	3	1.991	1	3.291	
3	CIMERAK	4.342	1.813	6	4.069	1	5.889	
4	CIGUGUR	3.434	2.409	4	2.148	1	4.562	
5	LANGKAPLANCAR	9.279	4.096	-	5.476	-	9.572	
6	MANGUNJAYA	7.583	2.461	-	2.351	1	4.813	
7	PADAHERANG	6.739	3.860	2	4.531	1	8.394	
8	KALIPUCANG	2.797	1.626	54	2.286	1	3.967	
9	PANGANDARAN	5.641	1.383	1	2.775	5	4.164	
10	SIDAMULIH	3.057	18	-	1.718	1	1.737	
JUMLAH		50.121	22.406	88	30.125	15	52.634	

Sumber : Dinsos PMD, 2017

Capaian Misi kelima ini didukung oleh 36 (tiga puluh enam) program yang tersebar di beberapa SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.146.394.713.542,00 dan realisasi sebesar Rp. 95.351.335.173,50 (65,13%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.59
Program Pendukung Misi ke-5

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Keluarga Berencana	69,034,000.00	68,843,000.00	99.72
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	17,978,000.00	15,950,000.00	88.72
3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	82,697,000.00	57,621,563.00	69.68
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,938,317,676.00	1,468,412,800.00	75.76
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4,029,410,000.00	3,815,719,407.00	94.70
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	278,020,000.00	263,607,000.00	94.82
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	565,550,000.00	484,511,225.00	85.67
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	85,143,000.00	57,029,150.00	66.98
9	Program Pelayanan Kontrasepsi	43,146,000.00	42,640,500.00	98.83

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
10	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	372,781,000.00	346,895,800.00	93.06
11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	45,203,250,300.00	42,901,550,341.00	94.91
12	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	48,172,000.00	48,172,000.00	100.00
13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	7,011,000,000.00	6,797,855,000.00	96.96
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	17,978,000.00	17,978,000.00	100.00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	106,906,000.00	81,602,900.00	76.33
16	Program Pendidikan Anak Usia Dini	541,378,000.00	528,085,900.00	97.54
17	Program Pendidikan Menengah	100,000,000.00	99,320,100.00	99.32
18	Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	290,050,000.00	289,250,000.00	99.72
19	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	65,561,000.00	65,516,000.00	99.93
20	Program Pangandaran Madani	354,553,500.00	313,903,000.00	88.53
21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	325,543,000.00	307,387,605.00	94.42
22	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3,156,512,000.00	1,147,194,000.00	36.34
23	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,348,856,171.00	7,107,357,121.00	96.71
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	40,966,000.00	40,966,000.00	100.00
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	43,125,000.00	39,919,000.00	92.57
26	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	596,179,000.00	430,239,223.00	72.17
27	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	502,635,000.00	470,201,367.00	93.55
28	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	220,110,000.00	212,505,270.00	96.55

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
29	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	241,346,000.00	234,060,800.00	96.98
30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	783,136,000.00	737,342,885.00	94.15
31	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	37,260,503,135.00	31,773,532,402.36	85.27
32	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	26,832,687,300.00	25,538,938,025.00	95.18
JUMLAH		138,572,524,082.00	125,804,107,384.36	90.79

**Sasaran 52 Misi ke-6 RPJMD:
Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan serta Sistem Informasi**

Sasaran Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan serta Sistem Informasi Tahun 2016 merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keenam Kabupaten Pangandaran “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Capaian kinerja sasaran tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa tersedianya kebutuhan pangan masyarakat. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.60
Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan serta Sistem Informasi
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat	Ton	66.000	95.081	144,06	72.600	340.250,7	468,66	508.869	66,86
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					144,06			468,66		66,86

Capaian kinerja sasaran tersedianya stok dan distribusi pangan serta sistem informasi Tahun 2017 melalui satu indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun 2016 sebelumnya mengalami peningkatan dari realisasi 95.081 ton menjadi 340.250,7 ton. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD baru mencapai 66,86%.

Pada Tahun 2017 terkait tersedianya kebutuhan pangan masyarakat target yang telah dicapai sebesar >100%, dari target tahun 2017 sebesar 72.600 Ton dan realisasinya sebesar 340.250,7 Ton.

Permasalahan pada capaian kinerja sasaran tersedianya stok dan distribusi pangan yaitu belum meratanya pengaktifan kembali fungsi lumbung

masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal dan, terjadinya lonjakan harga akibat permintaan tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan sehingga menyebabkan distribusi yang dilakukan LUPM/Kelompok terhambat.

Solusi dari permasalahan yaitu dilaksanakannya sosialisasi pembinaan untuk mendorong pengaktifan kembali kelembagaan lumbung, penguatan kelembagaan kelompok lumbung pangan dengan pertemuan-pertemuan dan penyatuan dalam asosiasi, serta LUPM tetap memasok beras ke Toko Tani Indonesia (TTI) dengan penyesuaian harga, namun tetap di bawah harga pasar agar membantu turunnya harga secara umum demi terciptanya stabilitas pasokan dan harga.

**Sasaran 55 Misi ke-6 RPJMD:
Berkembangnya Sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif,
Industri Kecil Menengah dan Koperasi**

Sasaran Berkembangnya Sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2017 merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keenam Kabupaten Pangandaran “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Capaian kinerja sasaran berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif, industri kecil menengah dan koperasi Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.61
Berkembangnya Sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif, Industri Kecil
Menengah dan Koperasi Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021 (Akhir RPJMD)	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	Pelaku usaha	75	23	30,67	480	5.073	1.056,88	4.200	>100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					30,67					0,54

Capaian kinerja sasaran Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif, industri kecil menengah dan koperasi Tahun 2017 melalui satu indikator yang diperjanjikan dibandingkan tahun 2016 sebelumnya mengalami peningkatan dari realisasi 23 pelaku usaha menjadi 5.073 pelaku usaha. Sedangkan untuk mencapai target pada tahun terakhir RPJMD sudah melebihi target >100%.

Berikut data Industri Kecil Menengah di yang didapat dari pendataan UMKM binaan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.62
Daftar UMKM Binaan Kabupaten Pangandaran

NO	NAMA PESERTA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	ADE TOLIB	Makanan ringan	Dsn. Sindangpari RT 03/06 Ds. Banjarharja Kec. Kalipucang
2	AGUS BASUKI	Sale Kering/Basah	Dsn. Sindangpari RT 11/10 Ds. Banjarharja Kec. Kalipucang
3	ASWATI	Jasa sablon dan Konveksi	Dsn. Karanganyar RT. 21/08 Ds. Cigugur Kec. Cigugur
4	ASEP MULYANA	Gula aren	Dsn. Pasir Peuteuy RT 05/02 Ds. Mekarwangi Kec. Langkaplancar
5	RAMLAN NUGRAHA	Kecap manis	Dsn. Cikangkung RT. 03/03 Ds. Cikembulan Kec. Sidamulih
6	ADE TATANG	Rumah Potong ayam	Dsn. Kemplung RT.03/04 Ds. Karangbenda Kec. Parigi
7	AJI KUSMAWAN	Jasa Sablon	Dsn. Burujul RT. 10/06 Ds. Padaherang Kec. Padaherang
8	M. ALI IMRON	Produk Keripik	Dsn banjar Waru Desa Cimusgede Kec. Cimerak
9	LENI WAHYUNI	Catering	Dsn. Karangsari Ds. Pananjung kec. Pangandaran
10	BUDIAWAN	Makanan ringan	Ds. Cikahuripan desa Cimerak. Kec. Cimerak
11	REGIN PERMADANI	Keripik	Ds. cidadap desa Cimerak. Kec. Cimerak
12	TURMAN IDRIS HERMAWAN	Kerajinan tangan dan Pasir laut	Pasar wisata blok e No. 60 pangandaran
13	SALUKI	Kerajinan Kerang dan Batok	Pasar wisata Blok e pangandaran
14	LAILANI ISMAH	Jasa Tor dan Travel	Pasar wisata pangandaran
15	RAHMAT	Kerajinan Perahu dan Batok	Putrappinggan
16	HENDARTO	Kerajinan Ukir Kayu dan Tanduk	citumang pintu 2
17	EKA	jasa	Putrappinggan
18	HENDRI	Kerajinan Ukir meubel	Babakan
19	YADI	Minuman Kopi	Babakan
20	NENAH	Kerajinan Kerang dan pasir laut	Pasar wisata pangandaran
21	KOKOS	Kerajinan layang-layang	Pasar ikan pantai timur pangandaran
22	CECEP	Kerajinan Hata	citumang pintu 2
23	MIRA	Jasa	lapang merdeka pasar pangandaran
24	DALIJO	Kerajinan tempurung/batok Kelapa	Cikangkung
25	HENDRA GUNAWAN	Jasa Foto	Haurseah RT. 07/03 Cijulang
26	AGUS NURSAMSI	Jasa wisata Body Rafting	Jalan Raya Cijulang no. 56
27	FIKI FATHY	Jus Honje	Wanayasa Cibadak
28	SUMADI	Sale	Dsn. Mangunjaya Kec. Magunjaya
29	RINI M JAMILAH	Jus Honje	Dsn. Kemplung RT.04/06 Ds. Karangbenda Kec. Parigi
30	REVALINA RIZKI RINJANI	Jasa	Dsn. Ciherang RT. 05/01

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa UMKM yang dibina sebanyak 30 UMKM, namun yang termasuk ke dalam usaha Industri (IKM) sebanyak 23 UMKM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Pangandaran tentang Pemberhentian Sementara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja ini yaitu membantu mempromosikan produk IKM melalui kegiatan gelar potensi daerah/pameran.

Sasaran 56 Misi ke-6 RPJMD:
Optimalisasi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata yang Berdaya Saing

Sasaran Optimalisasi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata yang Berdaya Saing Tahun 2017 merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keenam Kabupaten Pangandaran “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Capaian kinerja sasaran optimalisasi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berdaya saing Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.63
Optimalisasi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata yang Berdaya Saing Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	2.762.258	1.988.390	71,98	3.314.710	2.916.141	88	6.873.383	42,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					71,98				88	42,43

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata Siap Kunjung yang Memiliki Ketahanan dan Berdaya Saing Tahun 2017 melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan jika dibandingkan tahun 2016 sebelumnya mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir RPJMD realisasi tahun ini baru mencapai 42,43%. Berikut Jumlah Kunjungan

Tabel 3.64
Laporan Perbandingan Kunjungan Wisatawan 2013-2016

NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2013					TAHUN 2014				
		TARGET	WISMAN	WISNUS	Jumlah pengunjung	REALISASI	TARGET	WISMAN	WISNUS	Jumlah pengunjung	REALISASI
1	OW. Pangandaran	2.500.000.000	4.059	1.209.200	1.213.259	3.033.147.500	2.750.000.000	5.515	946.580	952.095	2.380.237.500
2	OW. Batu Hiu	200.000.000	215	60.333	60.548	151.370.000	200.000.000	48	67.980	68.028	170.070.000
3	OW. Green Canyon	400.000.000	4.016	123	4.139	318.367.500	376.000.000	5.350	154.255	159.605	399.012.500
4	OW. Batu karas	400.000.000	1.754	141.420	143.174	357.935.000	376.000.000	2.151	190.578	192.729	481.822.500
5	OW. Karapyak	20.000.000	6	31.898	31.904	57.427.100	48.000.000	22	34.320	34.342	61.815.600
JUMLAH		3.520.000.000	10.050	1.442.974	1.453.024	3.918.247.100	3.750.000.000	13.086	1.393.713	1.406.799	3.492.958.100

NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2015					TAHUN 2016				
		TARGET	WISMAN	WISNUS	Jumlah pengunjung	REALISASI	TARGET	WISMAN	WISNUS	Jumlah pengunjung	REALISASI
1	OW. Pangandaran	4.328.200.000	6.621	1.832.025	1.838.646	4.521.420.000	6.995.625.000	3.804	1.399.156	1.402.960	4.065.960.000
2	OW. Batu Hiu	323.850.000		103.645	103.645	259.112.500	523.575.000		83.349	83.349	246.540.000
3	OW. Green Canyon	711.200.000	7.105	189.830	196.935	498.670.250	1.126.205.000	5.654	143.240	148.894	451.413.750
4	OW. Batu karas	571.500.000	2.789	276.130	278.919	697.300.000	923.325.000	1.318	296.924	298.242	858.095.000
5	OW. Karapyak	97.750.000		40.783	40.783	71.407.800	157.950.000		48.945	48.945	110.029.400
JUMLAH		6.032.500.000	16.515	2.442.413	2.458.928	6.047.910.550	9.726.680.000	10.776	1.971.614	1.982.390	5.732.038.150

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran

Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis serta dinas/instansi terkait.

Pencapaian kinerja indikator jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar 71,98% atau sebanyak 1.988.390 orang dari target 2.762.258 orang.

Kabupaten Pangandaran juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Secara umum Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dibagi ke dalam tiga kategori :

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya diantaranya, objek wisata, yaitu Batu Kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang.
2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebanyak 10 objek wisata yaitu, Pantai Karang Nini, Pantai Lembah Putri, Pantai Karapyak, Pantai Palatar Agung, Pantai Pangandaran, Pantai Karang Tirta, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari dan Keusik Luhur.
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon, Wisata Ciwayang, Santirah, Gua Lanang, Curug Jambe dan Cagar Alam Pananjung.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, maka diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti Hajat Bumi Selamintuna, Upacara Adat, Gelar Budaya Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat Laut dan Ronggeng Gunung.

Untuk menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak memasuki kota Pangandaran. Pada Tahun 2014 di Kabupaten Pangandaran terdapat 214 hotel, diantaranya Hotel berbintang 3 ada 1 buah, Homestay 127 buah, Melati sebanyak 82 buah, dan Youth Hotel sebanyak 4 buah. Sebagai penarik minat wisatawan, di Kabupaten Pangandaran terdapat cukup banyak obyek wisata, diantaranya terdapat 28 buah situs peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta patilasan peninggalan sejarah yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu juga terdapat beberapa jenis hiburan yang tersedia dari berbagai perkumpulan atau organisasi kesenian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP), masuk ke dalam wilayah pengembangan Priangan Timur. Dan Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) penanganan ekonomi.

“Tujuan pengembangan wilayah Jabar Selatan, yaitu mewujudkan wilayah Jawa Barat bagian Selatan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, untuk rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabupaten Pangandaran ada di enam kecamatan. Yaitu di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini adalah:

1. Kekhawatiran tentang adanya bencana alam seperti gelombang besar/tsunami mengingat mayoritas tempat wisata di Kabupaten Pangandaran adalah daerah pesisir/Pantai; dan
2. Terputusnya akses jalan ke beberapa objek wisata di Kabupaten Pangandaran dikarenakan ambruknya jembatan Ciputrapinggan menjelang akhir tahun 2016;

Upaya untuk pencapaian indikator ini didukung dengan adanya daya tarik wisata dengan perbaikan infrastruktur, adanya hubungan kerjasama yang baik antar stakeholder kepariwisataan, dan adanya promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, upaya lain yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yaitu dengan:

1. Adanya website yang menampilkan profil dan keunggulan daerah yang memiliki potensi wisata.
2. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam penataan infrastruktur untuk mendukung daya Tarik wisata;
3. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan pihak lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
4. Membuka dan mengeksplorasi objek wisata baru yang lebih variatif.

**Sasaran 58 Misi ke-6 RPJMD:
Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Masyarakat**

Sasaran Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Tahun 2017 merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keenam Kabupaten Pangandaran “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Capaian kinerja sasaran berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif, industri kecil menengah dan koperasi Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Meningkatnya Indeks nilai tukar petani. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Masyarakat
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021 (Akhir RPJMD)	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pendapatan petani ikan	Rupiah	2.200.000	1.410.000	34,09	19.800.000	20.400.000	103,03	3.200.000	>100
2	Meningkatnya pendapatan nelayan	Rupiah	1.680.000	600.000	35,71	24.681.600	28.757.217	116,51	2.640.000	>100
3	Meningkatnya Indeks nilai tukar petani	Indeks	129,41	n/a	-	120	129,41	107,84	139,41	92,82
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					n/a					n/a

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Tahun 2017 melalui tiga indikator yang diperjanjikan yaitu meningkatnya pendapatan petani ikan, meningkatnya pendapatan nelayan dan meningkatnya Indeks nilai tukar petani. Target indikator meningkatnya pendapatan petani ikan sebesar Rp.19.800.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.20.400,00 sehingga capaiannya 103,03%, indikator meningkatnya pendapatan nelayan targetnya sebesar Rp.24.681.600,00 dan realisasinya Rp.28.757.217,00 sehingga capaiannya 116,51% sedangkan indikator meningkatnya Indeks nilai tukar petani targetnya sebesar 120 Indeks dan realisasinya 129,41 sehingga besaran capaiannya sebesar 107,84%.

Berikut data rata-rata pendapatan/penghasilan pembudidaya ikan per bulan:

Tabel 3.66
Data Rata-rata Pendapatan/Penghasilan Pembudidaya Ikan per Bulan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 dan 2017

Rata-rata Pendapatan/ Penghasilan Pembudidaya Ikan per bulan Tahun 2015											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu	0 - 300 ribu

Keterangan:
Pada Tahun 2015 terjadi kemarau panjang dan bencana alam serta penyakit sehingga produksi dan pendapatan pembudidaya ikan menurun

Rata-rata Pendapatan/ Penghasilan Pembudidaya Ikan per bulan Tahun 2016											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu	200 - 600 ribu

Keterangan:
Tahun 2016 kegiatan produksi relatif normal hanya ada beberapa wilayah yang terkena penyakit dan bencana alam

Berikut data pendapatan/ penghasilan nelayan per bulan tahun 2017:

Tabel 3.67
Data Pendapatan/ Penghasilan Nelayan per bulan Tahun 2017

Data Pendapatan/ Penghasilan Nelayan per bulan Tahun 2015

Januari 1	Februari 2	Maret 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agustus 8	September 9	Oktober 10	November 11	Desember 12
0- 500.000	0-500.000	0-500.000	1- 3 juta	1- 3 juta	1- 3 juta	1- 3 juta	3-5 juta	3-5 juta	3-5 juta	3-5 juta	3-5 juta

Keterangan:

Januari - Maret Musim Paceklik
April - Juli Musim Sedang
Agustus - Desember Musim Panen

Data Pendapatan/ Penghasilan Nelayan per bulan Tahun 2016

Januari 1	Februari 2	Maret 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agustus 8	September 9	Oktober 10	November 11	Desember 12
1-2 juta	1-2 juta	1-2 juta	0-300.000	0-300.000	0-300.000	0-300.000	0-300.000	1-2 juta	500.000 - 1 juta	500.000 - 1 juta	500.000 - 1 juta

Keterangan:

Tahun 2016 hampir sepanjang tahun paceklik karena Cuaca ekstrem jadi banyak nelayan yang tidak bisa melaut
Januari - Maret Musim Sedang
April - Agustus Paceklik total karena kondisi iklim
September - Desember mulai sebagian melaut

Kendala dalam meningkatkan pendapatan petani ikan yaitu :

1. Penyakit dan kesehatan lingkungan kawasan budidaya;
2. Cuaca yang tidak menentu; dan
3. Penerapan CBIB/CPIB belum diterapkan.

Upaya dalam meningkatkan pendapatan petani ikan yaitu dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis budidaya perikanan.

Kendala dalam meningkatkan pendapatan nelayan, yaitu :

1. Armada masih kecil di bawah 2 GT;
2. Daya jangkau untuk melaut masih one day fishing (terbatas);
3. Alat tangkap yang dimiliki nelayan terbatas baik dari jenis maupun jumlahnya; dan
4. Cuaca yang tidak menentu.

Upaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan, yaitu :

1. Bansarpi kapal 5-10 GT baik dari APBD maupun APBN;
2. Bansarpi alat penangkapan ikan baik dari APBD maupun APBN;

Nilai Tukar Petani merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

□ **Indeks Angka Nilai Tukar Petani :**

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

**Sasaran 59 Misi ke-6 RPJMD:
Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Perikanan, Pertanian,
Peternakan dan Perkebunan**

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Jumlah Produksi Komoditas Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2017 merupakan sasaran strategis dalam upaya pencapaian Misi Keenam Kabupaten Pangandaran “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Meningkatkan Produksi Kelapa, Karet, Cengkeh, Pala, Tembakau, Kakao, Kopi, Padi, Jagung dan Kedelai Serta Peternakan diantaranya Sapi, Kambing, Domba dan Unggas. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2017 sebagai tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.68
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Jumlah Produksi Komoditas
Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
1	Meningkatnya Produksi									
	a. Kelapa	Butir	0	177.436.000	>100	114.000.000	125.610.299	110,18	868.041.600	>100
	b. Karet	Ton	0	293,75	>100	346	333,33	96,3	439	>100
	c. Cengkeh	Ton	0	74,06	>100	78	81,8	104,87	1.230	>100
	d. Pala	Ton	0	9,09	>100	9	10,3	114,44	141	>100
	e. Tembakau	Ton	0	5,95	>100	30	49,98	166,6	472	>100
	f. Kakao	Ton	0	235,40	>100	540	209,01	38,7	8.497	>100
	g. Kopi	Ton	0	266,79	>100	337	303,02	89,91	5.301	>100
	h. Padi	Ton	229.154	205.571,03	89,71	232.125	192.953,95	83,12	1.419.489	28,1
	i. Jagung	Ton	497	6.349,50	1.277,57	504	4.739,59	940,39	3.087	>100
	j. Kedelai	Ton	5.474	424,48	7,75	5.865	541,20	9,22	37.145	2,6
2	Peternakan									
	k. Sapi	Ekor	250	516.061	206.424,40	250	16.587	>100	1.500	>100
	l. Kambing	Ekor	450	14.068	3.126,22	450	16.530	>100	2.700	>100
	m. Domba	Ekor	800	118.853	14.856,63	800	36.535	>100	4.800	>100
	n. Unggas	Ekor	0	2.825.061	>100	500	977.767	>100	2.500	>100
3	Perikanan									

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	(Akhir RPJMD)	
	o. Ikan Budidaya	Ton	556,63	438,92	78,85	95	233,10	>100	503	46,3
4	Kelautan									
	p. Ikan Tangkap	Ton	2.061,42	1.049,50	50,91	3.444	5.674,87	>100	24.156	23,5
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					>100			>100		>100

Sasaran meningkatnya jumlah produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan Tahun 2017 dengan indikator kinerja utama berupa meningkatnya jumlah produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Meningkatnya Produksi Kelapa, Karet, Cengkeh, Pala, Tembakau, Kakao, Kopi, Padi, Jagung dan Kedelai serta Peternakan diantaranya Sapi, Kambing, Domba dan Unggas. Pada Tahun 2017 terkait meningkatnya jumlah produksi komoditas perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan Tahun 2017 dapat dilihat melalui indikator kinerja utama berupa Meningkatnya Produksi Kelapa, Karet, Cengkeh, Pala, Tembakau, Kakao, Kopi, Padi, Jagung dan Kedelai, Peternakan diantaranya Sapi, Kambing, Domba dan Unggas target yang telah dicapai Kelapa sebesar >100%, Karet sebesar 96,3%, Cengkeh sebesar >100%, Pala sebesar >100%, Tembakau sebesar >100%, Kakao sebesar 38,7%, Kopi sebesar 89,91%, Padi sebesar 83,12%, Jagung sebesar 940,4% dan Kedelai sebesar 9,22% serta Peternakan diantaranya Sapi sebesar >100%, Kambing sebesar >100%, Domba sebesar >100% dan Unggas sebesar >100% , Perikanan yaitu Ikan Budidaya sebesar >100% serta kelautan yaitu Ikan Tangkap sebesar >100% dengan target tahun 2017 Kelapa sebesar 114.000.000 butir, Karet sebesar 346 Ton, Cengkeh sebesar 78 Ton, Pala sebesar 9 Ton, Tembakau sebesar 30 Ton, Kakao sebesar 540 Ton, Kopi sebesar 337 Ton, Padi sebesar 232.125 Ton, Jagung sebesar 504 Ton dan Kedelai sebesar 5.865 Ton Serta Peternakan diantaranya Sapi sebesar 250 ekor, Kambing sebesar 450 ekor, Domba sebesar 800 ekor dan Unggas sebesar 500 ekor, Perikanan yaitu Ikan Budidaya sebesar 95 Ton dan Kelautan yaitu Ikan Tangkap sebesar 3.444 Ton dan capaian target nyata Kelapa sebesar 125.610.299 Butir, Karet sebesar 333,3 Ton, Cengkeh sebesar 81,8 Ton, Pala sebesar 10,3 Ton, Tembakau sebesar 49,98 Ton, Kakao sebesar 209,01 Ton, Kopi sebesar 303,02 Ton, Padi sebesar 192.953,95 Ton, Jagung sebesar 4.739,59 Ton dan Kedelai sebesar 541,2 Ton, Peternakan diantaranya Sapi sebesar 16.587 ekor, Kambing sebesar 16.530 ekor, Domba sebesar 36.535 ekor dan Unggas sebesar 977.767 ekor, Perikanan yaitu Ikan Budidaya sebesar 233,1 Ton dan Kelautan yaitu Ikan Tangkap sebesar 5.674,87 Ton. Capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya

mengalami peningkatannya dari tahun 2016. Sedangkan untuk mencapai target pada tahun terakhir RPJMD sebagian besar capaiannya sudah melebihi target akhir RPJMD dari ikan budidaya dan ikan tangkap.

Capaian Misi keenam ini didukung oleh 28 (dua puluh delapan) program yang tersebar di beberapa SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.032.858.415,00 dan realisasi sebesar Rp.21.896.462.515,00 (87,47%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.71
Program Pendukung Misi ke-6

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	105,000,000.00	101,933,000.00	97.08
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,170,405,880.00	2,136,757,662.00	98.45
3	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	246,410,000.00	244,791,000.00	99.34
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	83,110,000.00	83,110,000.00	100.00
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	614,674,000.00	524,845,031.00	85.39
6	Program Pengembangan Kemitraan	186,484,000.00	186,479,000.00	100.00
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	93,393,200.00	92,802,548.00	99.37
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,829,530,923.00	1,800,187,568.00	98.40
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,552,715,000.00	1,393,979,073.00	89.78
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	18,714,000.00	18,714,000.00	100.00
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	17,978,000.00	16,788,400.00	93.38
12	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	75,307,000.00	75,244,000.00	99.92
13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	50,600,000.00	48,845,000.00	96.53
14	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	184,952,000.00	154,795,000.00	83.69
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	669,257,000.00	643,474,125.00	96.15
16	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	251,820,000.00	229,142,000.00	90.99
17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	69,840,000.00	69,840,000.00	100.00
18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	161,798,000.00	161,397,644.00	99.75
19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	10,000,000.00	9,894,000.00	98.94
20	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1,798,783,000.00	1,600,624,534.00	88.98
21	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	180,843,000.00	179,096,317.00	99.03
22	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	181,852,000.00	84,894,000.00	46.68

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	144,063,000.00	142,063,000.00	98.61
JUMLAH		10,697,530,003.00	9,999,696,902.00	93.48



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan menggunakan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja utama. Dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama (68,29%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian:
 - a. Sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (53,66%) capaiannya melebihi target.
 - b. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja utama (14,63%) capaiannya sesuai target
2. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama (19,51%) tidak mencapai target.
3. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama (7,32%) target capaiannya 0 (nol), dikarenakan pada tahun anggaran berkenaan tidak dianggarkan program yang menunjang terhadap ketercapaian indikator tersebut.
4. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja utama (4,88%) tidak tersedia data.

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Plafond anggaran diprioritaskan untuk mendorong capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
2. Membangun *database* untuk mendukung gambaran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama secara utuh.

Dalam Tahun Anggaran 2017, untuk pencapaian kinerja terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan menggunakan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja utama. Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1,367,742,917,673.50,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1,307,759,932,586.36,- atau 95,62%.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum dapat menghitung dukungan anggaran untuk pencapaian setiap indikator kinerja utama maupun sasarannya, karena belum linearnya antara indikator kinerja utama ataupun sasaran dengan programnya (masih ada satu program untuk mendukung lebih satu sasaran atau indikator kinerja utama). Hal ini menjadi catatan penting untuk menjadi bahan perbaikan ke depan berupa pemetaan dan sinkronisasi antara sasaran atau indikator kinerja utama dengan program dan kegiatan sebagai pendukung capaian indikator kinerja utama dan sasaran. Namun demikian dalam LKIP tahun ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah menampilkan dukungan anggaran terkait pencapaian misi RPJMD.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun kedua yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2017 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lagi pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.

Parigi, Maret 2018
BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA